



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2017

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
2018

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2017 ini disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendikbud Nomor 9 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Laporan Kinerja disusun untuk memberikan pertanggungjawaban sekaligus sebagai evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2017. LAKIP ini berisi diskripsi dan analisis capaian kinerja tahun 2017 serta kesimpulan dan rekomendasi sebagai masukan perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran kinerja lembaga dan bermanfaat bagi pembuat kebijakan, perencana dan pelaksana program pendidikan dasar dan menengah, serta pihak pemangku kepentingan pendidikan maupun masyarakat umum.

Jakarta, 29 Januari 2018
Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,



Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 195905121983111001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Peran Strategis Organisasi	4
C. Organisasi Direktorat Jenderal	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Perencanaan Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Pencapaian Program Prioritas	68
C. Pencapaian Kinerja Keuangan	77
BAB IV PENUTUP	81
A. Simpulan.....	81
B. Rekomendasi	82
LAMPIRAN	83
A. Perjanjian Kinerja 2017	83
B. Realisasi Anggaran per Satker	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Target Pencapaian Indikator Kinerja Program 2015-2019	13
Tabel 2: Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2017.....	18
Tabel 3: Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	21
Tabel 4: Data Pokok Peserta Didik.....	23
Tabel 5: APK SD/SDLB,dibawah 75% Tahun 2016/2017	28
Tabel 6: Output Pendukung Pencapaian APK/APM SD/SDLB dan Angka Putus Sekolah	29
Tabel 7: APK SMA/SMK/SMLB < 50% Tahun 2017/2018	41
Tabel 8: Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB berakreditasi minimal B.....	50
Tabel 9: Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter) tahun 2017.....	51
Tabel 10: Perolehan medali dari berbagai kompetisi Internasional	53
Tabel 11: Pembangunan Sarana dan prasarana SD untuk pemenuhan SNP.	56
Tabel 12: Output Pendukung IKP SMP yang Memiliki Prasarana dan Sarana sesuai SNP.	57
Tabel 13: Satuan pendidikan yang diukur peningkatan indeks efektivitasnya	65
Tabel 14: Output Pendukung Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan.....	66
Tabel 15: Output Pendukung Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (Sangat Baik).....	67
Tabel 16: sasaran dan alokasi anggaran serta realisasi pengaluran PIP.....	69
Tabel 17: sasaran dan alokasi anggaran serta realisasi pengaluran PIP Tahun 2016	70
Tabel 18: sasaran dan alokasi anggaran serta realisasi pengaluran PIP Tahun 2017	70
Tabel 19: Alokasi anggaran dana BOS.....	72
Tabel 20: Sasaran dalam Pelatihan Instruktur Kurikulum 2013	75
Tabel 21: Perbandingan Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Lulusan SMK 2016	77



DAFTAR GAMBAR

Bagan 1 Struktur Organisasi Ditjen Dikdasmen	9
Bagan 2: Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)	10
Bagan 3: Target Kinerja Keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2017	20
Bagan 4: Grafik APM SD/SDLB Tahun 2017	24
Bagan 5: Grafik Perkembangan Capaian APM SD/SDLB Tahun 2015 - 2017	25
Bagan 6: Grafik APK SD/SDLB Tahun 2017	26
Bagan 7: Grafik Perkembangan Capaian APK SD/SDLB Tahun 2015 - 2017	27
Bagan 8: Grafik Angka Anak Putus Sekolah SD/SDLB Tahun 2017	28
Bagan 9 : Grafik Perkembangan Capaian Angka Putus Sekolah SD/ SDLB Tahun 2015 - 2017	29
Bagan 10: Grafik APM SMP/SMPLB Tahun 2017	30
Bagan 11: Grafik Perkembangan APM SMP/SMPLB Tahun 2015 - 2017	32
Bagan 12: Grafik APK SMP/SMPLB Tahun 2017	32
Bagan 13: Grafik Perkembangan APK SMP/SMPLB Tahun 2015 - 2017	33
Bagan 14: Grafik Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB Tahun 2017	34
Bagan 15: Grafik Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB Tahun 2015- 2017	35
Bagan 16: Grafik Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/SMPLB Tahun 2017	35
Bagan 17: Grafik Perkembangan Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/SMPLB Tahun 2015 - 2017	36
Bagan 18: Grafik Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Penerima Bantuan Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Tahun 2017	37
Bagan 19: Grafik Perkembangan Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Penerima Bantuan Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Tahun 2015- 2017	38
Bagan 20: Grafik Rasio APM perempuan: APM laki-laki di SD Tahun 2017	38
Bagan 21: Grafik Perkembangan Rasio APM perempuan: APM laki-laki di SD Tahun 2015 - 2017	39
Bagan 22: Grafik Rasio APM perempuan: APM laki-laki di SMP Tahun 2017	39
Bagan 23: Grafik Perkembangan Rasio APM perempuan: APM laki-laki di SMP Tahun 2015 - 2017	40



Bagan 24: Grafik APK SMA/SMK/SMLB Tahun 2017	41
Bagan 25: Grafik Perkembangan APK SMA/SMK/SMLB Tahun 2015 - 2017	42
Bagan 26: Grafik Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK Tahun 2017	43
Bagan 27: Grafik Perkembangan Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK Tahun 2015 - 2017	43
Bagan 28: Grafik Rasio APK perempuan : APK laki-laki di SMA/ SMK Tahun 2017.....	44
Bagan 29: Grafik Perkembangan Rasio APK perempuan : APK laki-laki di SMA/ SMK Tahun 2015 - 2017	44
Bagan 30: Grafik Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Menengah Penerima Bantuan Melalui KIP Tahun 2017	45
Bagan 31: Grafik Perkembangan Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Menengah Penerima Bantuan Melalui KIP Tahun 2015 - 2017	46
Bagan 32: Grafik Angka Putus Sekolah SMA/SMK Tahun 2017	46
Bagan 33: Grafik Perkembangan Angka Putus Sekolah SMA/SMK Tahun 2015-2017	47
Bagan 35: Grafik jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah tahun 2017.....	53
Bagan 36: Grafik persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017	57
Bagan 37: Grafik persentase capaian SPM SD per Provinsi Tahun 2017	58
Bagan 38: Grafik SPM SD Tahun 2017	59
Bagan 39: Grafik persentase capaian SPM SMP per Provinsi Tahun 2017.....	60
Bagan 40: Grafik SPM SMP Tahun 2017.....	61
Bagan 41: Grafik Perkembangan SPM SMP Tahun 2015 -2017.....	62
Bagan 42: Perkembangan Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru Tahun 2015 – 2017.....	66
Bagan 43: Grafik Perkembangan nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen	68
Bagan 44 : Peta jalan pengembangan SMK	76
Bagan 45: Grafik persentase alokasi anggaran per Satker Tahun 2017	78
Bagan 46: Grafik daya serap anggaran Tahun 2017	80
Bagan 47: Diagram data serap anggaran Tahun 2017	80



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut telah dilakukan berbagai program dengan anggaran sebesar Rp. 22.478.361.054.000. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017, dilakukan perubahan anggaran menjadi Rp. 21.938.319.454.000, dengan daya serap sebesar Rp. 21.535.535.553.535 (98,18%).

Sasaran Program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi 8 (delapan) sasaran strategis yang didukung 29 Indikator Kinerja Program (IKP). Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar Yang Berkualitas;

Upaya yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pencapaian angka partisipasi ini adalah melalui pembangunan USB, ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas. Program lainnya adalah mengurangi angka putus sekolah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) telah disalurkan sebanyak 14.730.582 siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 36 juta siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB. Namun berbagai upaya tersebut belum dapat memenuhi target yang diharapkan yaitu meningkatnya Angka Murni (APM) untuk SMP/SMPLB, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB dan SMP/SMPLB. Untuk APM SD/SDLB dari target sebesar 82,88% tercapai 80,99%, sementara target APK SD/SDLB dari target 98,02%, tercapai 92,14%. Sedangkan untuk APM SMP/SMPLB dari target 73,07%, tercapai 58,04%, dan APK SMP/SMPLB dari target 82,04% tercapai 77,78%.

2. Siswa Yang Berpartisipasi Mengikuti Pendidikan SMA/SMK/SMLB

Pada jenjang pendidikan menengah sasaran program untuk meningkatkan APK SMA/SMK/SMLB sebesar 82,15% dan tercapai sebesar 75,81%. Peningkatan APK ini dari tahun sebelumnya sebesar 5,34%. Peningkatan APK pendidikan menengah salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah lulusan SMP/SMPLB dan sederajat yang melanjutkan ke SMA/SMK/SMLB yang mencapai 103,15%.



3. Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/ SMLB

Angka putus sekolah SMA/SMK/ SMLB ditargetkan sebesar 1,00% dan realisasi sebesar 1,12%. Terdapat kesenjangan 0,12 antara target dan realisasi. Upaya menekan angka putus sekolah SMA/SMK/SMLB di angka 1,00% tidak tercapai, karena faktor budaya menikah dini di beberapa wilayah, selain itu banyak siswa yang harus membantu orang tua bekerja. Intervensi yang telah dilakukan untuk menurunkan angka putus sekolah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dengan sasaran sebanyak 3.856.899 siswa, namun yang tersalurkan sebanyak 3.400.089 siswa atau 88,16%, menyalurkan BOS kepada 8.948.128 siswa

4. Sekolah menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019

Untuk menjamin ketersediaan layanan pendidikan pada setiap kecamatan di seluruh Indonesia, maka pembangunan unit sekolah baru (USB) Sekolah Menengah diprioritaskan bagi wilayah kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah, yaitu sebesar 1.114 kecamatan dari 7.075 kecamatan atau 15,75%.

5. Peningkatan kualitas pembelajaran;

Sasaran program peningkatan kualitas pembelajaran adalah mutu lulusan yang memiliki karakter positif dan daya saing regional. Selain itu jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B diharapkan meningkat. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dicapai seiring dengan pencapaian terhadap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar rata-rata nasional untuk tingkat SD sebesar 71,18%, dan SMP sebesar 70,90%.

6. Jumlah sekolah menengah rujukan/ model di setiap kabupaten dan kota;

Pemerataan kualitas pendidikan pada seluruh kabupaten/kota dilakukan melalui program pembinaan sekolah rujukan dan sekolah model. Setidaknya pada setiap kabupaten/kota terdapat satu satuan pendidikan rujukan (sekolah rujukan) sebagai acuan pengembangan mutu pendidikan sekolah lainnya di kabupaten/kota tersebut. Semua kabupaten/kota telah memiliki sekolah model, namun beberapa kabupaten belum memiliki sekolah rujukan.

7. Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Peningkatan kualitas sekolah ditandai dengan terpenuhi 8 standard nasional pendidikan (SNP). Oleh karena itu upaya pemenuhan SNP telah dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Prioritaas pemenuhan SNP tersebut



adalah pada aspek pemenuhan standard sarana dan prasarana SD dan SMP. Adapun secara nasional pencapaian SNP pada keseluruhan standar adalah 58,6%.

8. Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik.

Tata kelola pendidikan dasar dan menengah yang baik diupayakan melalui peningkatan fungsi dan kualitas data pokok pendidikan dasar dan menengah sebagai data base perencanaan berbagai program dan kegiatan, peningkatan pelayanan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu indikator penilaian SAKIP merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan program dan anggaran yang memenuhi standard akuntabilitas, transparan dan efektif. Hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal menunjukkan hasil yang signifikan yaitu 78,11 secara normatif masuk pada kategori BB.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan Permendikbud No 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memperhatikan kemajuan dan potensi Indonesia, ADB dalam laporannya yang berjudul *Asia 2050: Realizing Asian Century* memperkirakan Indonesia akan menjadi 7 (tujuh) kekuatan ekonomi utama di Asia bersama China, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand. Dalam laporannya yang terakhir, Bank Dunia memasukkan Indonesia dalam jajaran 10 (sepuluh) besar perekonomian dunia.

Di tengah prestasi tersebut, upaya perkuatan kelembagaan masih perlu terus dilanjutkan. Indonesia diyakini masih tumbuh di bawah potensi yang dimiliki karena berbagai permasalahan, antara lain rendahnya kapasitas kelembagaan publik. Laporan dari Bank Dunia berjudul *“Investing in Indonesia’s Institutions”* menyebutkan bahwa problem utama di Indonesia bukanlah masalah pembiayaan semata, tetapi *“lack of effective and accountable institutions that can translate available resources into better development outcomes”*. Menyadari situasi ini, pemerintah selalu memberi perhatian terhadap upaya membangun kapasitas kelembagaan pemerintah agar mampu melaksanakan program dan kegiatan pembangunan guna mencapai kinerja yang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Upaya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah ini tercantum di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2015-2019, sebagai penjabaran RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019. Penguatan kapasitas kelembagaan memiliki arti yang sangat strategis mengingat kapasitas kelembagaan yang tinggi akan menjadi pondasi yang kokoh bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan efektif, efisien, dan akuntabel guna tercapainya sasaran pembangunan pendidikan nasional.

Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah menjadi semakin efektif dan akuntabel bilamana lembaga-lembaga pemerintah berfungsi dengan baik yang ditandai dengan: (1) fungsi yang jelas, kewenangan yang tepat, serta struktur



organisasi yang efektif dan efisien sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi dan benturan kewenangan; (2) aturan main dan tata hubungan kerja yang efektif, efisien, transparan dan sinergis (*interconnected governance system*); dan (3) profesionalitas dan integritas aparatur sipil negara yang tinggi sehingga mampu melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis lembaganya.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan koordinasi yang intensif dan efektif antar berbagai instansi terkait melalui penataan kelembagaan pemerintah dengan memperhatikan: (1) kebijakan pembangunan; (2) peraturan-perundangan yang berlaku dan sejalan dengan kebijakan desentralisasi/ otonomi daerah; (3) prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern; serta (4) transparansi, efektivitas, dan efisiensi sesuai ketersediaan sumber daya. Pembentukan lembaga baru bersifat sangat selektif dan hanya untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak. Dari berbagai upaya tersebut diharapkan dapat terwujud kerangka kelembagaan yang efektif dan akuntabel, yang dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui:

1. Pembentukan lembaga independen untuk merumuskan dan melaksanakan sistem penilaian pendidikan
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (TI) pendidikan termasuk pengembangan ilmu pengetahuan TI, penyediaan materi bahan ajar, penguatan metode pembelajaran yang efektif dan penguatan tata kelola pendidikan
3. Pembentukan dewan pendidikan di tingkat provinsi.
4. Pembentukan lembaga independen untuk melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi berbagai program prioritas nasional.
5. Meningkatkan sinergi kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan.
6. Memperkuat sistem informasi pendidikan di semua tingkatan pemerintahan

Ruang lingkup LAKIP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi:

1. Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal;
2. Program kerja Direktorat Jenderal, terutama yang menjadi program atau isu nasional;
3. Kegiatan prioritas untuk pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal.



4. Permasalahan atau kendala yang berpengaruh terhadap pencapaian hasil kinerja.

Penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;



18. Permendikbud Nomor 14 tahun 2015 tentang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
19. Permendikbud nomor 15 tahun 2015 tentang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
20. Permendikbud Nomor 9 tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Peran Strategis Organisasi

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk melaksanakan peran tersebut melalui penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar provinsi, kabupaten, dan kota serta antar daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Sesuai dengan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang mengamanatkan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan dasar oleh pemerintah kabupaten kota sedangkan untuk pendidikan menengah oleh pemerintah provinsi.

Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki peran strategis sangat ditentukan oleh ketepatan dalam penetapan sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.



1. Penguatan Peran Siswa dalam Ekosistem Pendidikan.

Penguatan peran siswa ini bertujuan menciptakan posisi siswa sebagai subyek pendidikan. Melibatkan siswa secara teknis akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Siswa jenjang pendidikan dasar atau anak-anak Sekolah Dasar disesuaikan dengan level kemampuan dan karakternya. Pada jenjang pendidikan menengah, pelibatan siswa di kelas secara interaktif diharapkan mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Pada semua jenjang, peningkatan keterlibatan siswa itu antara lain ditandai oleh meningkatnya perilaku positif siswa.

2. Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah dan Anak Berkebutuhan Khusus.

Peningkatan akses di semua jenjang pendidikan telah dilaksanakan selama ini di seluruh wilayah Indonesia. Upaya peningkatan lebih lanjut akan dilakukan, mengingat masih ada ketidakmerataan tingkat akses pendidikan antar provinsi, kabupaten dan kota. Perhatian lebih besar dibanding era sebelumnya akan diberikan pula pada peningkatan akses pendidikan anak berkebutuhan khusus. Meskipun upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun telah dilaksanakan dan tuntas bagi 66,15% dari keseluruhan kabupaten dan kota (340 dari 514 kabupaten dan kota), peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah untuk memenuhi program wajib belajar dua belas tahun merupakan agenda yang harus dipenuhi dalam lima tahun ke depan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Seiring dengan hal ini, fokus peningkatan akses pendidikan dasar ditekankan pada 174 kabupaten dan kota (33,85%) untuk menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun.

Peningkatan jaminan bagi lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah merupakan fokus peningkatan akses pendidikan menengah. Solusi atas kendala biaya dan jarak atau keterjangkauan antara lain melalui pendirian sekolah menengah baru di setiap kecamatan yang dikombinasikan dengan penyediaan biaya operasional pendidikan serta pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Inovasi dalam penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi diperhatikan untuk mengakselerasi peningkatan akses pendidikan menengah. Fokus peningkatan akses pendidikan



dasar dan menengah dalam lima tahun kedepan juga menitikberatkan pada peningkatan akses bagi anak berkebutuhan khusus, pengembangan daerah 3T, dan memperhatikan aspek gender.

3. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter.

Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dalam lima tahun ke depan difokuskan pada pembentukan karakter siswa. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes internasional. Sebagai contoh, hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Di samping tes yang demikian itu, mengingat Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan mutu pada pendidikan dasar dan menengah berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus-menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik. Contoh aspek yang mutlak diperhatikan dalam konteks ini adalah pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian peserta didik. Sementara itu, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah, sehingga terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keberagaman.



4. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel.

Tata kelola pendidikan yang meliputi kinerja keuangan dan fisik harus memenuhi prinsip transparan dan akuntabel, yang bertujuan untuk menjaga agar, (a) mutu laporan keuangan tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (b) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan program kerja dan anggaran serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional.

Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan fokus pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Dengan demikian Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dapat menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Selain itu partisipasi pemerintah daerah turut menentukan dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu perlu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penyediaan anggaran pendidikan berbasis kinerja dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran, antara lain melalui mekanisme BOS, Program Indonesia Pintar (PIP), DAK fisik yang diarahkan pada ketersediaan sarana prasarana yang lengkap, baik dan bermutu.

C. Organisasi Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015, pasal 346, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan dasar dan menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumberdaya, pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan Negara asing atau lembaga asing, penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus dan



- daerah tertinggal (pendidikan layanan khusus), dan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah;
3. Fasilitasi pembangunan *teaching factory* dan *technopark* di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan;
 4. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dasar dan menengah;
 5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan dasar dan menengah;
 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar dan menengah;
 7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara teknis dilakukan oleh lembaga unit eselon II dibawahnya yang terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
4. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
5. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; dan
7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain, 1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Kemendikbud; 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melaksanakan program-programnya; dan 3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

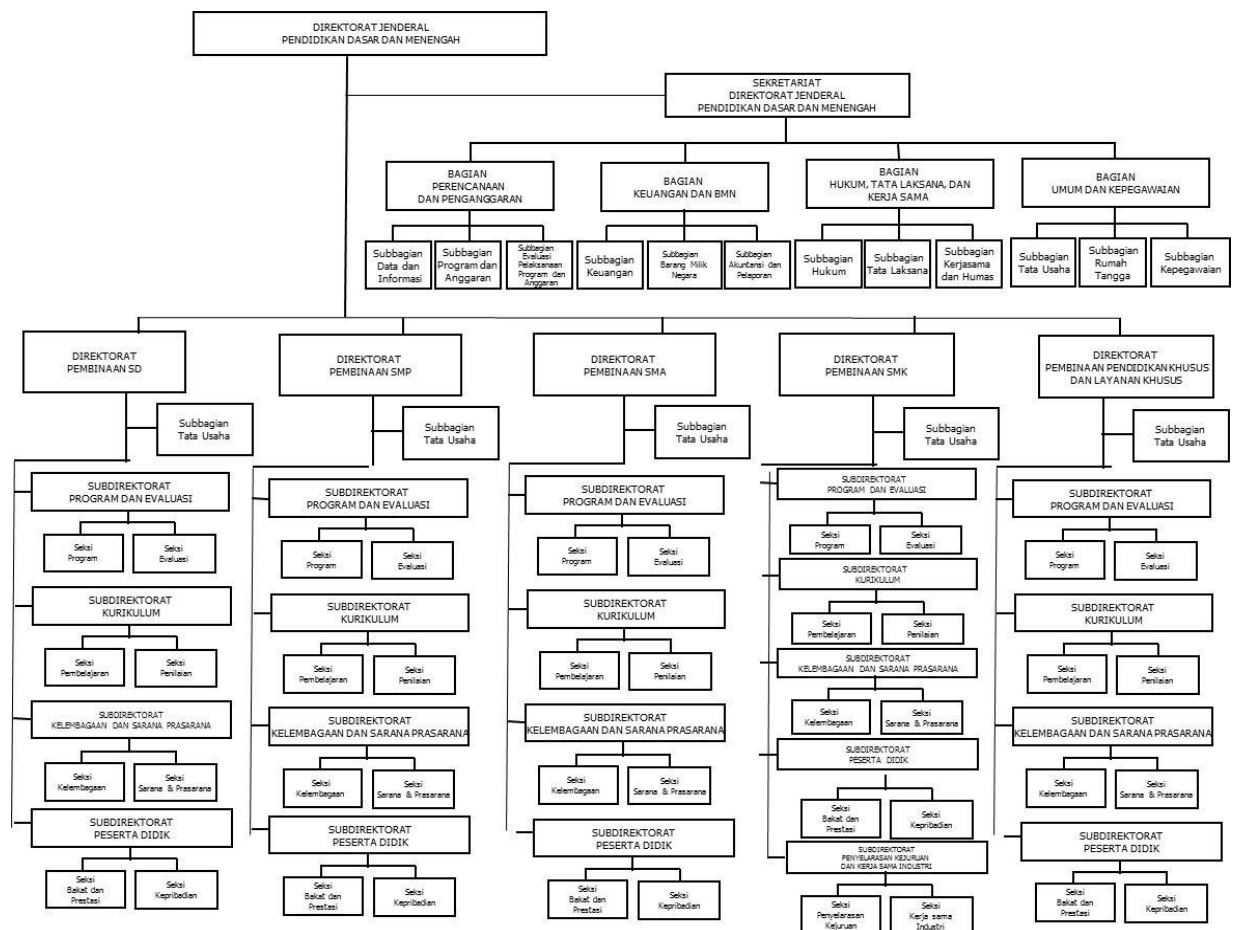
Pada periode pembangunan 2015-2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu pada



Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2015—2019 ditunjukkan pada gambar berikut:

Bagan 1 Struktur Organisasi Ditjen Dikdasmen



Permasalahan dan isu strategis pendidikan dasar dan menengah

Berbagai perkembangan dan perubahan internal dan eksternal telah membawa dampak dan permasalahan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terhadap peningkatan akses, mutu dan tata kelola pendidikan.

1. Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Anak Berkebutuhan Khusus.

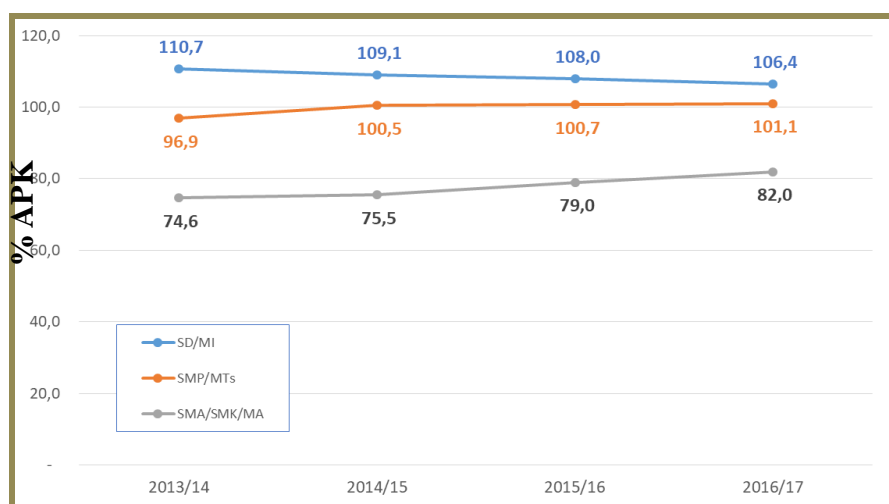
Untuk meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah serta akses anak berkebutuhan khusus, dilakukan upaya optimalisasi program wajib belajar



12 tahun agar lebih terlayani secara baik; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Indikator Kinerja Program (IKP) untuk pemenuhan hak terhadap pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas adalah :

- a. Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia sekolah pada pendidikan SD dan SMP.
- b. Meningkatnya angka melanjutkan ke SMP/MTs;
- c. Menurunnya kesenjangan antar kelompok masyarakat:
- d. Meningkatnya siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB
- e. Menurunnya persentase angka putus sekolah dan tidak terjadi drop out SMA/SMK/SMLB
- f. Tersedianya SMA/SMK di setiap kecamatan pada tahun 2019

Bagan 2: Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)



Sumber: PDSPK Kemendikbud Tahun 2017

Perubahan komposisi jumlah penduduk usia tersebut menuntut penambahan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) tahun anggaran 2017 untuk seluruh satuan pendidikan. Berdasarkan DAPODIK jumlah ruang kelas untuk seluruh satuan pendidikan tahun 2017 sebesar 1.691.015 ruang dengan kondisi baik sebesar 511.420 ruang, kondisi rusak ringan sebesar 928.560 ruang, dan kondisi rusak sedang dan berat sebesar 251.017 ruang.



2. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter, belum tercapai.

Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan pemenuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovatif. Masih rendahnya pemenuhan SNP merupakan permasalahan yang harus diatasi dengan peta jalan yang jelas.

3. Implementasi Kurikulum 2013

Pengembangan Kurikulum 2013 dilaksanakan atas dasar beberapa prinsip utama. Pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Keempat, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Kelima, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Keenam, keselarasan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian.

Sebagai titik tekan pengembangan Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan (Kemendikbud, 2014). Aplikasi yang taat asas dari prinsip-prinsip ini menjadi sangat esensial dalam mewujudkan keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 di lapangan. Kesemuanya ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, apakah itu pemerintah daerah serta dukungan dari orang tua dan masyarakat.

Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Kurikulum 2013 yang dikembangkan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi manusia yang berkualitas yang mampu menjawab tantangan zaman, sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,



berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Untuk menjamin implementasi kurikulum 2013 di sekolah/madrasah perlu diperkuat melalui pendampingan, pemantauan dan supervisi baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, agar titik tekan kurikulum 2013 bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

4. Penguatan Peran Siswa dalam Ekosistem Pendidikan.

Untuk meningkatkan peran siswa dalam ekosistem pendidikan diperlukan indikator perilaku siswa yang spesifik dan terukur. Indikator keberhasilan sasaran program ini adalah Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK/SMLB adalah “Baik”

Melalui program ini diharapkan siswa dapat mewujudkan pemahaman mengenai pluralitas dan keragaman sosial dan budaya dalam masyarakat yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman; terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air; terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

5. Pembangunan Daerah 3T.

Sebagaimana tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 bahwa pembangunan daerah 3 T menjadi prioritas nasional RPJMN 2015-2019 sebanyak 122 Kabupaten/Kota. Dari wilayah tersebut sebagian besar merupakan daerah pulau terpencil, terluar dan kawasan pedalaman yang secara geografis memiliki tingkat kesulitan akses yang tinggi. Oleh karena itu untuk mewujudkan salah satu amanat nawacita tentang membangun dari pinggiran, daerah tersebut perlu mendapat perhatian khusus.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Untuk menjamin tercapainya Tujuan Strategis yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran program yang dapat memberikan kontribusi nyata dan terukur. Oleh karena itu, setiap sasaran program yang mendukung tercapainya tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja program (IKP). Adapun sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1: Target Pencapaian Indikator Kinerja Program 2015-2019

Kode	Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target		
			2015	2016	2017	2018	2019
06 - PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH							
SP -01	Pemenuhan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar Yang Berkualitas						
IKP1	APM SD/SDLB	%	81,94	81,54	82,88	84,52	85,20
IKP2	APK SD/SDLB	%	96,24	93,05	98,02	99,92	100,55
IKP3	Angka Putus Sekolah SD	%	0,67	0,26	1,00	0,98	0,97
IKP4	APM SMP/SMPLB	%	61,45	74,63	73,07	73,70	73,72
IKP5	APK SMP/SMPLB	%	76,15	75,77	82,40	83,61	83,77
IKP6	Angka Putus Sekolah SMP	%	0,87	0,50	1,08	1,03	1,01
IKP7	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP	%	78.40	81.68	84,95	86,89	87,67
IKP8	Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar	Siswa	10.815.709	15.704.020	15.380.582	15.380.582	15.380.582
IKP9	Rasio APM perempuan:laki-laki di SD	%	100	100	100	100	100
IKP10	Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP	%	100	103	100	100	100



Kode	Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target		
			2015	2016	2017	2018	2019
SP -02	Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB/Paket C						
IKP11	APK SMA/SMK/SMLB	%	66,41	70,47	82,15	84,09	85,71
IKP12	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	%	96,90	96,96	84,00	86,00	88,00
IKP13	Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA/SMK	%	100	100	100	100	100
SP -03	Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SMLB/ Paket C						
IKP14	Jumlah siswa jenjang pendidikan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar	Siswa	3.550.863	3.497.617	3.856.899	3.856.979	3.858.211
IKP15	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	1,81	1,33	1,00	0,90	0,80
SP -04	Sekolah Menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019						
IKP16	Persentase kecamatan yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah	%	84,74	78,11	88,30	94,20	100
SP -05	Peningkatan Kualitas Pembelajaran						
IKP17	Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B	Sek	3,331		15.300	15.300	15.300
IKP18	Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik(pendidikan karakter)	Nilai Sikap	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
IKP19	Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah	Medali Tertimbang	308	151	152	160	168
IKP20	Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	%	18,00	18,00	24,00	32,00	40,00
IKP21	Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	%	25,00	25,00	37,00	45,00	53,00



Kode	Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target		
			2015	2016	2017	2018	2019
IKP22	Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	63,36	70,10	61,35	61,46	61,49
IKP23	Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	76,62	70,90	75,13	75,25	75,37
IKP24	SM menerapkan program penyalarsan dengan dunia kerja	%	7,7	15,0	45,00	60,00	75,00
SP-06	Jumlah Sekolah Menengah Rujukan/Model di setiap Kabupaten/Kota						
IKP25	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah Rujukan/Model	%	41,63	100	70,50	90,00	100
IKP26	Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B	%	86	86	75	80	85
SP-07	Meningkatnya kualitas satuan Pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)						
IKP27	Persentase Satuan Pendidikan yang meningkat indeks efektifitasnya berdasarkan SNP	%	14	29	52	76	95
SP-08	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik						
IKP28	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru	%	85	87	89	92	95
IKP29	Nilai Minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (sangat baik) pada tahun 2019	%	71,09	76,58	75	78	80



Selanjutnya ada 4 sasaran program yang menjadi prioritas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu :

1. Penguatan Peran Siswa dalam Ekosistem Pendidikan.

Untuk mengetahui peran siswa dalam ekosistem pendidikan diperlukan indikator perilaku siswa yang spesifik dan terukur. Indikator keberhasilan sasaran program ini adalah Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK/SMLB adalah “Baik”

Melalui program ini diharapkan siswa dapat mewujudkan pemahaman mengenai pluralitas dan keragaman sosial dan budaya dalam masyarakat yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman; terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air; terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

2. Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Anak Berkebutuhan Khusus.

Untuk meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah dan akses anak berkebutuhan khusus dilakukan upaya dengan mengoptimalkan program wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Indikator Kinerja Program (IKP) untuk pemenuhan hak terhadap pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas adalah :

- a. Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia sekolah pada pendidikan SD dan SMP.
- b. Meningkatnya angka melanjutkan ke SMP/MTs;
- c. Menurunnya kesenjangan antarkelompok masyarakat:



- d. Meningkatnya siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB
- e. Menurunnya persentase angka putus sekolah dan tidak terjadi drop out SMA/SMK/SMLB
- f. Tersedianya SMA/SMK di setiap kecamatan pada tahun 2019

3. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter.

Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan pemenuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovatif. Untuk mencapai tujuan strategis ini ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

- a. Tersedianya sekolah menengah rujukan di setiap kabupaten/kota .
- b. Meningkatnya kualitas satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan (SNP).

4. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien. *Performace* atau kinerja pengelola kegiatan menjadi sangat penting bagi terciptanya tata kelola yang diinginkan tersebut. Selain perlunya kinerja yang baik, maka ketercapaian tujuan strategis ini harus didukung oleh Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

- a. Tersedianya data pendidikan dasar dan menengah yang akurat, berkelanjutan dan terbaru.
- b. Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (sangat baik) pada tahun 2015-2019.



Sasaran Program tersebut memberikan arah dalam mencapai tujuan strategis melalui program dan kegiatan yang menunjang tercapainya Indikator Kinerja Program (IKP).

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen pimpinan lembaga yang harus dipenuhi sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2: Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	Pemenuhan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar Yang Berkualitas	1. APM SD/SDLB	82,88%	Rp.12.823.721.945.000, - Rp.6.557.340.000.000,-
		2. APK SD/SDLB/Paket A	98,02%	
		3. Angka putus sekolah SD	1,00%	
		4. APM SMP/SMPLB	73,07%	
		5. APK SMP/SMPLB/PAKET B	82,40%	
		6. Angka putus sekolah SMP	1,08%	
		7. Angka melanjutkan SD/MI ke SMP	84,95%	
		8. Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar penerima bantuan melalui KIP	15.380.58 2	
		9. Rasio APM perempuan:laki-laki di SD	100%	
		10. Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP	100%	
2	Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB	1. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C	82,15%	Rp.2.261.050.000.000,-
		2. Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	84,00%	
		3. Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA/SMK	100%	
3	Persentase angka putus sekolah SMA/SMK/SMLB	1. Jumlah siswa jenjang pendidikan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar	3.856.899	Rp.2.261.050.000.000,-
		2. Angka putus sekolah SMA/SMK	1,00%	
4	Sekolah menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 sekolah menengah	88,30%	
5	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1. Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B	15,300	
		2. Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter)	Baik	

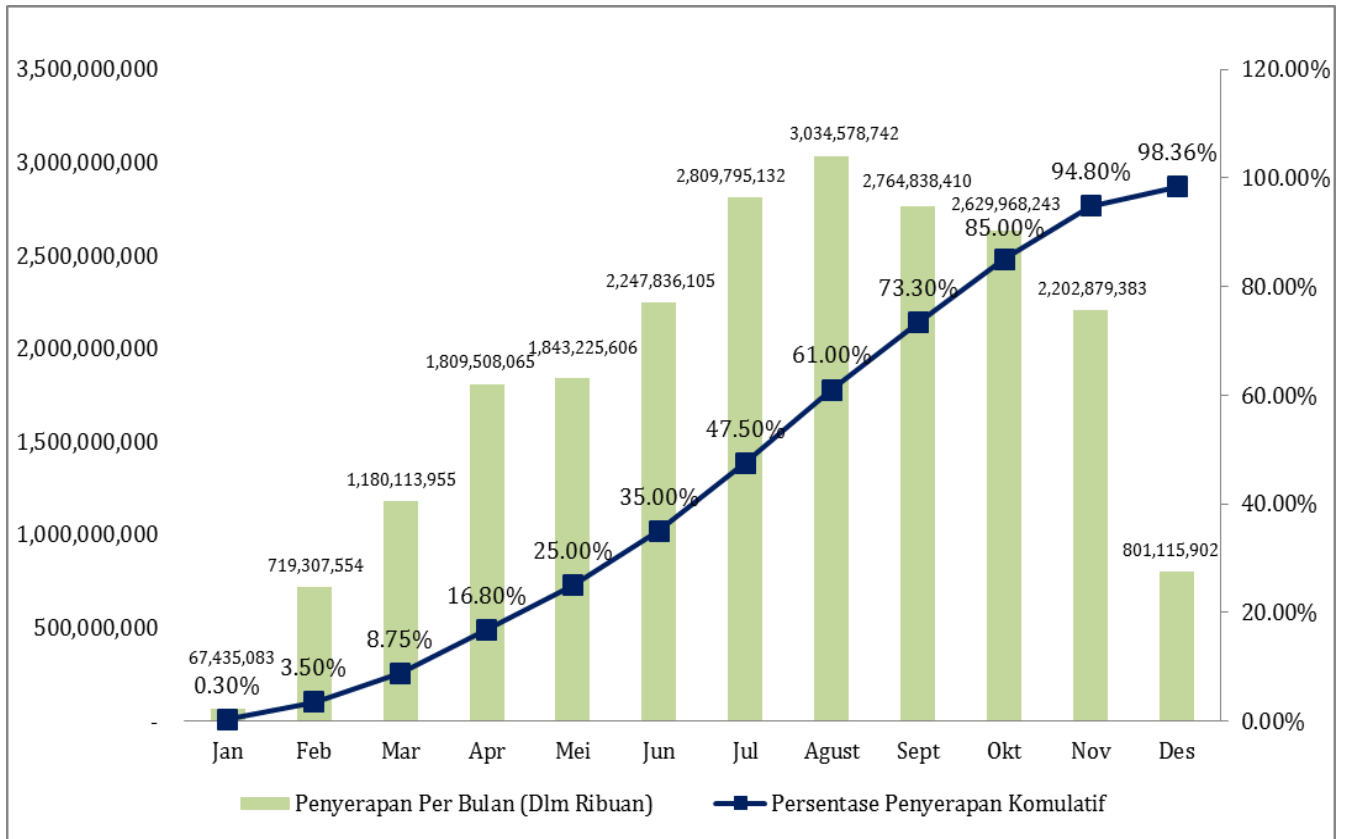


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
		3. Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah	152	Rp.271.628.087.000,-
		4. Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	24,00%	
		5. Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	37,00%	
		6. Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	61,35%	
		7. Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	75,13%	
		8. SM menerapkan program penyelarasan dengan dunia kerja	45,00%	
6	Jumlah sekolah menengah rujukan/model di setiap kabupaten/kota	1. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah Rujukan/Model	70,50%	
		2. Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B	75,00%	
7	Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP	52,00%	
8	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik	1. Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru	89,00%	
		2. Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen	77,00	

Jumlah alokasi anggaran program pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp.22.478.361.054.000,- (Dua puluh dua triliun empat ratus tujuh delapan puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah).



Bagan 3: Target Kinerja Keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2017



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Program Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2017 memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai hasil pengukuran indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015 – 2019. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja lembaga untuk mencapai 29 Indikator Kinerja Program (IKP) yang dilaksanakan oleh 6 satuan kerja pusat yaitu; Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Pembinaan PKPLK, dan Sekretariat Direktorat Jenderal, serta 34 LPMP, serta kegiatan dekonsentrasi di 34 provinsi. Satuan Kerja tersebut melaksanakan 8 sasaran program yang didistribusikan melalui sebanyak 625 output.

Tabel 3: Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Kode	Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	2015	2016	2017		
			Realisasi		Target	Realisasi	%
06 - PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH							
SP -01	Pemenuhan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar Yang Berkualitas						
IKP1	APM SD/SDLB	%	82,00%	82,16%	82,88%	80,99%	97,71
IKP2	APK SD/SDLB	%	95,38%	93,79%	98,02%	92,14%	94,00
IKP3	Angka Putus Sekolah SD	%	0,67%	0,26%	1,00%	0,13%	769,23
IKP4	APM SMP/SMPLB	%	61,20%	57,32%	73,07%	58,04%	79,43
IKP5	APK SMP/SMPLB	%	77,46%	77,42%	82,04%	77,78%	94,80
IKP6	Angka Putus Sekolah SMP	%	0,87%	0,50%	1,08%	0,50%	216,00
IKP7	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP	%	78,40%	81,68%	84,95%	81,50%	95,93
IKP8	Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar	Siswa	10.815.709	15.704.020	15.380.582	14.813.904	96,32
IKP9	Rasio APM perempuan:laki-laki di SD	%	100%	109%	100%	91,60%	91,60



Kode	Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	2015	2016	2017		
			Realisasi		Target	Realisasi	%
IKP10	Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP	%	100%	103%	100%	95,70%	95,70
SP -02	Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB						
IKP11	APK SMA/SMK/SMLB	%	66,41%	70,47%	82,15%	75,81%	92,28
IKP12	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	%	96,90%	96,96%	84,00%	103,15%	122,80
IKP13	Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA/SMK	%	100%	100%	100%	96,54%	96,54
SP -03	Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SMLB						
IKP14	Jumlah siswa jenjang pendidikan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar	Siswa	3.550.863	3.497.617	3.856.899	3.400.039	88,15
IKP15	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	1,81%	1,33 %	1,00%	1,12%	89,28
SP -04	Sekolah Menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019						
IKP16	Persentase kecamatan yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah	%	84,74%	78,11%	88,30%	87,60%	99,20
SP -05	Peningkatan Kualitas Pembelajaran						
IKP17	Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B	Sek	5.098	8.312	15.300	15.722	102,75
IKP18	Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik(pendidikan karakter)	Nilai Sikap	Baik	Baik	Baik	Baik	100
IKP19	Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah	Medali Tertimbang	308	151	152	197	129,60
IKP20	Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	%	18,00%	18,00%	24 %	Peta mutu SD	
IKP21	Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	%	25,00%	25,00%	37 %	40,11%	108,40
IKP22	Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	63,36%	70,10%	61.35 %	74,13%	120,83
IKP23	Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	76,62%	70,90%	75.13 %	63,80%	84,91
IKP24	SM menerapkan program penyalarsan dengan dunia kerja	%	7,7%	15,00%	45 %	41,20%	87,02
SP -06	Jumlah Sekolah Menengah Rujukan/Model di setiap Kabupaten/Kota						
IKP25	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah Rujukan/Model	%	41,63%	100%	70,5 %	99,80%	141,56
IKP26	Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B	%	86,00%	86,00%	75,00 %	72,61%	85,32
SP-07	Meningkatnya kualitas satuan Pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)						
IKP27	Persentase Satuan Pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP	%	14,00%	29,00%	52,00%	58,60%	112,69



Kode	Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	2015	2016	2017		
			Realisasi		Target	Realisasi	%
SP-08	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik						
IKP28	Data pendidikan Dasar dan Menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan	%	85,00%	87,00%	89,00%	99,22%	111,48
IKP29	Nilai Minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (sangat baik) pada tahun 2019	%	71,09%	76,58%	77,00%	74,63%	96,92

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyelesaikan beberapa tahapan kegiatan untuk mencapai kinerja terbaik. Beberapa indikator kinerja program yang telah diukur pencapaiannya telah sesuai dengan target dan sebagian lainnya tidak tercapai. Evaluasi kinerja organisasi pada periode ini dilakukan melalui realisasi anggaran, pencapaian sasaran dan permasalahan yang muncul. Hal ini untuk mengetahui ketercapaian Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagai bahan analisis capaian kinerja disajikan data sebagai berikut:

Tabel 4: Data Pokok Peserta Didik

No	Jenis Data	Satuan	Jumlah		
			2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	Orang	27.234.500	27.574.800	27.843.400
2	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	Orang	13.332.200	13.425.000	13.440.400
3	Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun	Orang	13.251.300	13.276.000	13.305.400
4	Jumlah Peserta Didik SD/SDLB	Siswa	26.029.763	25.646.862	25.655.335
5	Jumlah Peserta Didik SMP/SMPLB	Siswa	9.951.121	10.172.008	10.454.340
6	Jumlah Peserta Didik SMA/SMK/SMLB	Siswa	9.411.343	9.355.951	10.098.940
7	Jumlah Peserta Didik SD/SDLB Usia 7-12 Tahun	Siswa	22.576.047	22.306.959	22.550.130
8	Jumlah Peserta Didik SMP/SMPLB 13-15 Tahun	Siswa	8.158.675	7.591.660	7.801.308
9	Jumlah Lulusan SD/SDLB	Siswa	4.184.273	4.381.997	4.404.509
10	Jumlah Lulusan SMP/SMPLB	Siswa	3.131.085	3.464.628	3.281.121
11	Jumlah Lulusan SMA/SMK/SMLB	Siswa	2.542.518	2.853.477	2.548.389
12	Jumlah SD/SDLB	Sekolah	148.353	148.387	149.573
13	Jumlah SMP/SMPLB	Sekolah	37.589	37.608	37.763
14	Jumlah SMA/SMLB	Sekolah	12.973	13.459	13.144
15	Jumlah SMK	Sekolah	11.611	12.272	13.236

Adapun pencapaian masing-masing kinerja IKP pada tahun 2017 dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:



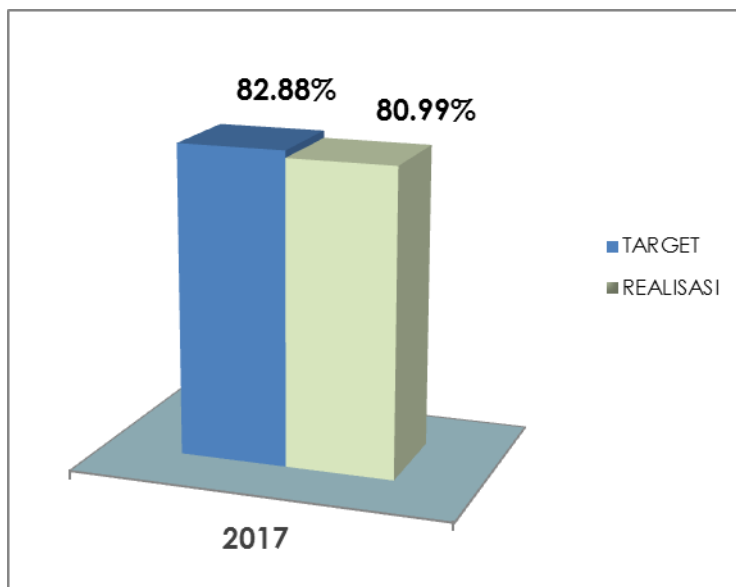
1. Pemenuhan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas.

Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dapat berhasil jika indikator yang terkait dengan penambahan akses untuk pendidikan yang bermutu dapat dipenuhi. Indikator tersebut berupa peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB, APM SMP/SMPLB maupun APK SMP/SMPLB. Untuk mendapatkan capaian yang optimal dilakukan pula upaya yang dapat menjamin keberlangsungan peserta didik agar tidak putus sekolah (*drop out*). Pencapaian kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana berikut dibawah ini:

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 1: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB (target 82,88%)

Target kinerja APM SD/SDLB sebesar 82,88% terealisasi 80,99%, dengan demikian target kinerja IKP APM SD/SDLB tidak tercapai.

Bagan 4: Grafik APM SD/SDLB Tahun 2017



Hal ini disebabkan oleh antara lain, peningkatan jumlah penduduk usia 7 s.d 12 tahun yang mencapai 27.843.400 orang. Pertumbuhan jumlah penduduk usia tersebut sebesar 0,97% yaitu sebanyak 268.600 orang. Untuk menampung jumlah tersebut diperlukan ruang kelas baru 8.394 ruang. Sementara itu intervensi yang dilakukan melalui pembangunan ruang kelas

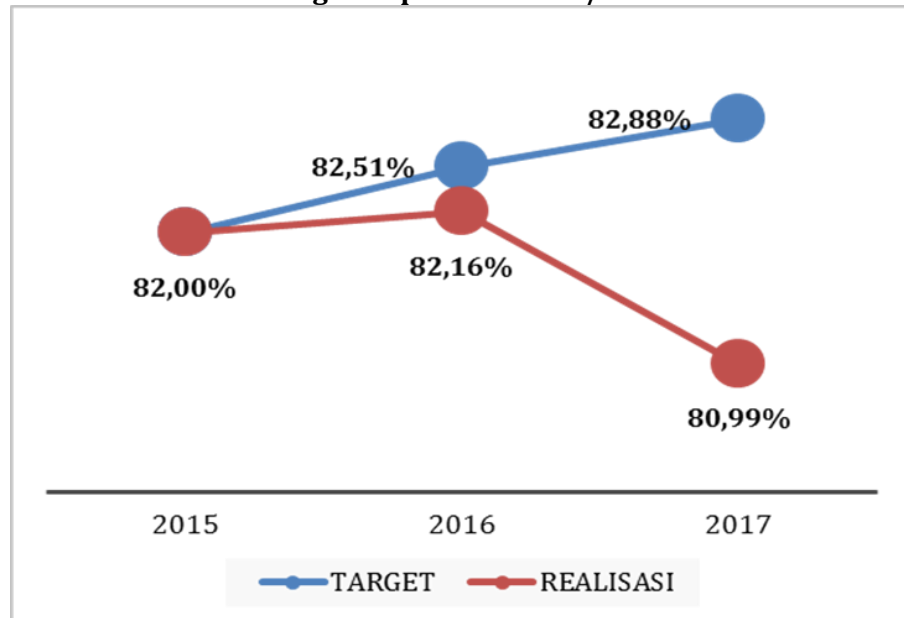


baru dan unit sekolah baru SD hanya dapat menampung sebanyak 8.512 orang atau sekitar 3,17 %. Melalui DAK fisik telah dibangun 2.021 ruang kelas baru, dengan daya tampung 64.672 siswa atau sekitar 24%. Dengan demikian seluruh

peningkatan akses pendidikan SD mencapai 27,17 %. Kesenjangan daya tampung yang adalah 72,83%.



Bagan 5: Grafik Perkembangan Capaian APM SD/SDLB Tahun 2015 - 2017



Permasalahan peningkatan daya tampung anak usia 7 – 12 tahun tersebut adalah berupa keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan ruang kelas jenjang SD.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu mobilisasi sumber daya melalui pemerintah setempat dalam meningkatkan daya tampung penduduk usia tersebut di daerah masing-masing. Selain itu perlu dilakukan



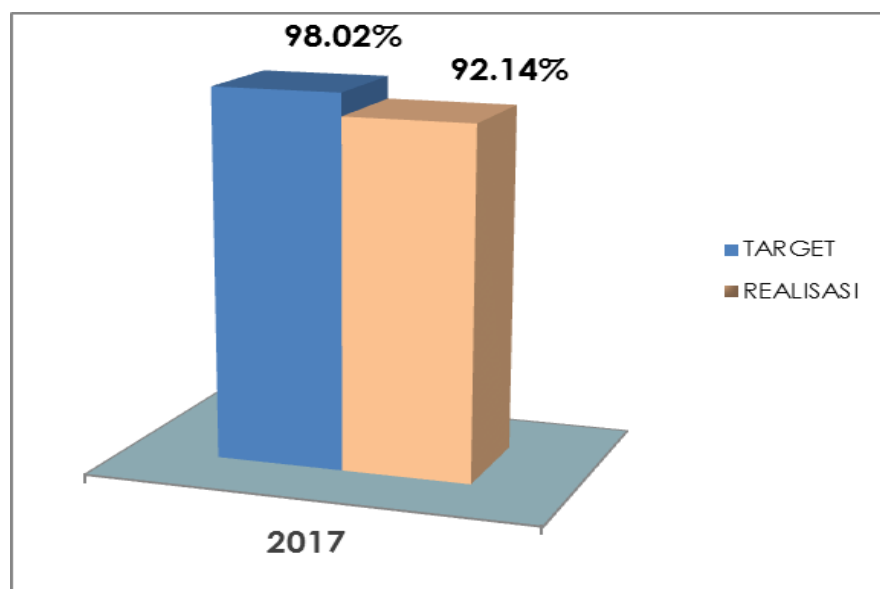
pemetaan kebutuhan ruang kelas pada masing masing daerah sesuai dengan tingkat pertumbuhan penduduk setempat.

Kurangnya akses pada sekolah di daerah terpencil dan faktor ekonomi pada daerah tertinggal turut pula menjadi penyebab terhambatnya pencapaian APM SD/SDLB. Namun demikian pada tahun 2017 jumlah wilayah dengan APM di bawah 60% sudah tidak ada lagi.

b. Indikator Kinerja Program (IKP) 2: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB (target 98,02%)

Target kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB sebesar 98,02% terealisasi 92,14%, dengan demikian target kinerja IKP Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB tidak tercapai.

Bagan 6: Grafik APK SD/SDLB Tahun 2017



Hal ini disebabkan oleh antara lain, peningkatan jumlah penduduk usia 7 s.d 12 tahun yang mencapai 27.843.400 orang. Pertumbuhan jumlah penduduk usia tersebut mencapai 268.600 orang. Untuk menampung jumlah tersebut diperlukan ruang kelas baru 8.394 ruang. Sementara itu intervensi yang dilakukan melalui pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru SD hanya dapat menampung sebanyak 8.512 orang atau sekitar 3,17 %. Melalui DAK fisik telah dibangun 2.021 ruang kelas baru, dengan daya

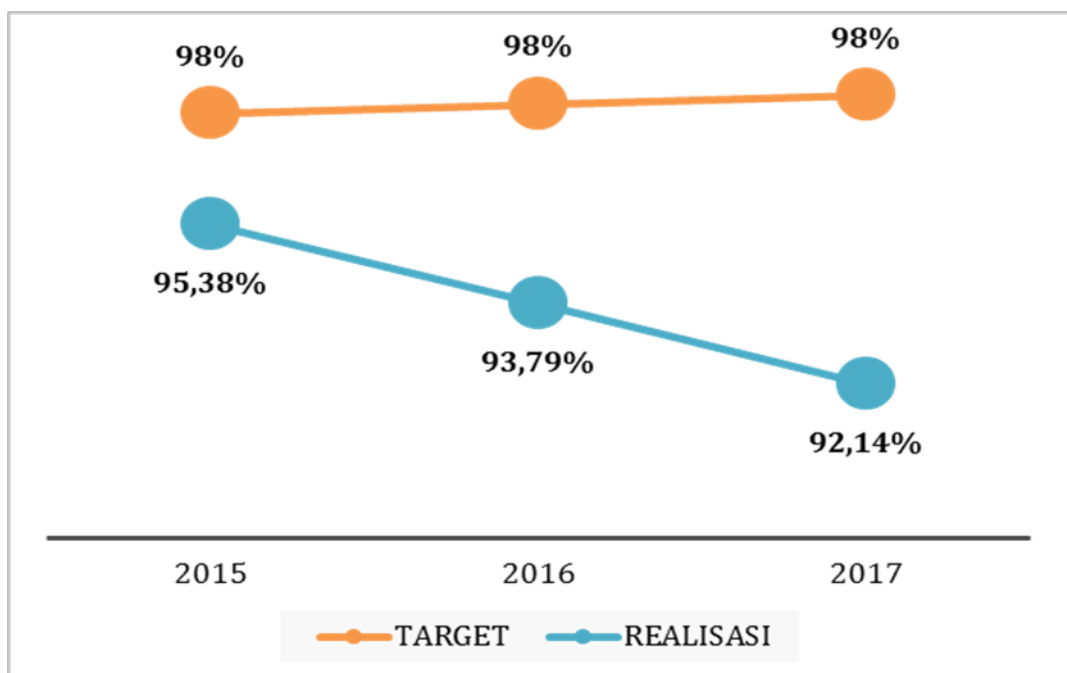




tampung 64.672 siswa atau sekitar 24%. Dengan demikian seluruh peningkatan akses pendidikan SD mencapai 27,17 %. Kesenjangan daya

tampung yang dibutuhkan adalah 72,83%.

Permasalahan APM maupun APK adalah berkaitan dengan belum terpenuhi sarana daya tampung sehingga akses pendidikan tidak tercapai, yang disebabkan keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas jenjang SD dan kondisi sosial budaya masyarakat pada daerah-daerah tertentu yang belum memiliki kesadaran tentang arti penting Pendidikan dan juga masalah geografi. Daerah tertinggal dan terpencil terutama di daerah kepulauan akses untuk memperoleh pendidikan harus menempuh jarak yang cukup jauh.



Bagan 7: Grafik Perkembangan Capaian APK SD/SDLB Tahun 2015 - 2017



Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu mobilisasi sumber daya melalui pemerintah setempat dalam meningkatkan daya tampung sekolah dasar tersebut di daerah masing-masing. Selain itu perlu dilakukan pemetaan kebutuhan ruang kelas pada masing masing daerah sesuai dengan tingkat pertumbuhan penduduk setempat.

Pada tahun 2017 terdapat 2 kabupaten kondisi capaian APK berada dibawah 75%, yaitu :

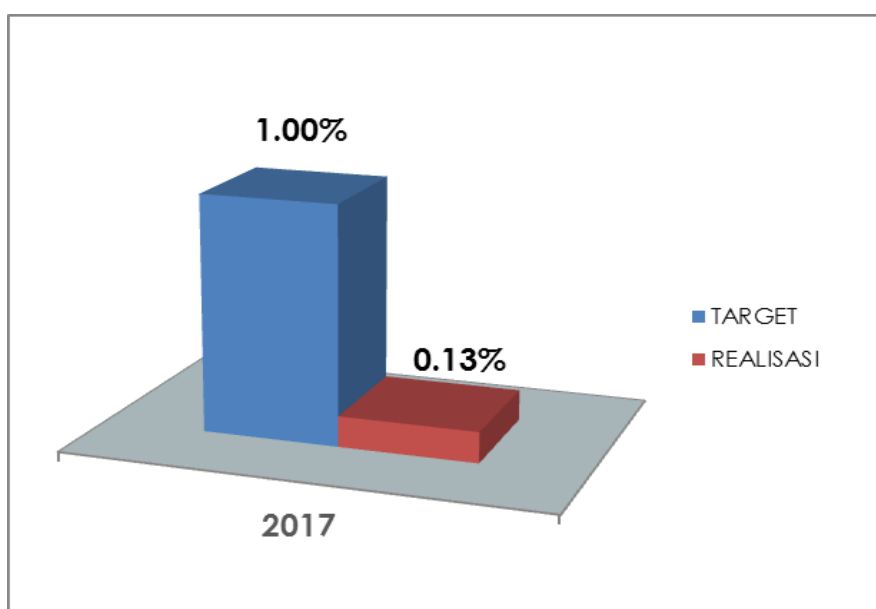
Tabel 5: APK SD/SDLB,dibawah 75% Tahun 2016/2017

No	Provinsi	Kab/Kota	APK
1	Kalimantan Barat	Kayong Utara	74.48
2	Sulawesi Tenggara	Kolaka Timur	73.39

c. Indikator Kinerja Program (IKP) 3: Angka Putus Sekolah (APtS) SD/SDLB (target 1.00%)

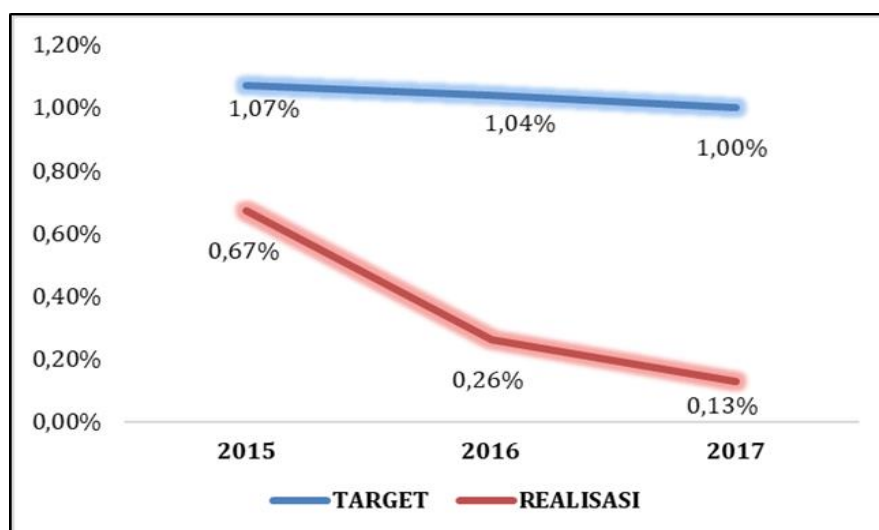
Pada tahun 2017 jumlah anak putus sekolah SD/SDLB adalah sebesar 33.239 siswa. Angka tersebut menunjukkan penurunan jumlah siswa yang putus sekolah sebesar 0,13% dari target 1,00%.

Bagan 8: Grafik Angka Anak Putus Sekolah SD/SDLB Tahun 2017



Angka putus sekolah ini ditekan serendah mungkin agar tidak melampaui angka 1,00%. Dengan demikian pencapaian kinerja IKP ini adalah 769,23%.

Bagan 9 : Grafik Perkembangan Capaian Angka Putus Sekolah SD/ SDLB Tahun 2015 - 2017



Faktor-faktor keberhasilan penurunan angka putus sekolah SD/SDLB antara lain berupa penyaluran bantuan PIP dan dana BOS. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka realisasi tahun 2017 melampaui capaian kinerja 2016. Keberhasilan Pencapaian Indikator Program (IKP) tersebut diatas didukung oleh pencapaian kinerja output dibawah ini:

Tabel 6: Output Pendukung Pencapaian APK/APM SD/SDLB dan Angka Putus Sekolah

No	Output/ Kegiatan	Satuan	2016	2017		% Capaian
				Target	Realisasi	
1	Unit Sekolah Baru (USB) SD	unit	24	10	11	100,00
2	Unit Sekolah Baru (USB) SLB	unit	33	11	8	72,72
3	Ruang Kelas Baru (RKB) SD	ruang	1.141	200	200	100,00
4	Ruang Belajar SD yang Direhabilitasi	ruang	4.841	14.518	16.002	110,20

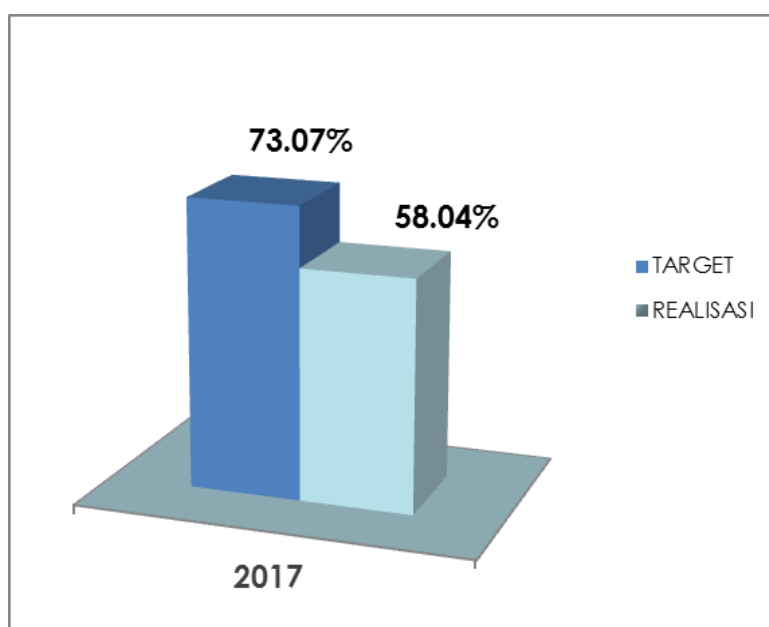


No	Output/ Kegiatan	Satuan	2016	2017		% Capaian
				Target	Realisasi	
5	Ruang Kelas Baru (RKB) SLB	ruang	212	125	126	100,80
6	Ruang Belajar yang Direhabilitasi (SLB)	ruang	275	504	504	100
7	SD yang Direnovasi	Sekolah	129	84	101	120,24
8	SLB yang direnovasi	Sekolah	8	11	11	100
9	Asrama SLB yang dibangun	unit	2	3	3	100
10	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	siswa	25.468.885	26.323.936	26.323.936	100
11	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PKLK	siswa	2.412	2363	2054	86,92
12	Program Indonesia Pintar (PIP) SD	siswa	10.906.947	10.360.614	10.362.746	100,02

d. Indikator Kinerja Program (IKP) 4: Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB (target 73,07%)

Target kinerja APM SMP/SMPLB sebesar 73,07 % terealisasi 58,04 %, dengan demikian target kinerja IKP APM SMP/SMPLB tidak tercapai.

Bagan 10: Grafik APM SMP/SMPLB Tahun 2017



Jika dilihat dari peningkatan jumlah penduduk usia sekolah 13 s.d 15 tahun yang mencapai 13.440.400 orang, maka artinya pertumbuhan jumlah penduduk usia tersebut sekitar 15.400 orang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan ruang kelas baru yang dapat menampung jumlah pertambahan



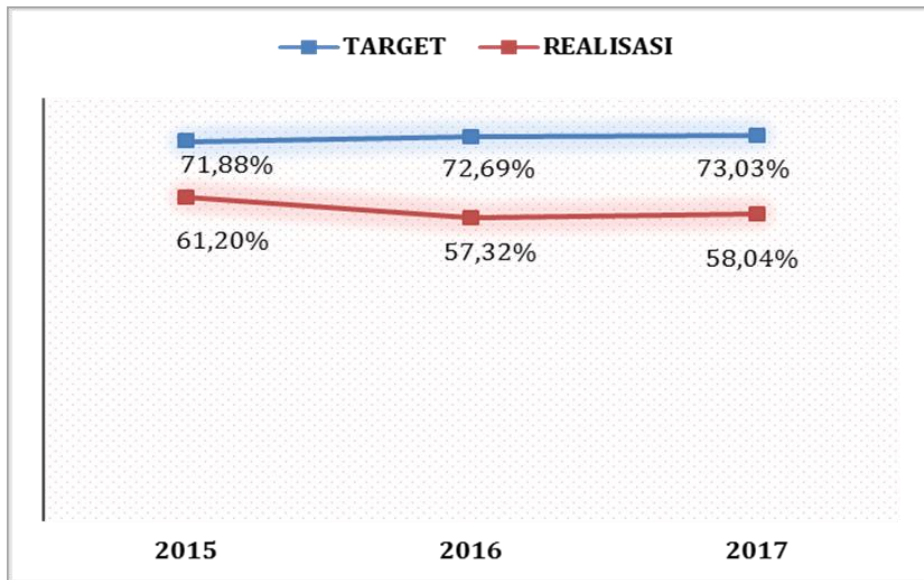
penduduk. Ketersediaan daya tampung dipenuhi melalui pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru SMP yang dapat menampung sebanyak 16.200 orang dan melalui DAK fisik telah dibangun 1.535 ruang kelas baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya tampung SMP lebih banyak pada anak diluar usia 13 – 15 tahun.

Permasalahan daya tampung pada SMP mungkin disebabkan oleh jumlah siswa SMP yang belum berusia 13 tahun atau anak usia di atas 15 tahun namun masih menempuh pendidikan jenjang SMP. Pada beberapa daerah masih ada tradisi menikah usia dini sehingga banyak anak lulusan SD yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP atau *drop out*.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya edukasi kepada masyarakat yang melibatkan instansi lokal atau pemerintah daerah, untuk mengubah tradisi tersebut.



Bagan 11: Grafik Perkembangan APM SMP/SMPLB Tahun 2015 - 2017

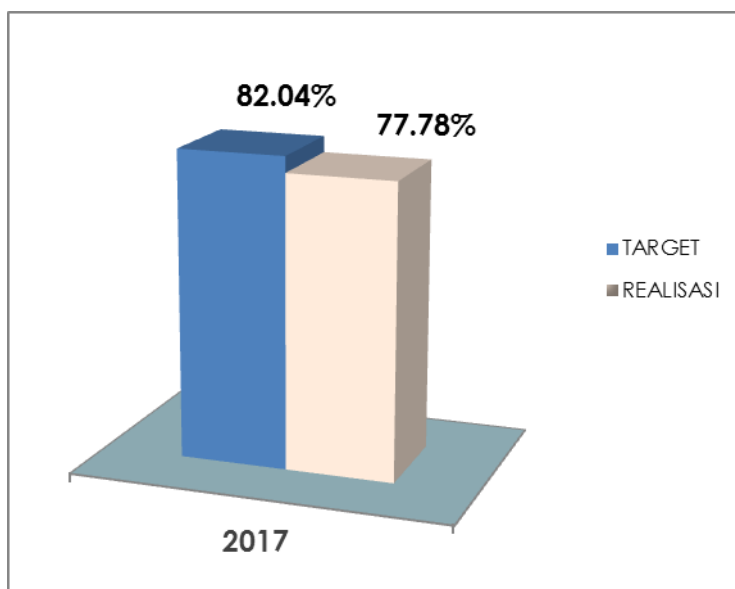


Jika melihat perbandingan dari tahun 2015 dan 2017, terjadi penurunan dengan margin sekitar 4,00%, pada tahun 2019 dimungkinkan terjadinya kenaikan atau penurunan dengan margin 5,00% .

e. Indikator Kinerja Program (IKP) 5: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB (target 82,04%)

Target kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB sebesar 82,04% terealisasi 77,78%, dengan demikian target kinerja IKP Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB tidak tercapai.

Bagan 12: Grafik APK SMP/SMPLB Tahun 2017



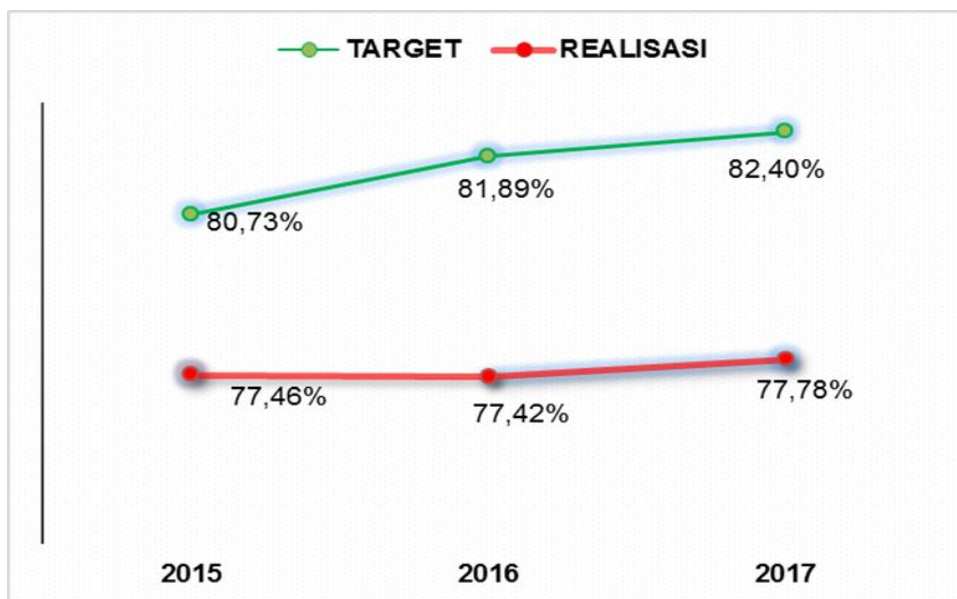
Permasalahan daya tampung pada SMP kemungkinan disebabkan oleh adanya siswa SMP yang belum memasuki usia 13 tahun atau diatas 15 tahun namun masih menempuh pendidikan jenjang SMP. Serta pada beberapa daerah masih ada tradisi menikah usia dini sehingga banyak anak lulusan SD



yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP atau putus sekolah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya edukasi kepada masyarakat yang melibatkan instansi lokal atau pemerintah daerah, untuk merubah tradisi tersebut.

Bagan 13: Grafik Perkembangan APK SMP/SMPLB Tahun 2015 - 2017



Jika melihat perbandingan dari tahun 2016 dan 2017, terjadi kenaikan sebesar 2,01%. Hal ini disebabkan masih banyaknya siswa SMP yang yang

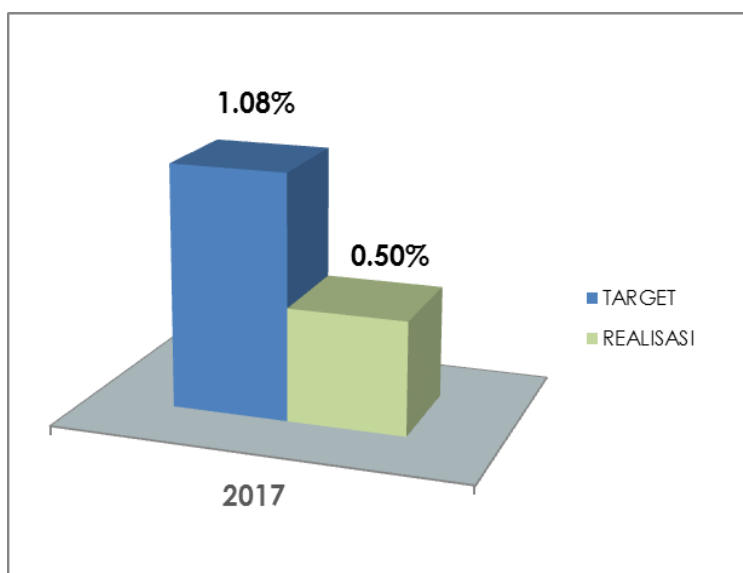


berusia dibawah 13 tahun atau diatas 15 tahun.Upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Kemdikbud adalah menghimbau kepada pemerintah daerah untuk mengatur proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai dengan usia sekolah.

f. Indikator Kinerja Program (IKP) 6: Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB (target 1,08%)

Target kinerja Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB sebesar 1,08% terealisasi 0,50%, dengan demikian target kinerja IKP tercapai.

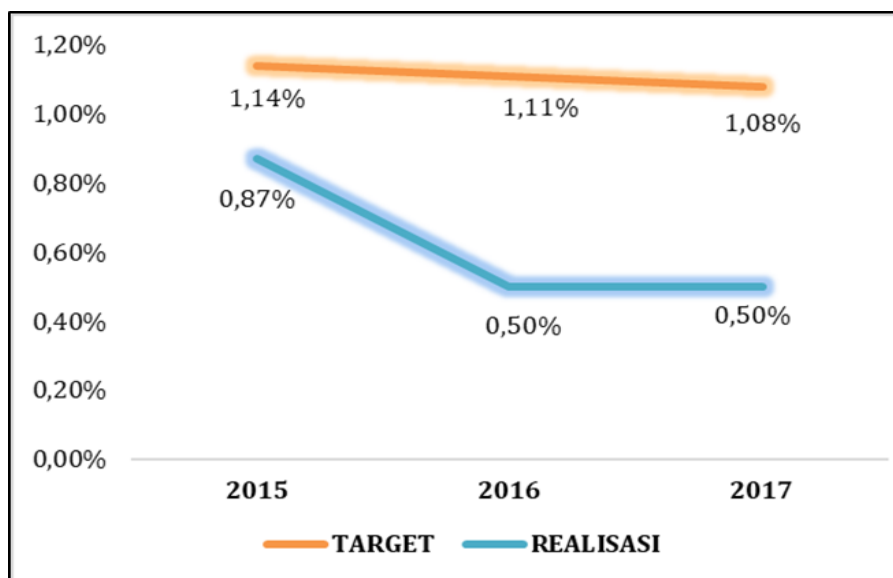
Bagan 14: Grafik Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB Tahun 2017



Pencapaian kinerja ini didukung oleh gencarnya upaya pemerintah dalam penyaluran dana BOS dan PIP. Kedua program tersebut dapat menekan angka putus sekolah pada jenjang SMP/SMPLB. Jumlah peserta didik SMP/SMPLB pada Januari 2017 adalah sebanyak 10.145.416 siswa. Pada akhir Desember 2017 jumlah peserta didik menjadi 10.106.863 siswa. Dengan demikian terjadi putus sekolah sebanyak 38.553 siswa. Putus sekolah pada peserta didik SMP/SMPLB disebabkan oleh antara lain kondisi ekonomi keluarga yang menyebabkan anak-anak tersebut membantu orang tua mencari nafkah, juga pada daerah-daerah tertentu, akses ke sekolah yang cukup sulit sehingga membutuhkan tenaga dan biaya, maupun ada sekolah-sekolah yang tutup atau merger dan belum ada sekolah lain yang dekat di area tersebut.



Bagan 15: Grafik Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB Tahun 2015- 2017

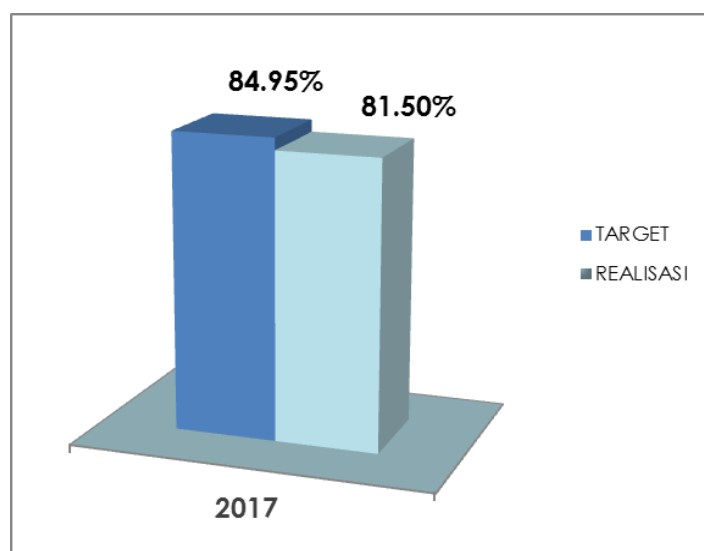


Bila dilihat persentase dari tahun ke tahun maka diperkirakan s.d tahun 2019, angka putus sekolah di jenjang SMP akan tetap dibawah 1,00%.

g. Indikator Kinerja Program (IKP) 7: Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/SMPLB (target 84,95%)

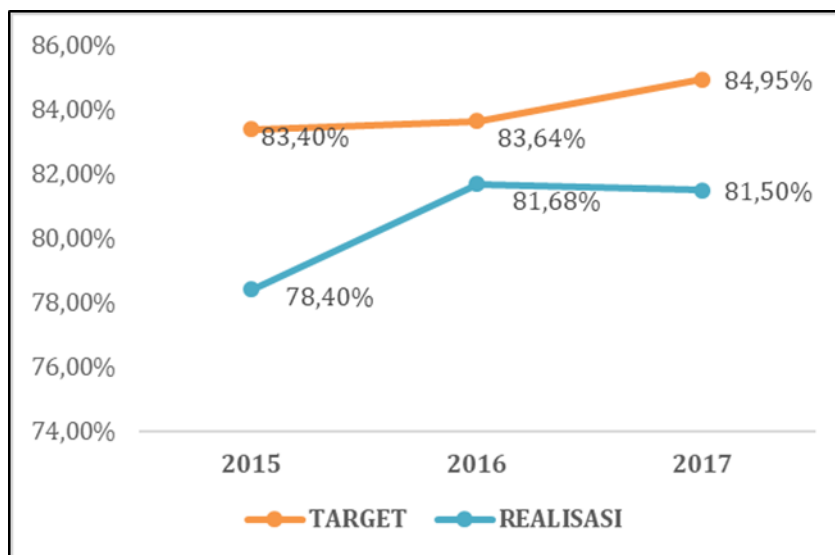
Target kinerja Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/SMPLB 84,95% terealisasi 81,50%, dengan demikian target kinerja IKP Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/SMPLB tidak tercapai.

Bagan 16: Grafik Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/SMPLB Tahun 2017



Hal ini disebabkan di beberapa daerah masih ada tradisi menikah usia dini sehingga banyak anak lulusan SD yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP atau putus sekolah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya edukasi kepada masyarakat yang melibatkan instansi lokal atau pemerintah daerah, untuk merubah tradisi tersebut.

Bagan 17: Grafik Perkembangan Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/SMPLB Tahun 2015 - 2017



Jika melihat perbandingan dari tahun 2016 dan 2017, terjadi penurunan sebesar 0,18%.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan angka melanjutkan ini adalah antara lain adalah faktor ekonomi keluarga penduduk usia sekolah tersebut, dimana masih terdapat kemiskinan terutama di daerah-daerah terpencil maupun tertinggal, juga faktor keterbatasan akses sekolah, dimana keberadaan sekolah yang belum merata untuk seluruh Indonesia.

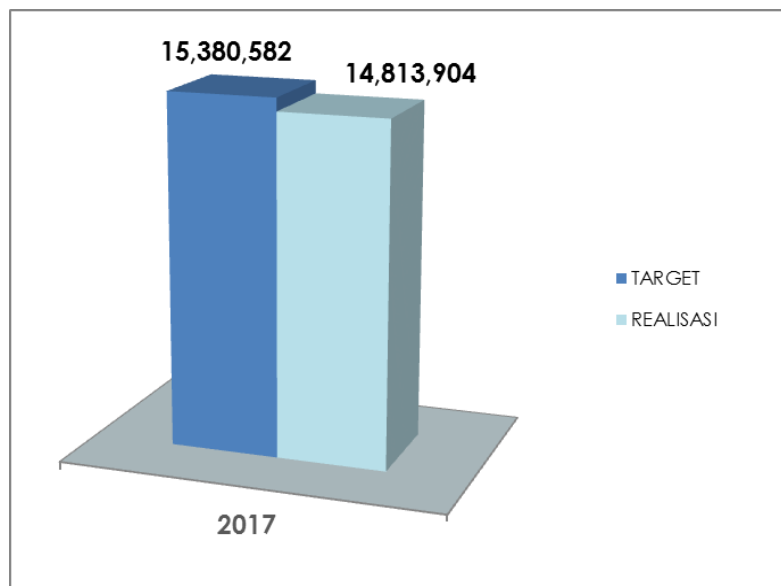
Untuk mengatasi hal tersebut diantaranya pelaksanaan program PIP, beasiswa siswa berprestasi, untuk mengatasi ketidakmampuan secara ekonomi. Pembangunan USB, renovasi sekolah, rehabilitasi RKB untuk penambahan akses sekolah.



h. Indikator Kinerja Program (IKP) 8: Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Penerima Bantuan Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) (target 15.380.582 Siswa).

Target kinerja Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Penerima Bantuan Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) 15.380.582 Siswa terealisasi 14.813.904 atau 96,32%, dengan demikian target kinerja IKP Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Penerima Bantuan Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak tercapai.

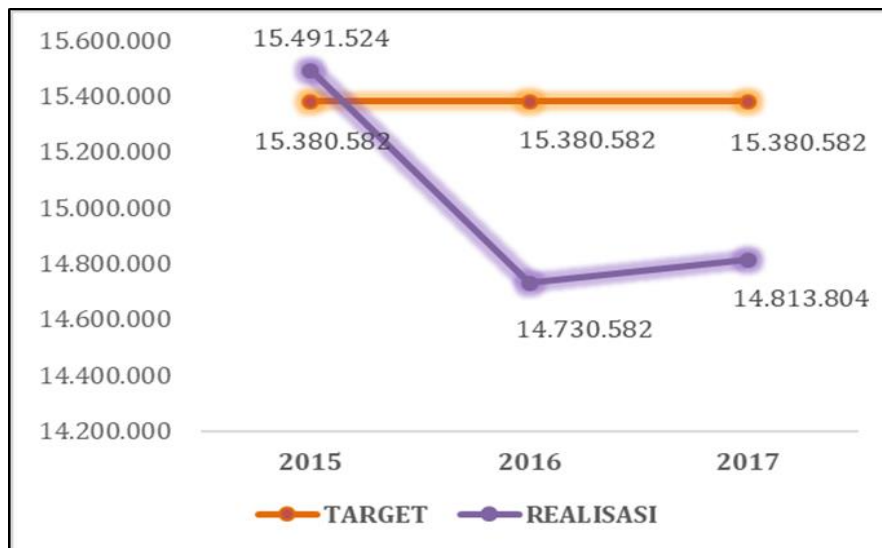
Bagan 18: Grafik Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Penerima Bantuan Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Tahun 2017



Hal ini disebabkan adanya validasi data awal penerima KIP yang berasal dari Kementerian Sosial, sehingga data penerima PIP untuk menghindari terjadinya salah sasaran dan penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.



**Bagan 19: Grafik Perkembangan Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar
Penerima Bantuan Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Tahun
2015- 2017**

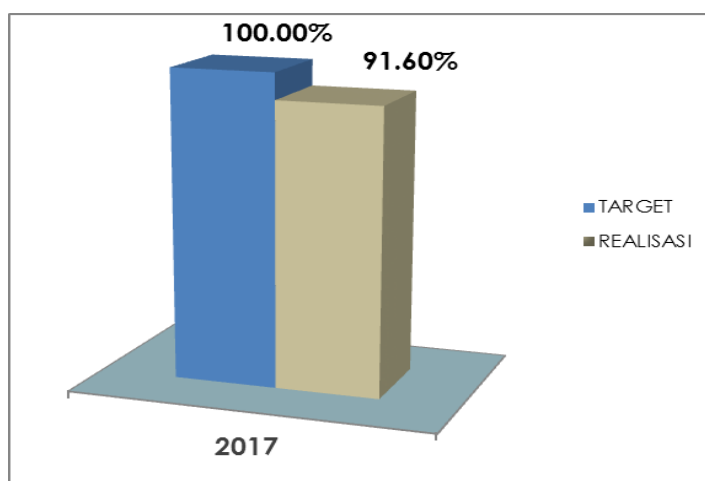


Jika melihat perbandingan dari tahun 2016 dan 2017, terjadi penurunan jumlah sebesar 890.116 siswa atau 0,56%. Hal ini disebabkan masih banyak data calon penerima PIP dari Kemensos yang tidak sesuai dengan data Dapodik. Perlu adanya sinkronisasi data yang lebih baik antara kemensos dan data Dapodik.

i. Indikator Kinerja Program (IKP) 9: Rasio APM perempuan: APM laki-laki di SD (target 100%)

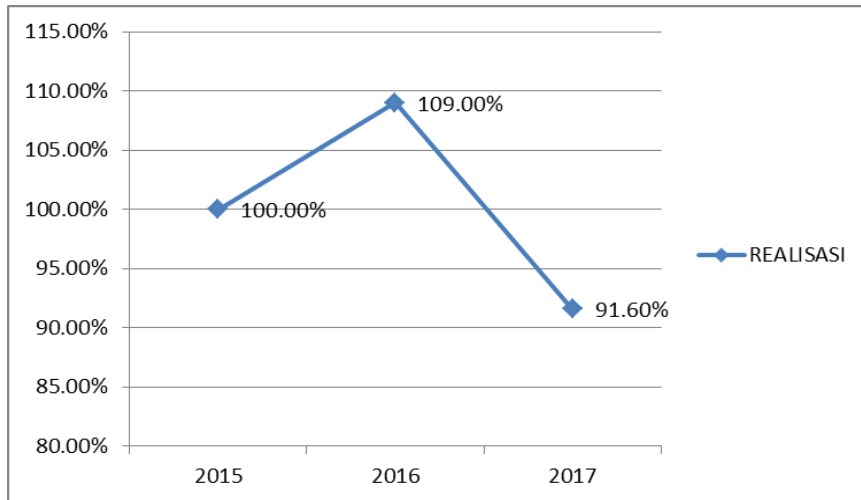
Target kinerja Rasio APM perempuan: APM laki-laki di SD sebesar 100%, terealisasi 91,60% dengan demikian target IKP tidak tercapai.

Bagan 20: Grafik Rasio APM perempuan: APM laki-laki di SD Tahun 2017



Berdasarkan data PDSP Kemdikbud, jumlah siswa laki-laki 13.370.068, sementara siswa perempuan 12.248.010. Hal ini menunjukkan partisipasi pendidikan SD pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Bagan 21: Grafik Perkembangan Rasio APM perempuan: APM laki-laki di SD Tahun 2015 - 2017

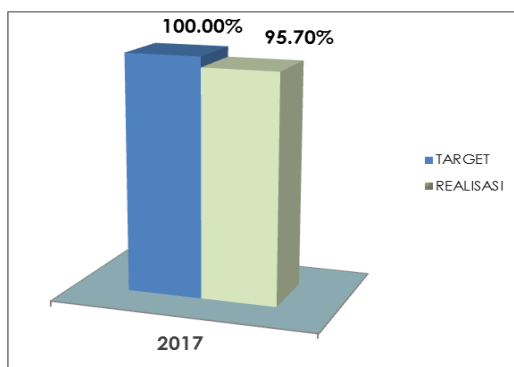


Bila dilihat dari persentase perkembangan tiga tahun terakhir 2015 s.d 2017, terlihat kenaikan kemudian penurunan, dimana terjadi pergeseran dengan margin sebesar 17%. Margin ini lebih menunjukkan perbandingan jumlah penduduk usia tersebut, pada tahun tertentu jumlah laki-laki lebih besar dari perempuan maupun sebaliknya.

j. Indikator Kinerja Program (IKP) 10: Rasio APM perempuan: APM laki-laki di SMP (target 100%)

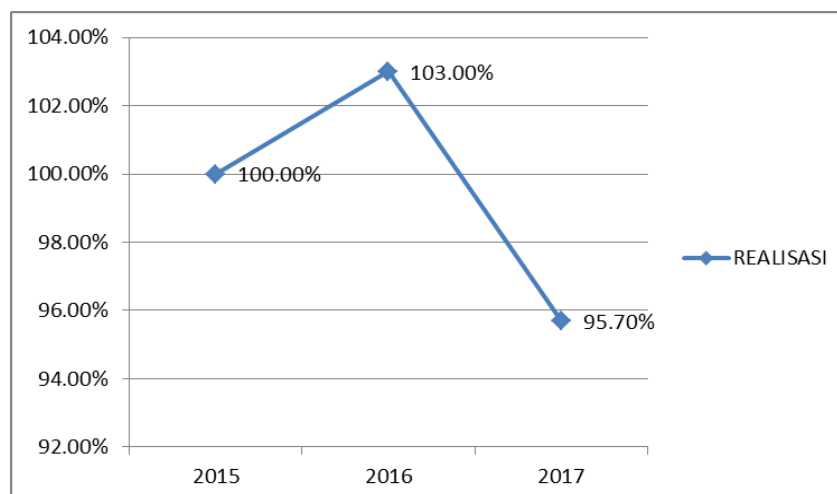
Target kinerja Rasio APM perempuan: APM laki-laki di SMP sebesar 100%, terealisasi 95,70% dengan demikian target IKP tidak tercapai.

Bagan 22: Grafik Rasio APM perempuan: APM laki-laki di SMP Tahun 2017



Berdasarkan data PDSP Kemdikbud, jumlah siswa laki-laki 5.183.356, sementara siswa perempuan 4.962.060. Hal ini menunjukkan partisipasi pendidikan SMP pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Bagan 23: Grafik Perkembangan Rasio APM perempuan:APM laki-laki di SMP Tahun 2015 - 2017



Bila dilihat dari persentase tiga tahun terakhir 2015 s.d 2017, terjadi kenaikan kemudian penurunan, dimana terjadi pergeseran dengan margin sebesar 7%. Margin ini lebih menunjukkan perbandingan jumlah penduduk usia sekolah tersebut, pada tahun tertentu jumlah laki-laki lebih besar dari perempuan maupun sebaliknya.

2. Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB

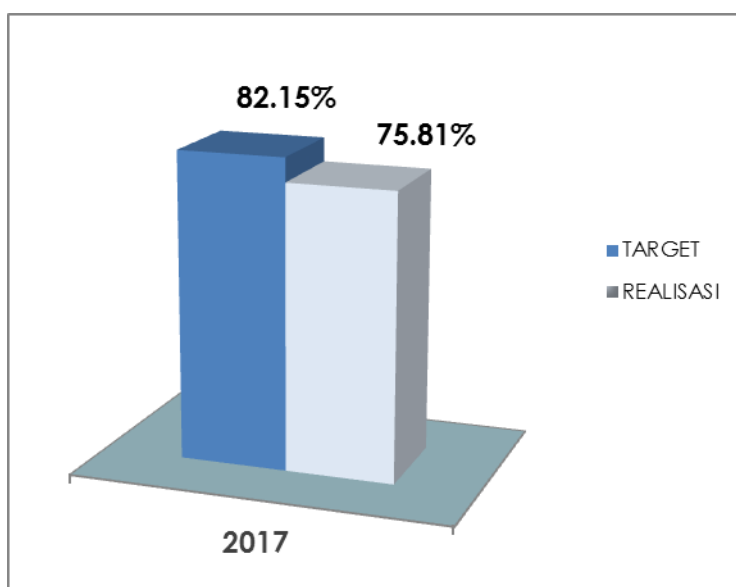
Partisipasi siswa pada Pendidikan SMA/SMK/SMLB didukung atau dianalisis dari 3 IKP yaitu IKP 11, IKP 12 dan IKP 13.

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 11: APK SMA/SMK/SMLB (target 82,15%)

Target kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SMA/SMK/SMLB sebesar 82,15%, terealisasi 75,81%, dengan demikian target kinerja IKP Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SMA/SMK/SMLB tidak tercapai.



Bagan 24: Grafik APK SMA/SMK/SMLB Tahun 2017



Hal ini disebabkan oleh antara lain, peningkatan jumlah penduduk usia 16 s.d 18 tahun yang mencapai 742.989 orang. Untuk menampung jumlah tersebut diperlukan ruang kelas baru 20.639 ruang. Sementara itu intervensi yang dilakukan melalui pembangunan ruang kelas baru sebanyak 2.024 ruang dan 131 unit sekolah baru SMA/SMK/SMLB yang dapat menampung sebanyak 84.852 orang atau sekitar 11,42%.

Terdapat 15 kabupaten/kota dengan APK SMA/SMK/SMLB di bawah 50%. Sebanyak 14 kabupaten tersebut berada di Provinsi Papua. Berikut kabupaten/kota dengan APK SMA/SMK/SMLB dibawah 50%.

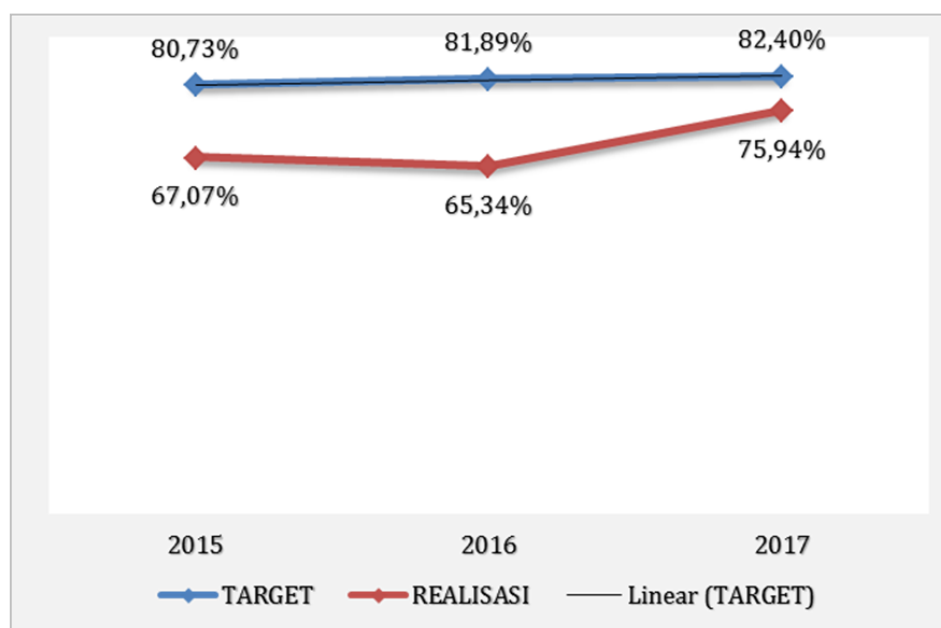
Tabel 7: APK SMA/SMK/SMLB < 50% Tahun 2017/2018

No	Provinsi	Kab/Kota	Nilai APK
1	Papua	Kab. Intan Jaya	11,93
2	Papua	Kab. Dogiyai	13,71
3	Papua	Kab. Yahukimo	15,94
4	Papua	Kab. Lanny Jaya	18,95
5	Papua	Kab. Pegunungan Bintang	22,10
6	Papua	Kab. Tolikara	24,42
7	Papua	Kab. Asmat	24,86
8	Papua	Kab. Yalimo	31,62
9	Papua	Kab. Puncak	32,43
10	Papua	Kab. Puncak Jaya	34,98
11	Papua	Kab. Paniai	41,75
12	Papua	Kab. Mappi	42,09
13	Papua	Kab. Deiyai	43,41



No	Provinsi	Kab/Kota	Nilai APK
14	Papua	Kab. Nduga	48,68
15	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	49,42

Bagan 25: Grafik Perkembangan APK SMA/SMK/SMLB Tahun 2015 - 2017



Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain dengan menambah akses sekolah tingkat SMA di daerah-daerah tertinggal terpencil melalui pembangunan RKB dan USB sesuai kebutuhan pertambahan penduduk usia pendidikan menengah, meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan hingga tingkat SMA/SMK kepada masyarakat melalui media-media informasi, dengan memberdayakan pemda setempat.

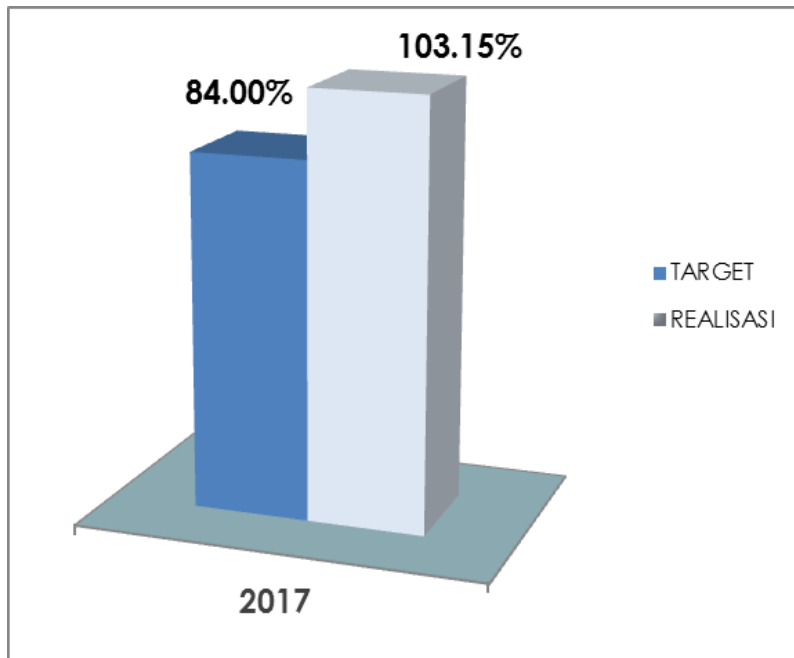
Bila melihat grafik APK dari tahun 2015 s.d 2017 maka besar kemungkinan akan terus naik hingga tahun 2019.

b. Indikator Kinerja Program (IKP) 12: Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK (target 84.00%)

Target kinerja Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK 84,00% terealisasi 103,15%, dengan demikian target kinerja IKP Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/SMPLB tercapai.

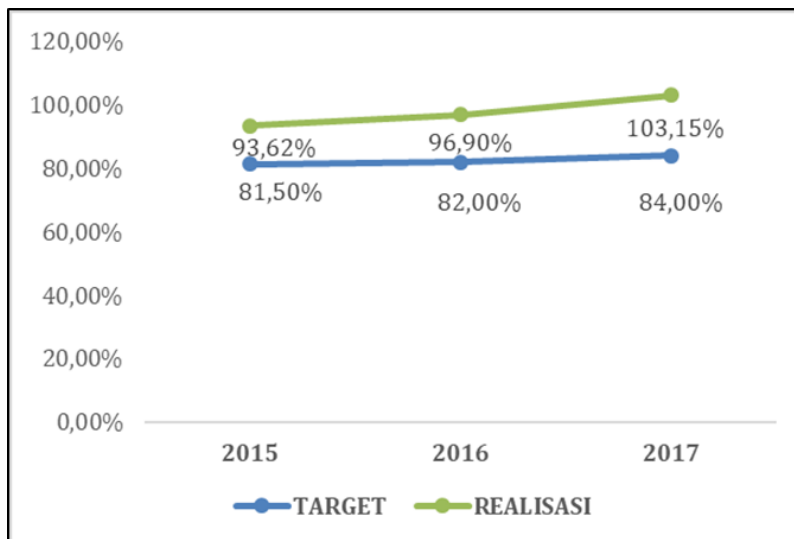


Bagan 26: Grafik Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK Tahun 2017



Ketercapaian ini dipengaruhi keberhasilan sosialisasi program wajib belajar 12 tahun yang sudah diterapkan di beberapa daerah.

Bagan 27: Grafik Perkembangan Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK Tahun 2015 - 2017



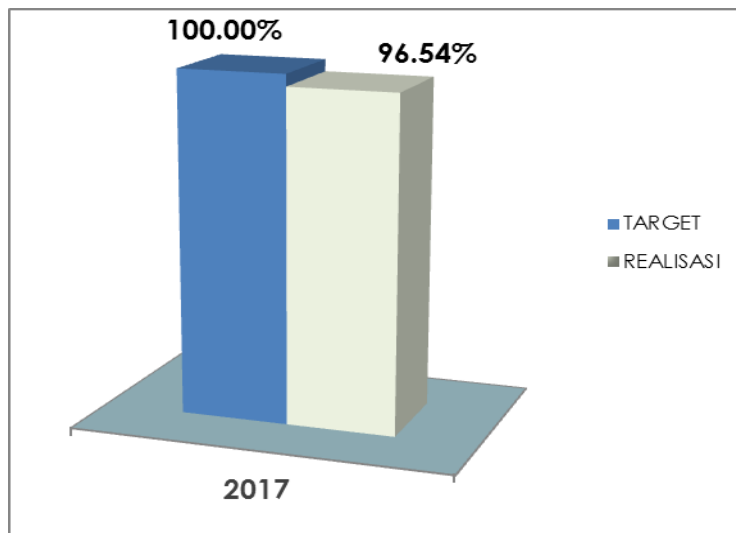
Melihat perkembangan persentase angka melanjutkan dari tahun 2015, maka kemungkinan akan terus naik s.d tahun 2019.



c. Indikator Kinerja Program (IKP) 13: Rasio APK perempuan : APK laki-laki di SMA/ SMK (target 100%)

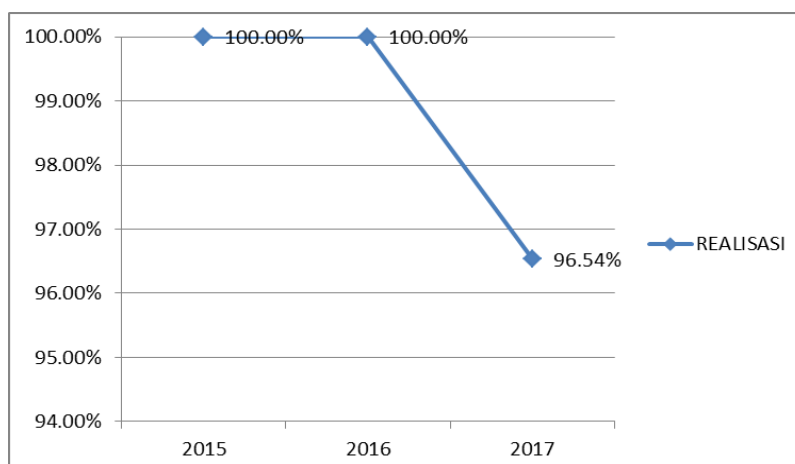
Target kinerja Rasio APM perempuan: APM laki-laki di SMA/SMK sebesar 100%, terealisasi 96,54% dengan demikian target IKP tidak tercapai. Berdasarkan data PDSP Kemdikbud, jumlah siswa laki-laki 4.747.880, sementara siswa perempuan 4.590.353.

Bagan 28: Grafik Rasio APK perempuan : APK laki-laki di SMA/ SMK Tahun 2017



Hal ini menunjukkan partisipasi pendidikan SMA/SMK pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Bagan 29: Grafik Perkembangan Rasio APK perempuan : APK laki-laki di SMA/ SMK Tahun 2015 - 2017



Bila dilihat dari persentase tiga tahun terakhir 2015 s.d 2017, terlihat terjadi penurunan, dimana terjadi pergeseran dengan margin sebesar kurang



lebih 3%. Margin ini lebih menunjukkan perbandingan jumlah penduduk usia sekolah tersebut, yang pada tahun tertentu jumlah laki-laki lebih besar dari perempuan maupun sebaliknya.

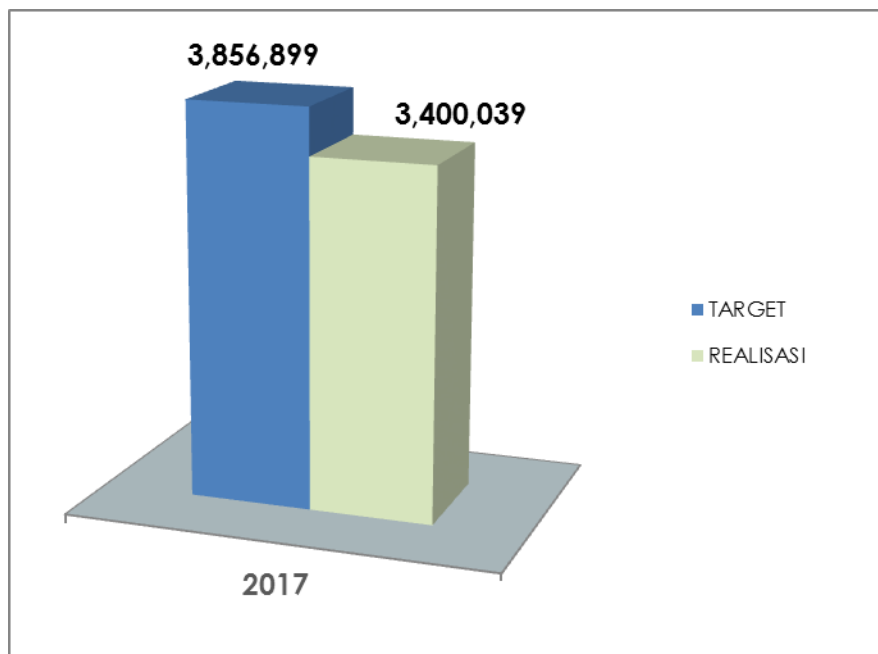
3. Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SMLB

Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SMLB terlihat atau dianalisis melalui 2 IKP, yaitu IKP 14 dan IKP 15

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 14: Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Menengah Penerima Bantuan Melalui KIP (target 3.856.899)

Target kinerja Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Menengah Penerima Bantuan Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) 3.856.899 Siswa, terealisasi 3.400.039 atau 88,15%, dengan demikian target kinerja IKP Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Menengah Penerima Bantuan Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak tercapai.

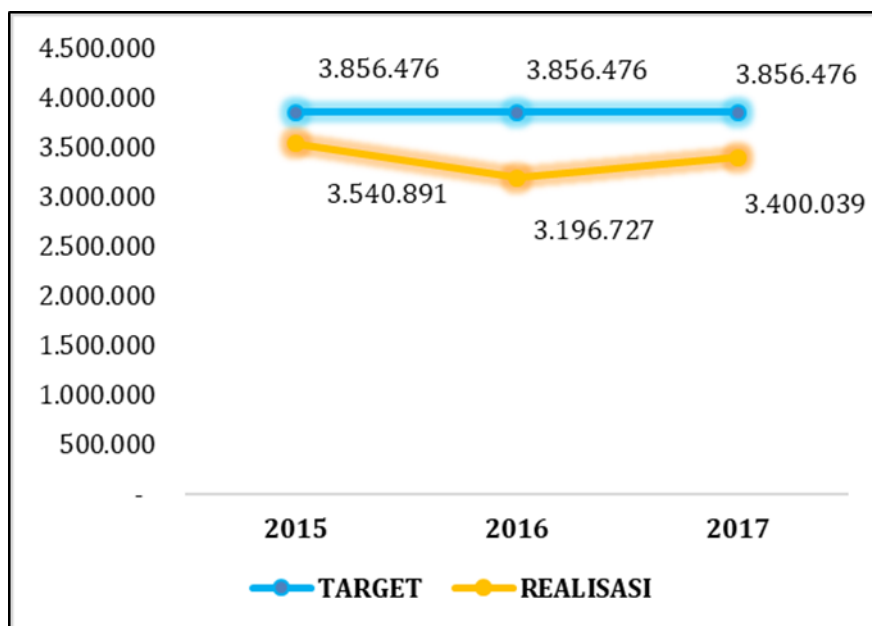
Bagan 30: Grafik Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Menengah Penerima Bantuan Melalui KIP Tahun 2017



Hal ini disebabkan data awal yang berasal dari Kementerian Sosial akurasiya divalidasi pada dapodik untuk menghindari terjadinya salah sasaran dan penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Bagan 31: Grafik Perkembangan Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Menengah Penerima Bantuan Melalui KIP Tahun 2015 - 2017

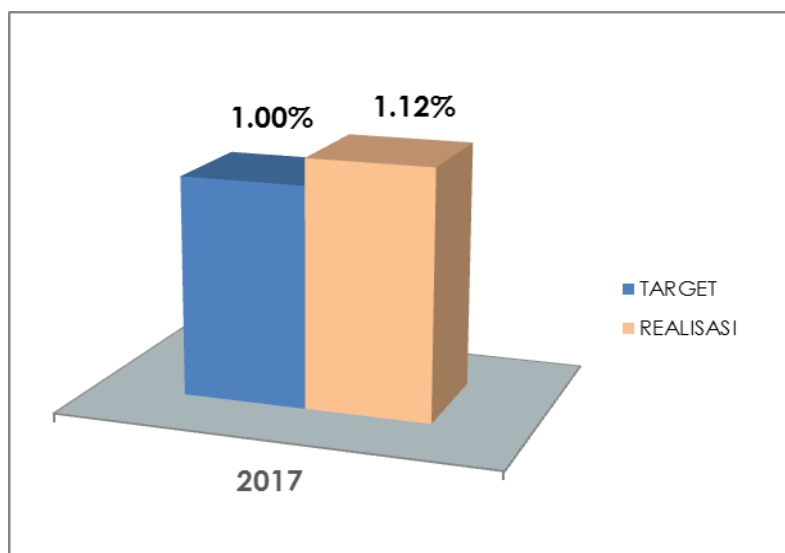


Jika dibanding realisasi tahun sebelumnya sebanyak 3.856.676 maka jumlah penerima manfaat PIP pendidikan menengah mengalami penurunan. Diperkirakan pada akhir 2019, jumlah penerima PIP tingkat SMA/SMK berada diantara 3.000.000 s.d 4.000.000 siswa.

b. Indikator Kinerja Program (IKP) 15: Angka Putus Sekolah SMA/SMK (target 1,00%)

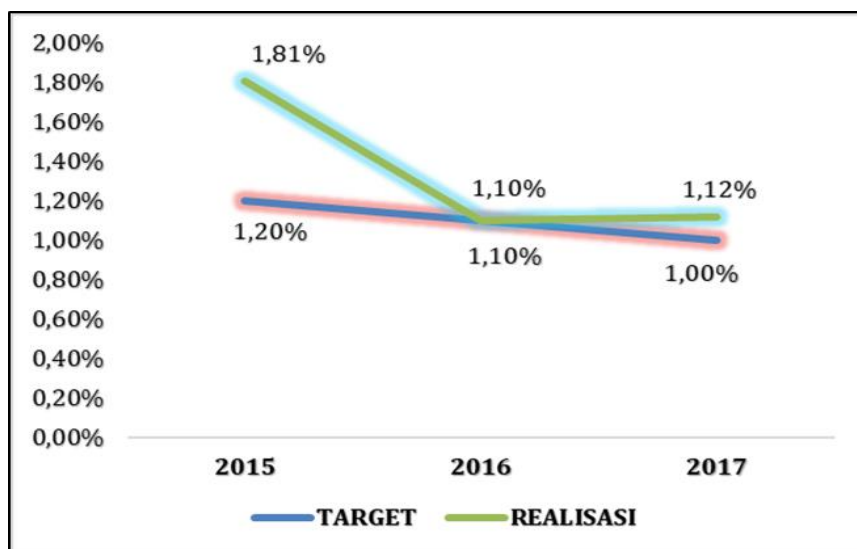
Target kinerja Angka Putus Sekolah SMA/SMK sebesar 1,00% terealisasi 1,12%, dengan demikian target kinerja IKP tidak tercapai.

Bagan 32: Grafik Angka Putus Sekolah SMA/SMK Tahun 2017



Jumlah peserta didik SMA/SMK/SMLB pada Januari 2017 adalah sebanyak 9.704.353 siswa. Pada akhir Desember 2017 jumlah peserta didik menjadi 9.599.842 siswa. Dengan demikian terjadi putus sekolah sebanyak 104.511 siswa. Putus sekolah pada peserta didik SMA/SMK/SMLB disebabkan oleh antara lain kondisi ekonomi keluarga yang memaksa mereka meninggalkan bangku sekolah untuk membantu orang tua mencari nafkah, juga pada daerah-daerah tertentu, akses ke sekolah yang cukup sulit sehingga membutuhkan tenaga dan biaya, maupun ada sekolah-sekolah yang tutup atau merger dan belum ada sekolah lain yang di dekat di area tersebut.

Bagan 33: Grafik Perkembangan Angka Putus Sekolah SMA/SMK Tahun 2015-2017



Upaya yang dilakukan untuk mencegah peserta didik putus sekolah antara lain dengan penyaluran dana BOS dan PIP, serta pembangunan unit sekolah baru. Jika melihat perbandingan dari tahun 2015 s.d 2017 maka diperkirakan angka putus sekolah berkisar antara 1,00% s.d 1,50%.



4. Sekolah Menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019

Indikator Kinerja Program (IKP) 16: Sekolah Menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019 (target 88,30%)

Kode	Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	2015	2016	2017		
			Realisasi		Target	Realisasi	%
SP -04	Sekolah Menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019						
IKP16	Persentase kecamatan yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah	%	84,74%	78,11%	88,30%	87,60%	99,20

Pada tahun 2017 wilayah Indonesia terdiri dari 514 kabupaten/kota dan 7.057 Kecamatan. Jumlah Satuan Pendidikan SMA/SMK sebanyak 25.826 sekolah yang tersebar di 6.404 Kecamatan. Jumlah kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK adalah sebanyak 653 kecamatan. Target IKP ini sebesar 88,30%, terealisasi 87,60%, sehingga IKP ini tidak tercapai sebesar 0,70%. Pendukung utama IKP adalah dilakukannya pembangunan USB di kecamatan. Permasalahan tidak tercapainya adalah seiring dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada masa peralihan tahun 2017 pembangunan fisik SMA/SMK ada yang tertunda. Selanjutnya pada tahun mendatang Pemerintah Provinsi perlu melakukan analisis kebutuhan, daya dukung ketersediaan siswa, dan melakukan pembangunan SMA/SMK, guna mencapai target IKP tersebut.

5. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Peningkatan kualitas pembelajaran terlihat atau dianalisis melalui 2 IKP yaitu IKP 17 dan 18

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 17: Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B (target 15.300)

Meningkatkan nilai akreditasi sekolah merupakan suatu prestasi yang ingin dicapai oleh sekolah, karena dengan nilai akreditasi menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat mempercayai bahwa sekolah tersebut mempunyai kualitas. Target IKP 17 adalah sebesar 15.300 sekolah,



teralisasi 13.754 (89,90%). Realisasi ini masih dibawah target yang ditetapkan. Ada kesenjangan sebanyak 11,10%.

Untuk mempersiapkan Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang berakreditasi minimal B dilakukan melalui berbagai intervensi yang meliputi:

- Pembangunan ruang kelas baru SD/SDLB 326 ruang/191sekolah ;
- Rehabilitasi ruang kelas SD/SDLB sebanyak 16.506 ruang/4.836 sekolah;
- Pembangunan perpustakaan SD/SDLB sebanyak 444 ruang/ 444 sekolah;
- Renovasi SD/SDLB sebanyak 112 sekolah
- Pengadaan peralatan pendidikan SD/SDLB sebanyak 4.891 paket/4.191 sekolah;
- Pembangunan ruang kelas baru SMP/SMPLB 300 ruang/ 200 sekolah
- Pembangunan perpustakaan SMP/SMPLB sebanyak 350 ruang/350 sekolah.



- Rehabilitasi ruang kelas dan penunjang lainnya SMP/SMPLB 17.229 ruang/ 2.979 sekolah
- Renovasi SMP sebanyak 101 sekolah;
- Laboratorium IPA SMP 350 sekolah



Permasalahan tidak tercapainya karena belum optimalnya upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan anggaran yang ada. Oleh karena itu



perlu mengoptimalkan upaya dan penyediaan sumber daya yang ada.

Tabel 8: Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB berakreditasi minimal B.

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	2017		
					Target	Realisasi	%
1.	Satuan Pendidikan SD/SDLB yang Mendapatkan Standardisasi dan Akreditasi	Sekolah	3.331	7.012	10.000	9.774	97,74
2.	Satuan Pendidikan SMP/SMPLB yang Mendapatkan Standardisasi dan Akreditasi	Sekolah	1.767	1.300	5.300	5.948	112,23
					15.300	13.754	89,90

b. Indikator Kinerja Program (IKP) 18: Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter).

Pembangunan manusia seutuhnya diawali dengan pembentukan jati diri yang melekat kuat pada setiap peserta didik. Pendidikan karakter merupakan upaya membangun jati diri bangsa melalui penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pendidikan karakter sejalan dengan upaya revolusi mental yang merupakan program prioritas nasional. Beberapa aspek dalam pendidikan karakter diharapkan



dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu berbagai kegiatan yang bertujuan untuk penguatan karakter peserta didik antara lain melalui muatan pendidikan anti korupsi,



Salah satu prestasi Siswa SD dalam International Mathematics Competition (IMC) Lucknow, India, 25 s.d 31 Juli 2018

kepramukaan, gerakan literasi sekolah, perlombaan/olimpiade nasional dilaksanakan dan ikut berpartisipasi dalam perlombaan/olimpiade internasional.

Tabel 9: Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter) tahun 2017

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	2017		Persen
					Target	Realisasi	
1.	Siswa SD yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Siswa	10	878	1.546	1.409	91,14
2.	Siswa SMP yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Siswa	4.000	4.444	3.737	1.545	41,34
3.	Siswa SLB yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Siswa	2.196	510	2.058	2.033	98,79
4.	Siswa SMA yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Siswa	17	2.091	3.346	3.212	96,00
5.	Siswa SMK yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Bidang/ Siswa	100	2.500	3.630	3.630	100,00
6.	SD yang Mendapatkan Pembinaan	Sekolah	5.400	2.029	1.542	1.542	100,00



No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	2017		Persen
					Target	Realisasi	
	Ekstrakurikuler						
7.	SMP yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler	Sekolah	1.335	852	100	99	99,00
8.	SLB yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler	Sekolah	88	100	80	158	197,50
9.	SMA yang menerapkan pendidikan karakter bangsa	Siswa	443	13.809	5000	5000	100,00
10.	SMK yang menerapkan pendidikan karakter bangsa	Siswa	4.346	764	1.704	1.200	70,42

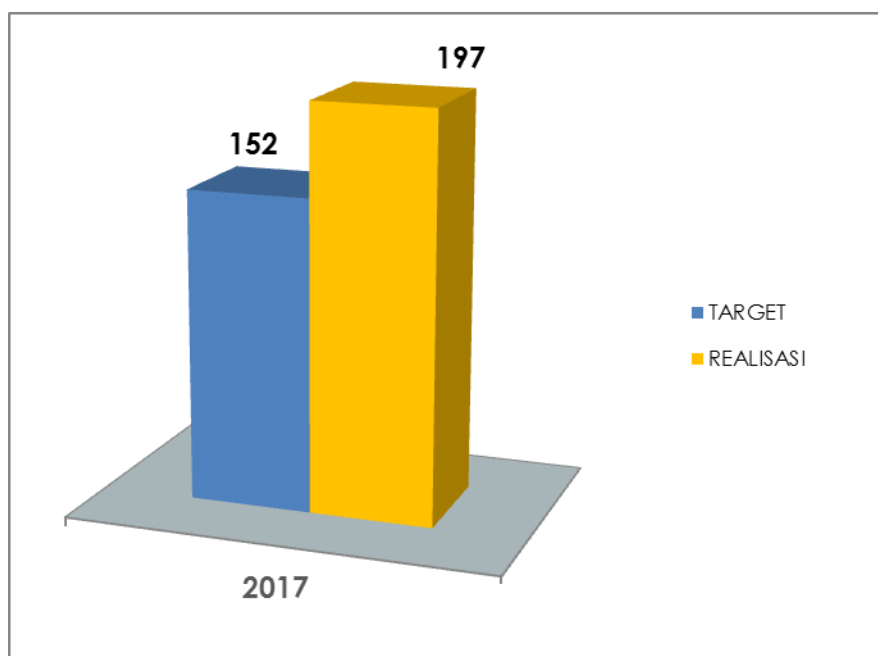
Keberhasilan pendidikan karakter sebagai salah satu muatan perubahan paradigma atau revolusi mental dalam hal pembentukan perilaku siswa sebagai pembelajar masih mengalami penundaan. Implementasi kurikulum 2013 masih harus mengalami perbaikan disebabkan adanya beberapa kendala teknis di lapangan. Pembentukan kepribadian berupa pola berpikir kritis, analitis dan logis yang kuat sangat diperlukan untuk menyiapkan masyarakat yang peka terhadap lingkungan sekitar.

Muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah secara integratif harus dapat menumbuhkan karakter yang kuat bagi peserta didik. Oleh karena itu setiap mata pelajaran dan setiap tema pembelajaran tidak meninggalkan pesan moral dan penguatan karakter siswa.



- c. Indikator Kinerja Program (IKP) 19: Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Bagan 34: Grafik jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah tahun 2017



Pada tahun 2017 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengirimkan delegasi kompetisi internasional yang diikuti oleh siswa SD, SMP, SLB, SMA dan SMK. Target medali tertimbang tahun 2017 adalah 152 dengan realisasi lebih tinggi yaitu 197 dari berbagai cabang. Kompetisi yang diikuti adalah sebagai berikut:

Tabel 10: Perolehan medali dari berbagai kompetisi Internasional

Nama Lomba	Tempat	Jenjang	Perolehan Medali			
			Emas	Perak	Perunggu	Jumlah
Jumlah			30	39	29	98
Thailand Open Chess Championship	Bangkok, Thailand, 8 – 16 April 2017	SD	1	0	1	2
International Mathematics Competition (IMC)	Lucknow, India, 25 – 31 Juli 2017	SD	1	3	2	6
2 nd edition of International Karate Open of Province de Liege	Herstal, Belgia, 8 – 14 November 2017	SD	4	2	1	7



Nama Lomba	Tempat	Jenjang	Perolehan Medali			
			Emas	Perak	Perunggu	Jumlah
International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)	Singapura, 20 – 24 November 2017	SD	3	6	3	12
The 31 st Coupe Internationale de Kayl Karate	Kayl, Luksemburg, 14 – 15 Oktober 2017	SMP	4	3	2	9
8 th International Teenagers Mathematics Olympiad 2017	Davao, Filipina, 8 – 12 November 2017	SMP	5	7	2	14
Expo Science Mexico 2017	La Paz Baja, Mexico, 4 – 8 Desember 2017	SMP	2	-	-	2
14 th International Junior Science Olympiad (IJSO)	Arnhem Nijmegen, Belanda, 3 – 12 Desember 2017	SMP	4	3	2	9
International Biology Olympiad (IBO)	Coventry, Inggris, 22 s.d. 30 Juli 2017	SMA	1	2	1	4
International Chemistry Olympiad (IChO)	6 s.d. 15 Juli 2017, Nakhon Pathom, Thailand	SMA	1	1	-	2
International Earth Science Olympiad (IESO)	Paris, Prancis, 22 s.d. 28 Agustus 2017	SMA	1	4	2	7
International Geography Olympiad (IGEO)	Serbia, 2 s.d. 8 Agustus 2017	SMA	1	-	2	3
International Mathematics Olympiad (IMO)	Rio de Janeiro, Brazil, 12 - 23 Juli 2017	SMA	-	2	3	5
International Olympiad Astronomy an Astrophysics (IOAA)	Puket, Thailand, 12 s.d. 21 Nopember 2017	SMA	-	-	5	5
International Olympiad in Informatics (IOI)	Teheran, Iran, 28 Juli s.d. 4 Agustus 2017	SMA	-	1	3	4
International Physics Olympiad (IPhO)	Yogyakarta, Indonesia, 16 - 24 Juli 2017	SMA	2	3	-	5
World Skills Competition	Abu Dhabi, UEA, 14 – 19 Oktober 2017	SMK		2		2

Tantangan dalam meningkatkan perolehan medali tertimbang selain peningkatan mutu pendidikan yang berkesinambungan adalah juga faktor peruntukan anggaran bagi siswa-siswa Indonesia untuk mengikuti lomba/olimpiade internasional tersebut. Karena untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan biaya yang juga harus dikaitkan dengan faktor efisiensi dan manfaat yang didapat dari keikutsertaan tersebut.

Solusi dari hal tersebut adalah terus meningkatkan mutu pendidikan sehingga menghasilkan individu-individu siswa yang mampu bersaing pada lomba/olimpiade internasional dan juga menyediakan anggaran yang cukup untuk mendanai keikutsertaan mereka.



Melihat perkembangan dari tahun 2015 s.d 2017 maka terlihat ketercapaian perolehan medali tertimbang sangat bergantung pada anggaran yang disediakan untuk mendanai keikutsertaan siswa-siswi Indonesia. Jika



mendapat dukungan dana yang cukup untuk pelaksanaan lomba/olimpiade baik di tingkat nasional maupun internasional maka niscaya angka perolehan medali tertimbangpun akan naik pada tahun-tahun berikutnya hingga 2019.

d. Indikator Kinerja Program (IKP) 20: Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP.

Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SNP meliputi 11 item, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain/berolahraga.

Untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas dilakukan melalui pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD/SDLB. Selain itu pemenuhan sarana dan prasaran lainnya berupa pembangunan perpustakaan dan laboratorium IPA. Berikut adalah intervensi peningkatan pemenuhan SNP SD/SDLB berupa:



Tabel 11: Pembangunan Sarana dan prasarana SD untuk pemenuhan SNP.

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2015	2017		Persen
					Target	Realisasi	
1.	Pembangunan RKB SD	Ruang	2.995	1.141	200	200	100
2.	Pembangunan RKB SDLB	Ruang	92	212	125	126	100,8
3.	Pembangunan Perpustakaan/ PSB	Unit	1.452	621	390	424	108,72

Pemenuhan standar sarana dan prasarana SD terkendala antara lain oleh keterbatasan alokasi anggaran untuk melakukan pemenuhan berupa pembangunan laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain/berolahraga. Dari 11 item pemenuhan SNP dari Direktorat Jenderal hanya mengalokasikan untuk penambahan ruang kelas baru dan pembangunan perpustakaan dengan alokasi dana yang terbatas.

Pemenuhan SNP sarana dan prasarana SD/SDLB dapat terpenuhi jika prioritas pembangunan sarana dan prasarana menjadi perhatian bukan hanya pemerintah namun juga provinsi/kabupaten/kota.

e. Indikator Kinerja Program (IKP) 21: Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP.

Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SNP meliputi 11 item, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain/berolahraga.

Untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas dilakukan melalui pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP/SMPLB. Selain itu pemenuhan sarana dan prasarana lainnya berupa pembangunan perpustakaan dan laboratorium IPA. Berikut adalah intervensi peningkatan pemenuhan SNP SMP/SMPLB berupa:



Tabel 12: Output Pendukung IKP SMP yang Memiliki Prasarana dan Sarana sesuai SNP.

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	2017		Persen
					Target	Realisasi	
1.	Pembangunan RKB SMP	Ruang	2.813	2.770	300	300	100
2.	Pembangunan Perpustakaan/ PSB	Unit	792	564	350	350	100
3.	Pembangunan Laboratorium IPA	Unit	956	562	440	440	100

Pemenuhan standar sarana dan prasarana SMP/SMPLB terkendala antara lain oleh keterbatasan alokasi anggaran untuk melakukan pemenuhan berupa pembangunan ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain/berolahraga. Dari 11 item pemenuhan SNP, Direktorat Jenderal hanya mengalokasikan untuk penambahan ruang kelas baru dan pembangunan perpustakaan, serta Pembangunan laboratorium IPA dengan alokasi dana yang terbatas.

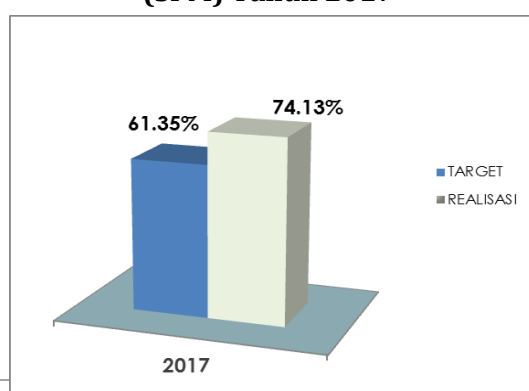
Pemenuhan SNP sarana dan prasarana SMP/SMPLB dapat terpenuhi jika prioritas pembangunan sarana dan prasarana menjadi perhatian bukan hanya pemerintah namun juga provinsi/kabupaten/kota.

f. Indikator Kinerja Program (IKP) 22: Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) SD meliputi pemenuhan terhadap 4 standar pendidikan yaitu tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan pengelolaan.

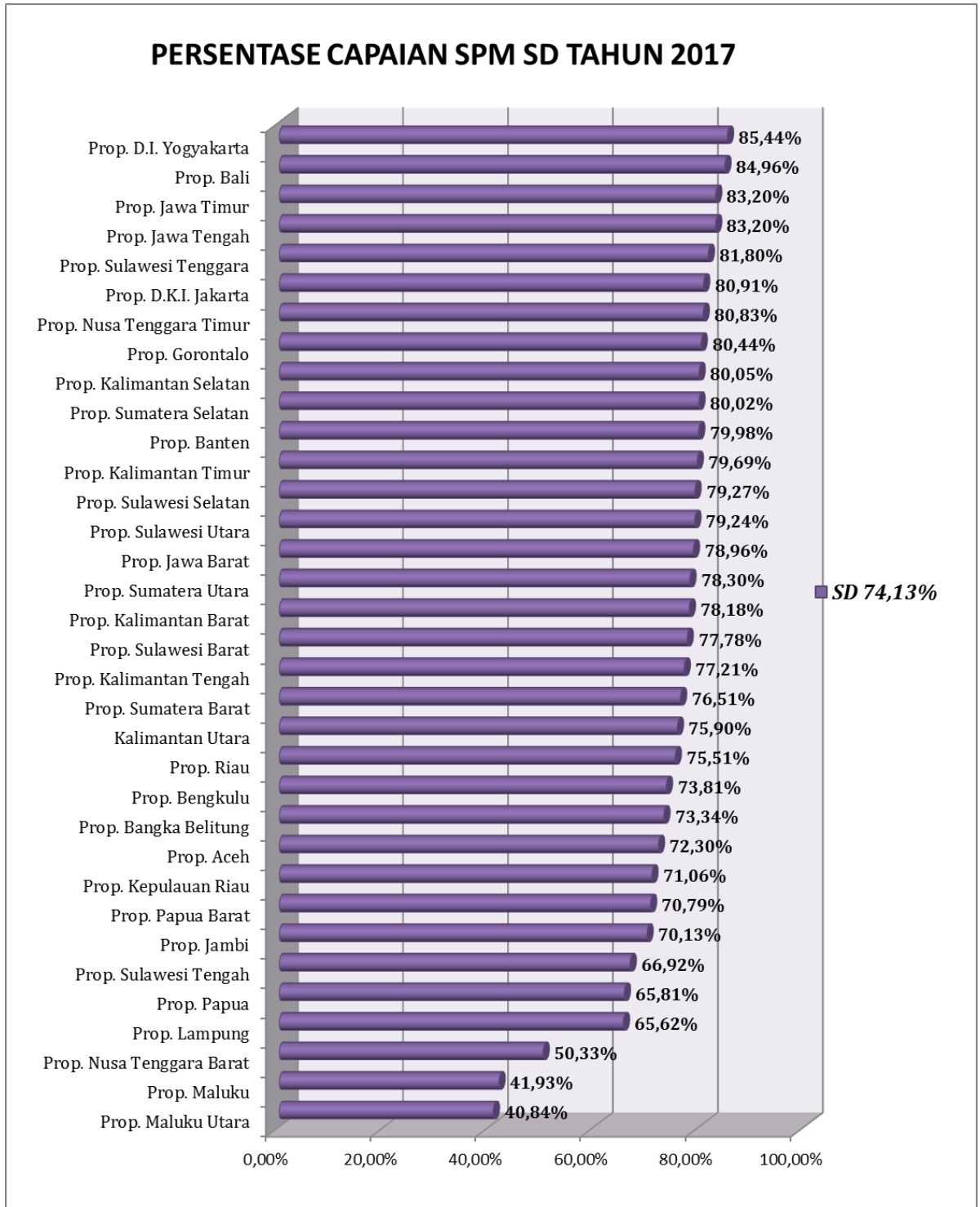
Target kinerja Persentase SD yang memenuhi SPM sebesar 61,35%, terealisasi 74,13 %, dengan demikian target kinerja tercapai.

Bagan 35: Grafik persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017



Hal ini disebabkan oleh antara lain karena pelaksanaan program-program yang dilakukan diantaranya rehabilitasi ruang kelas, penyaluran peralatan pendidikan, penambahan buku paket siswa.

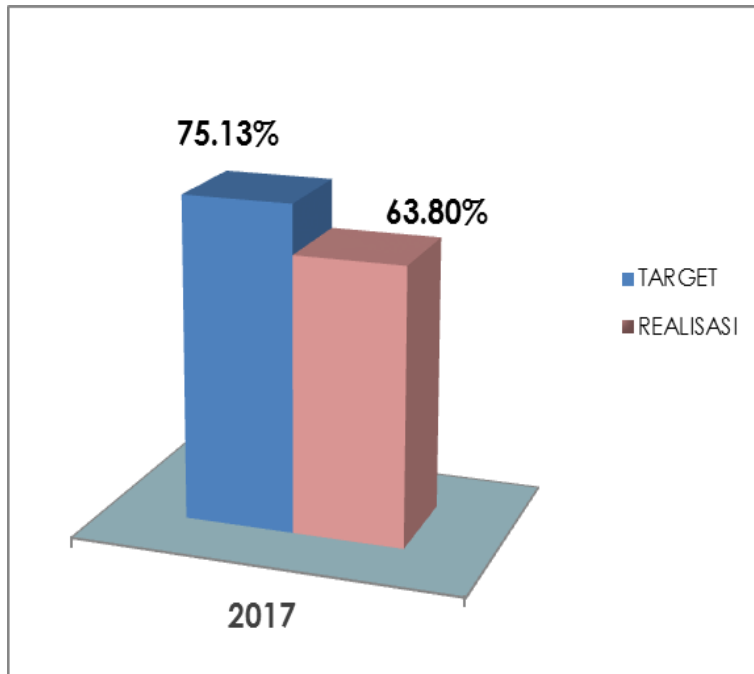
Bagan 36: Grafik persentase capaian SPM SD per Provinsi Tahun 2017



g. Indikator Kinerja Program (IKP) 23: Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Target kinerja Persentase SMP yang memenuhi SPM sebesar 75,13%, terealisasi 63,80 %, dengan demikian target kinerja tidak tercapai.

Bagan 37: Garfik SPM SD TAHun 2017

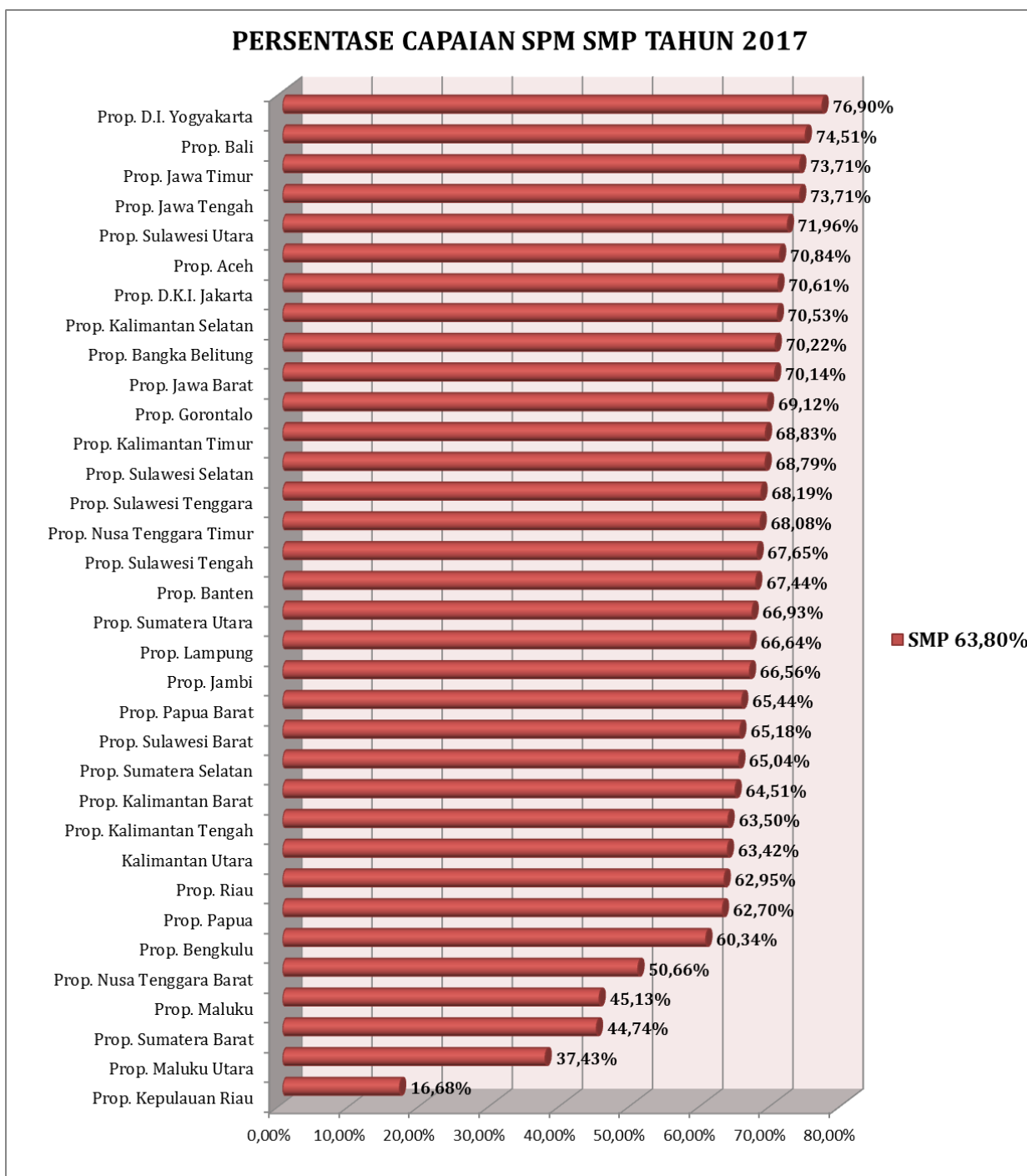


Hal ini disebabkan oleh rendahnya ketersediaan Laboratorium IPA yang lengkap di sekolah, juga jumlah siswa dalam rombongan belajar yang melebihi 36 yang terjadi di banyak sekolah terutama di perkotaan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMP meliputi pemenuhan terhadap 4 standar pendidikan yaitu ketenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan pengelolaan.



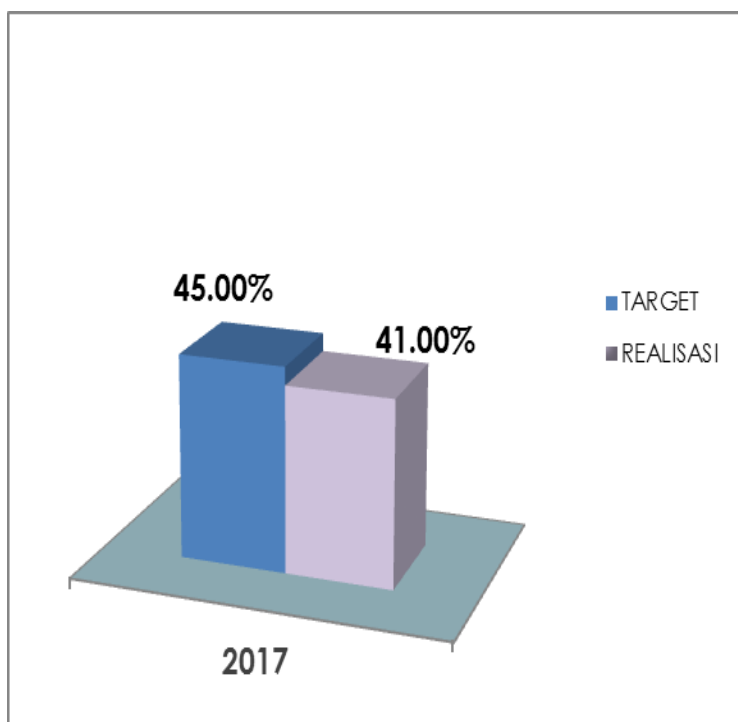
Bagan 38: Grafik persentase capaian SPM SMP per Provinsi Tahun 2017



h. Indikator Kinerja Program (IKP) 24: SM menerapkan program penyalarsan dengan dunia kerja

Tahun 2017 Target IKP ini adalah 45%, telah terealisasi 41%. IKP ini tidak mencapai target yang ditetapkan, sebesar 4%. Tidak tercapainya target ini antara lain disebabkan belum adanya sosialisasi yang cukup luas (massif) dan masih kurangnya dukungan sarana yang dibutuhkan dan tenaga guru yang relevan. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang lebih meluas, menetapkan sasaran yang tepat, penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta tenaga guru yang mampu

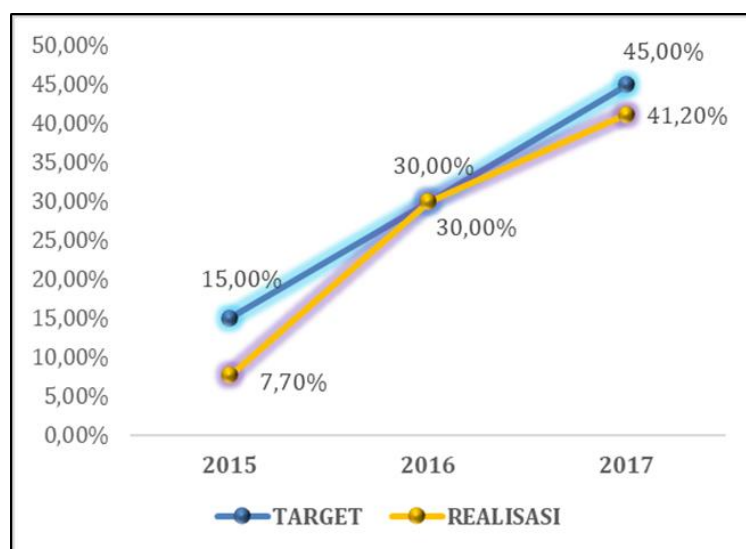
Bagan 39: Grafik SPM SMP Tahun 2017



Meskipun sasaran IKP ini adalah untuk sekolah menengah, tetapi lebih dominan dilakukan oleh SMK. Pada dasarnya semua SMK melakukan penyalarsan agar terjadi relevansi antara kemampuan lulusan dengan dunia kerja. Kegiatannya berupa praktek kerja industri, pengembangan potensi wilayah, dan bantuan kewirausahaan, kerjasama industri.



Bagan 40: Grafik Perkembangan SPM SMP Tahun 2015 -2017



Tabel 17: SM menerapkan program penyalarsan dengan dunia kerja

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	2017		
					Target	Realisasi	Persentase
1.	Pengembangan SMK Berbasis Industri	Sekolah	500	859	-	-	0
2.	Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat	Lokasi/ sekolah	-	40	-	-	0
3.	Kerjasama Industri Regional dan Internasional	Kerjasama /sekolah	400	600	1.540	1.750	113,64
4.	SMK yang melakukan penyalarsan/Kerjasama dan Sinergi antar lembaga	Lembaga/ sekolah	1,540	1,750	1,280	655	51,17

6. Jumlah Sekolah Rujukan/Model di setiap Kabupaten/Kota

Jumlah sekolah rujukan/moderl di setiap kabupaten/kota dilihat dari keberhasilan capaian IKP 25 dan 26

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 25: Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/model

Peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui pengelolaan sistem pembelajaran dan manajemen sekolah oleh satuan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah melalui pengelolaan dan pembinaan sekolah rujukan. Oleh karena itu di setiap kabupaten/kota minimal harus ada 1 sekolah rujukan/model. Hal ini untuk mempercepat



desiminasi inovasi pembelajaran kepada sekolah imbas di setiap kabupaten /kota.

Di seluruh Indonesia tahun 2017 terdapat 514 kabupaten/kota. Ditargetkan untuk membina dan membangun sekolah rujukan untuk semua jenjang sebanyak 1.742 sekolah, tercapai sebanyak 1.717 sekolah (98,56%).

Target IKP 25 adalah 70,50%. Ketercapaiannya 98,56%. Dari data ini, maka capaian IKP 25 telah melebihi target yang ditetapkan. Tetapi lokasi sekolah rujukan ini tidak merata, ada kabupaten/kota yang sudah mempunyai lebih dari 1 sekolah rujukan, ada pula yang belum mempunyai. Permasalahannya, antara lain karena belum diterapkannya secara optimal manajemen yang mendukung pelaksanaan sekolah rujukan di beberapa kabupaten/kota, terutama untuk SMK. Tahun mendatang harus diupayakan secara optimal memberikan dukungan administrasi/manajemen, sarana dan prasarana, dan tenaga kependidikan yang baik di kabupaten/kota yang belum ada sekolah rujukan.

b. Indikator Kinerja Program (IKP) 26: Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B

Mempersiapkan sekolah agar mendapat status akreditasi minimal B dilakukan melalui penghitungan seberapa banyak jumlah SM yang diakreditasi oleh dari seluruh jumlah SM yang ada. Dari jumlah tersebut berapa banyak yang berakreditasi di bawah B. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dapodikdasmen ada sebanyak 72,61% SM yang diakreditasi untuk memenuhi akreditasi minimal B. Capaian ini di bawah target yang ditetapkan yaitu sebanyak 75,00%. Selisih capaian dengan target sebesar 2,39%.

Permasalahan yang dihadapi, ialah masih adanya sekolah yang belum mampu secara signifikan untuk dipersiapkan menjadi berakreditasi minimal B karena kurangnya ketersediaan sarana, peralatan pendidikan, kelayakan ruang kelas. Untuk itu perlu dilakukan intervensi penyiapan output pendukung, seperti ketersediaan sarana prasarana (ruang kelas yang baik, rehabilitasi, laboratorium, renovasi sekolah), pelaksanaan kurikulum Tahun



2013. Adapun intervensi dari Direktorat Jenderal untuk meningkatkan jumlah sekolah yang berakreditasi tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 20: Output Pendukung SM yang memenuhi akreditasi minimal B

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	2017		
1.	RKB SMA	Ruang/ Sekolah	2.153	4.187	1.000/ 461	1.024/461	102,40
2.	SMA yang direhabilitasi	Ruang/ Sekolah	131	1.600	5.598/ 1.078	5.281/ 1.078	94,34
3.	Ruang Perpustakaan SMA yang dibangun	Sekolah	200	311	351	351	100
4.	Revitalisasi/Renovasi SMA	Sekolah	40	393	110	103	93,64
5.	RKB SMK	Ruang/ Sekolah	3.325	5.478	1.029	1.000/495	97,78
6.	SMK yang Direhabilitasi	Ruang/ Sekolah	123	1.016	3.314	3.314/ 1.163	100
7.	Ruang Perpustakaan SMK yang dibangun	Sekolah	200	-	200	208	104
8.	SMK yang Menerapkan Kurikulum 2013	Sekolah	200	2,302	2,500	4,854	194
9.	SMA yang menerapkan Kurikulum 2013	Sekolah	300	13,409	8,012	9,398	117
10.	SMA yang mendapatkan Ruang Laboratorium	Sekolah	1.000	866	450	467	103,78
11.	SMK yang mendapatkan Ruang Laboratorium/ Praktik siswa	Sekolah	1.000	1,608	1,299	1,251	96,30

7. Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 standar nasional pendidikan (SNP).

Meningkatnya kualitas satuan Pendidikan melalui 8 SNP keberhasilannya terlihat dari capaian IKP 27

Indikator Kinerja Program (IKP) 27: Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya

Peningkatan indeks efektivitas sekolah diukur melalui pemetaan pencapaian satuan pendidikan terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP). Adapun 8 standar tersebut meliputi hal-hal yang terkait dengan sarana dan prasarana, isi, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, pengelolaan pendidikan dan standar proses penilaian.



Tabel 13: Satuan pendidikan yang diukur peningkatan indeks efektivitasnya

No	Jenjang	Jumlah Sekolah	Sampel (sekolah)		
			Total	2017 > 2016	2016 < 2017
1.	SD	148.665	68.198	67.715	483
2.	SMP	39.382	17.343	16.747	596
3.	SMA/SMK	27.612	12.834	12.180	654
Jumlah		215.659	98.375	96.642	1.733

Dari table diatas menunjukkan bahwa :

1. Untuk jenjang SD dari total populasi sebanyak 148.665 sekolah dengan jumlah sampel sebanyak 68.198 sekolah atau 45,87% yang tersebar di 34 provinsi, sebanyak 67.715 sekolah atau 99,29% mengalami peningkatan skor rapot mutu atau bisa dikatakan meningkat indeks efektivitasnya.
2. Untuk jenjang SMP dari total populasi sebanyak 39.382 sekolah dengan jumlah sampel sebanyak 17.343 sekolah atau 44,04% yang tersebar di 34 provinsi, sebanyak 16.747 sekolah atau 96,56% mengalami peningkatan skor rapot mutu atau bisa dikatakan meningkat indeks efektivitasnya.
3. Untuk jenjang SMA/SMK dari total populasi sebanyak 27.612 sekolah dengan jumlah sampel sebanyak 12.834 sekolah atau 46,48% yang tersebar di 34 provinsi, sebanyak 12.180 sekolah atau 94,90% mengalami peningkatan skor rapot mutu atau bisa dikatakan meningkat indeks efektivitasnya.

Secara umum untuk jenjang Pendidikan Dasra dan Menengah, dari total populasi sebanyak 215.659 sekolah, jumlah sampel yang diukur sebanyak 98.375 sekolah atau 45,62%, sebanyak 96.642 sekolah atau 98,42% mengalami peningkatan indeks efektivitasnya.

8. Tata Kelola Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Baik

Keberhasilan tata kelola Ditjen Dikdasmen yang baik terlihat dari capaian IKP 28 dan IKP 29.

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 28: Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan

Untuk menjamin ketersediaan data pokok pendidikan yang akurat, berkelanjutan dan terbarukan, Direktorat Jenderal telah menetapkan SOP



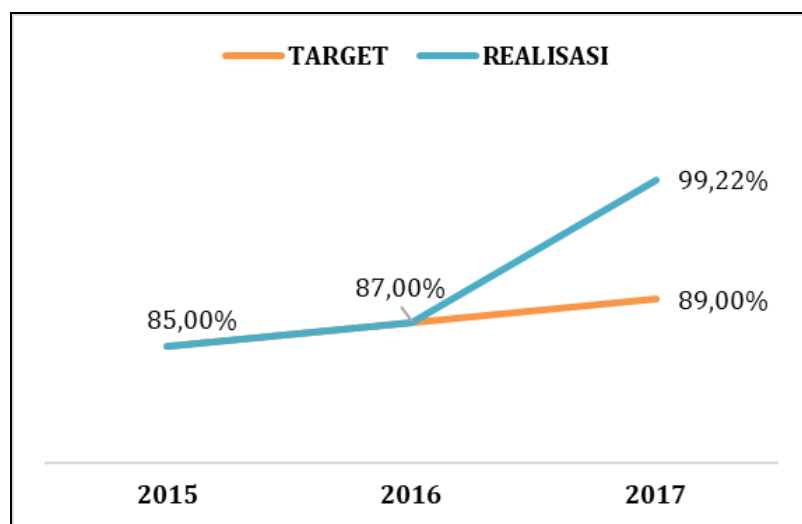
Pendataan yang melibatkan seluruh komponen terkait. Adapun mekanisme penyediaan dan penggunaan data adalah dengan melalui proses input data dilakukan oleh operator pada tingkat satuan pendidikan dibawah supervisi kepala sekolah dan tim pendataan kabupaten/kota, Up dating data/transaksi di sekolah, dan secara regular sinkronisasi dilakukan pada setiap awal semester.

Target layanan Sistem Pendataan dan Informasi Dikdasmen tahun 2017 adalah sebanyak 6 layanan. Hasilnya adalah, telah dilaksanakan pemberian layanan guna kemudahan mendapatkan data-data pendidikan melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIKDASMEN) untuk seluruh jenjang pendidikan yang terdiri dari (1) Data pokok Pendidikan SD; (2) Data Pokok Pendidikan SMP; (3) Data pokok Pendidikan SMA; (4) Data pokok Pendidikan SMK; (5) Data pokok Pendidikan SLB dan (6) Pelayanan data pokok Pendidikan untuk Publik. Realisasi IKP ini telah mencapai 100%

Tabel 14: Output Pendukung Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	2017		
					Target	Realisasi	Persen
1.	Data Pendidikan Dasar dan Menengah Akurat, Berkelanjutan dan Terbaru	%	100	100	100	100	100

Bagan 41: Perkembangan Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru Tahun 2015 - 2017



b. Indikator Kinerja Program (IKP) 29: Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (Sangat Baik)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung IKP ini adalah pelayanan perencanaan yang melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), evaluasi pelaksanaan kegiatan, pelaporan, pelayanan keuangan dan BMN, pelayanan hukum, tatalaksana dan kerjasama serta umum dan kepegawaian serta adanya dukungan manajemen. Ditargetkan pada tahun 2019 nilai Lakip adalah 80 (sangat baik). Sampai tahun 2017 capaiannya adalah 74%, dari sasaran sebanyak 77%. Capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan. Permasalahannya adalah karena belum sepenuhnya penerapan SAKIP sesuai dengan Peraturan Menpan-RB 53 Tahun 2012.

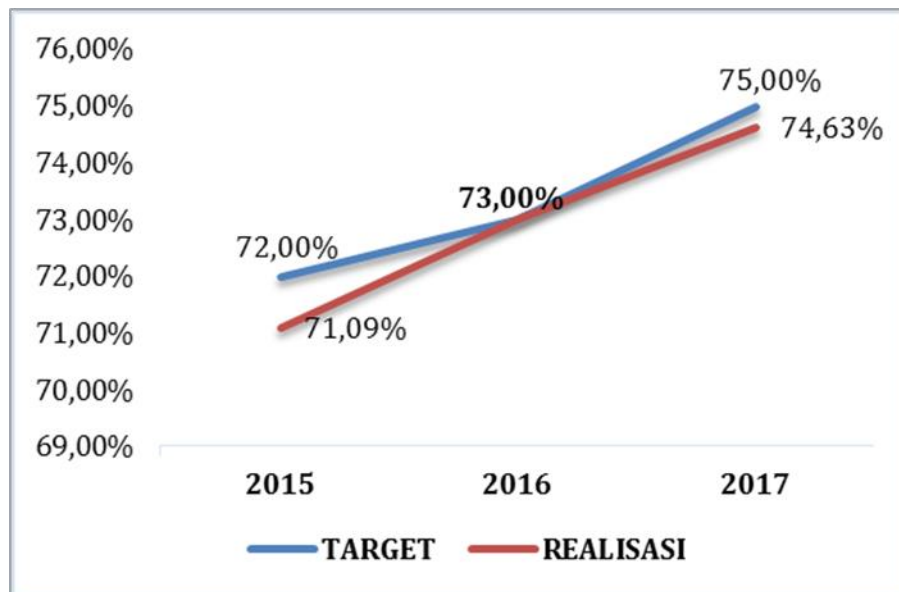
Untuk mencapai kualitas LAKIP yang sangat baik sesuai dengan target yang ditetapkan, Direktorat Jenderal harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilengkapi dengan data dukung yang ditetapkan dan menerapkan SAKIP secara benar dan sesuai.

Tabel 15: Output Pendukung Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (Sangat Baik)

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	2017		
					Target	Realisasi	Persen
1.	Nilai Minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen Sebesar 80	%	71,00	73,00	77,00	74,00	96,10



**Bagan 42: Grafik Perkembangan nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen
Tahun 2015 - 2017**



B. Pencapaian Program Prioritas

1. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar). Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.



PIP merupakan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Besaran dana PIP adalah sebagai berikut :

1. Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp. 450.000,-/tahun;
2. Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp. 750.000,-/tahun;
3. Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp. 1.000.000,-/tahun.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda/identitas penerima bantuan pendidikan PIP. Kartu ini memberi jaminan dan kepastian anak-anak usia sekolah terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan. Setiap anak penerima bantuan pendidikan PIP hanya berhak mendapatkan 1 (satu) KIP. Dana PIP dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi.

Jumlah sasaran dan alokasi anggaran serta realisasi pengaluran PIP Tahun 2015 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 16: sasaran dan alokasi anggaran serta realisasi pengaluran PIP Tahun 2015

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SD	Siswa	10.813.635	9.894.545	91,50
	Rp	4.260.841.200.000	3.918.743.775.000	91,97
SMP	Siswa	4.623.132	4.140.961	89,57
	Rp	2.735.999.625.000	2.456.893.125.000	89,80
SMA	Siswa	1.638.671	1.485.892	90,68
	Rp	1.345.294.000.000	1.224.407.500.000	91,01
SMK	Siswa	1.894.753	1.561.805	82,43
	Rp	1.407.732.000.000	1.160.629.000.000	82,45
Total:	Siswa	18.970.191	17.083.203	90,05
	Rp	9.749.866.825.000	8.760.673.400.000	89,85

Jumlah sasaran dan alokasi anggaran serta realisasi pengaluran PIP Tahun 2016 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 17: sasaran dan alokasi anggaran serta realisasi pengaluran PIP Tahun 2016

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SD	Siswa	10.900.424	6.946.421	63,73
	Rp	4.209.381.000.000	2.679.377.625.000	63,65
SMP	Siswa	4.797.073	2.088.280	43,53
	Rp	2.732.067.750.000	1.135.361.625.000	41,56
SMA	Siswa	1.655.080	836.968	50,57
	Rp	1.258.009.000.000	614.383.500.000	48,84
SMK	Siswa	1.841.306	1.313.850	71,35
	Rp	1.371.379.500.000	986.671.000.000	71,95
Total:	Siswa	19.193.883	11.185.519	58,28
	Rp	9.570.837.250.000	5.415.793.750.000	56,59

Tabel 18: sasaran dan alokasi anggaran serta realisasi pengaluran PIP Tahun 2017

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SD	Siswa	10.360.614	9.397.805	90,71
	Rp	4.264.018.668.000	3.982.775.422.596	93,40
SMP	Siswa	4.369.968	2.284.279	52,27
	Rp	2.718.698.178.000	2.220.783.512.200	81,69
SMA	Siswa	1.375.458	1.134.875	82,51
	Rp	1.257.844.629.000	1.002.550.429.382	79,70
SMK	Siswa	1.879.617	1.442.042	76,72
	Rp	1.320.566.614.000	1.190.659.712.594	90,16
Total:	Siswa	17.985.657	11.185.519	79,28
	Rp	9.561.128.089.000	8.396.769.076.772	87,82

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian,



ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Secara khusus program BOS SD dan SMP bertujuan untuk:

- a. membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
- b. membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
- c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), SMA/SMK baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional.

Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut:

- a. SD/SDLB : Rp. 800.000,-/peserta didik/tahun
- b. SMP/SMPLB/Satap/SMPT : Rp. 1.000.000,-/peserta didik/tahun
- c. SMA/SMK : Rp. 1.400.000/peserta didik/tahun.

Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) dari biaya operasi sekolah tidak tergantung pada jumlah peserta didik, maka pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) orang. Kebijakan khusus tersebut adalah dengan memberikan besar alokasi dana BOS minimal sebanyak 60 (enam puluh) peserta didik, baik untuk sekolah tingkat SD maupun tingkat SMP.

Secara nasional total alokasi anggaran BOS sebesar Rp.43,814,875,200,000 yang terdiri dari :



- a. Jenjang SD : Rp. 21,252,533,600,000; Jumlah siswa 26,565,667 orang
- b. Jenjang SMP : Rp. 10,042,234,000,000; Jumlah siswa 10,042,234 orang
- c. Jenjang SMA : Rp. 6,373,263,400,000; Jumlah siswa 4,557,525 orang
- d. Jenjang SMK : Rp. 6,146,844,200,000; Jumlah siswa 4,390,603 orang

Adapun alokasi anggaran dana BOS per provinsi adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19: Alokasi anggaran dana BOS

No	Provinsi	Anggaran	No	Provinsi	Anggaran
1	2	3	1	2	3
1	Aceh	868,655,400,000	18	Kepulauan Riau	321,829,400,000
2	Bali	759,414,800,000	19	Lampung	1,378,888,000,000
3	Banten	1,276,572,400,000	20	Maluku	411,463,200,000
4	Bengkulu	368,675,600,000	21	Maluku Utara	277,003,400,000
5	DI Yogyakarta	558,407,600,000	22	Nusa Tenggara Barat	756,871,200,000
6	DKI Jakarta	1,568,210,800,000	23	Nusa Tenggara Timur	1,215,798,800,000
7	Gorontalo	151,027,000,000	24	Papua	478,002,000,000
8	Jambi	611,813,200,000	25	Papua Barat	186,639,600,000
9	Jawa Barat	4,987,593,800,000	26	Riau	1,196,172,400,000
10	Jawa Tengah	4,715,023,400,000	27	Sulawesi Barat	276,005,000,000
11	Jawa Timur	4,247,880,400,000	28	Sulawesi Selatan	1,710,680,600,000
12	Kalimantan Barat	947,161,400,000	29	Sulawesi Tengah	577,477,000,000
13	Kalimantan Selatan	588,821,800,000	30	Sulawesi Tenggara	568,363,400,000
14	Kalimantan Tengah	450,751,000,000	31	Sulawesi Utara	494,820,200,000
15	Kalimantan Timur	659,020,600,000	32	Sumatera Barat	1,025,091,200,000
16	Kalimantan Utara	128,935,200,000	33	Sumatera Selatan	1,533,592,600,000
17	Kep. Bangka Belitung	244,274,400,000	34	Sumatera Utara	2,993,016,000,000

3. Pelaksanaan Kurikulum 2013

Implementasi Kurikulum 2013 merupakan langkah strategis dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan masyarakat Indonesia masa depan. Titik tekan pengembangan adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang



diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Pengembangan kurikulum menjadi amat penting sejalan dengan kontinuitas kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya serta perubahan masyarakat pada tataran lokal, nasional, regional, dan global di masa depan. Aneka kemajuan dan perubahan itu melahirkan tantangan internal dan eksternal pada bidang pendidikan. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

Kurikulum 2013 menganut prinsip : (1) pembelajaran yang dilakukan guru (*taught curriculum*) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (*learned-curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut:

- a. Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama;
- b. Pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/ media lainnya);



- c. Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet);
- d. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains);
- e. Pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim);
- f. Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia;
- g. Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (users) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik;
- h. Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines); dan
- i. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;
- b. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;
- c. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;
- d. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- e. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran;
- f. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran



dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;

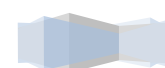
- g. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antarmatapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

Untuk memfasilitasi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru, serta membantu sekolah mengimplementasikan kurikulum, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pelaksanaan kurikulum jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK secara berjenjang mulai dari Pelatihan Instruktur Nasional, Instruktur Provinsi, Instruktur Kabupaten/Kota dan Guru Sasaran. Pelatihan dan pendampingan pelaksanaan kurikulum tersebut dengan sejumlah program pendukung lainnya diharapkan mampu menjadikan jumlah sekolah pelaksana kurikulum naik secara signifikan setiap tahunnya, hingga akhirnya pada Tahun Pelajaran 2019/2020 seluruh sekolah dari berbagai jenjang pendidikan telah menggunakan Kurikulum 2013.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Pelatihan Instruktur Kurikulum 2013 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 20: Sasaran dalam Pelatihan Instruktur Kurikulum 2013

No	Jenjang Sekolah	Sekolah sasaran	Sekolah Induk Klaster	Sasaran Pelatihan			Instruktur Kab/Kota (LPMP)	Instruktur Provinsi (Direktorat)	Intruktur Nasional (Direktorat)
				Guru	Kepala Sekolah	Jumlah			
1	SD	27.984	4,099	70.216	27.480	98.061	12.187	340	134
2	SMP	5.342	917	80.016	5.320	85.017	18.504	1.840	154
3	SMA	2.049	545	45.078	2.049	47.127	16.815	1.121	190
4	SMK	1.631	668	44.968	1.606	46.574	19.058	360	162
5	PKLK	2.019		6.921	1.998	8.919	-	-	142
Jumlah		39.025	6.229	247.199	38.453	285.698	66.564	3.661	796



4. Program Vokasi/Kejuruan

Kebijakan pendidikan kejuruan dan ketrampilan mengacu yang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia yang menjadi arah pembangunan pendidikan vokasi ke depan. Dalam Inpres tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat tugas untuk: Dalam Inpres tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat tugas untuk: (1) membuat peta jalan pengembangan SMK; (2) menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*); (3) meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; (4) meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri; (5) meningkatkan akses, sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan (6) membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.

Pelaksanaan Program Vokasi/Kejuruan bertitik tolak pada Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016, meliputi empat Kompetensi Keahlian sesuai prioritas kebijakan Pemerintah, yaitu bidang Maritim, Pertanian, Pariwisata dan Teknologi Informasi, yang secara singkat dinyatakan sebagai 4-SATA SMK. Pada tahun 2016 telah ditetapkan Peta Jalan pengembangan SMK sebagai berikut:

Bagan 43 : Peta jalan pengembangan SMK



Peta jalan pengembangan SMK ini merupakan salah satu alat untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja terampil dan penyerapan tenaga kerja



lulusan SMK di dunia kerja dan industri. Sebagai ilustrasi kesenjangan jumlah lulusan SMK pada sembilan bidang keahlian dengan kebutuhan tenaga kerja sebagai berikut:

Tabel 21: Perbandingan Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Lulusan SMK 2016

Perbandingan Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Lulusan SMK 2016				
No.	Bidang Keahlian	Lulusan SMK 2016	Peluang Kebutuhan Tenaga Kerja	Kelebihan (+)/ Kekurangan(-)
1	Teknologi dan Rekayasa	441.561	611.644	170.083
2	Energi dan Pertambangan	3.486	27.008	23.522
3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	277.545	327.813	50.268
4	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	60.944	68.245	7.301
5	Agribisnis dan Agroteknologi	52.319	445.792	393.473
6	Kemaritiman	17.249	3.364.297	3.347.048
7	Bisnis dan Manajemen	348.954	119.255	- 229.699
8	Pariwisata	82.171	707.600	625.429
9	Seni dan Industri Kreatif	12.017	88.133	76.116
TOTAL		1.296.246	5.759.787	4.463.541

1. Kekurangan lulusan terbesar adalah bidang perikanan dan kelautan, karena terhambat dengan aproval dari peraturan di kementerian Perhubungan;

2. Bidang TIK tumbuh sangat besar karena banyak calon guru yang bisa mengajar substansi TIK. Yang diperlukan adalah tataluang bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar;

3. Bidang Bisnis dan manajemen adalah yang berlebih lulusan, karena penyelenggaraannya mudah dan murah. Umumnya SMK yang dikelola masyarakat membuka bidang keahlian ini. Untuk itu perlu revitalisasi dan penataan ulang.

Implementasi undang undang 23 tahun 2014 yang melimpahkan pengelolaan SMK kepada provinsi akan menajamkan ketepatan pemenuhan *supply-demand* tenaga kerja lintas Kab./Kota. Dari 7,56 juta total pengangguran terbuka, 20,76% berpendidikan SMK (BPS, 2015). Hanya 22,3% guru SMK yang mengajar sesuai bidang keterampilan (guru produktif). Pendidikan vokasi belum *link-and-match* dengan DUDI (dunia usaha/industri).

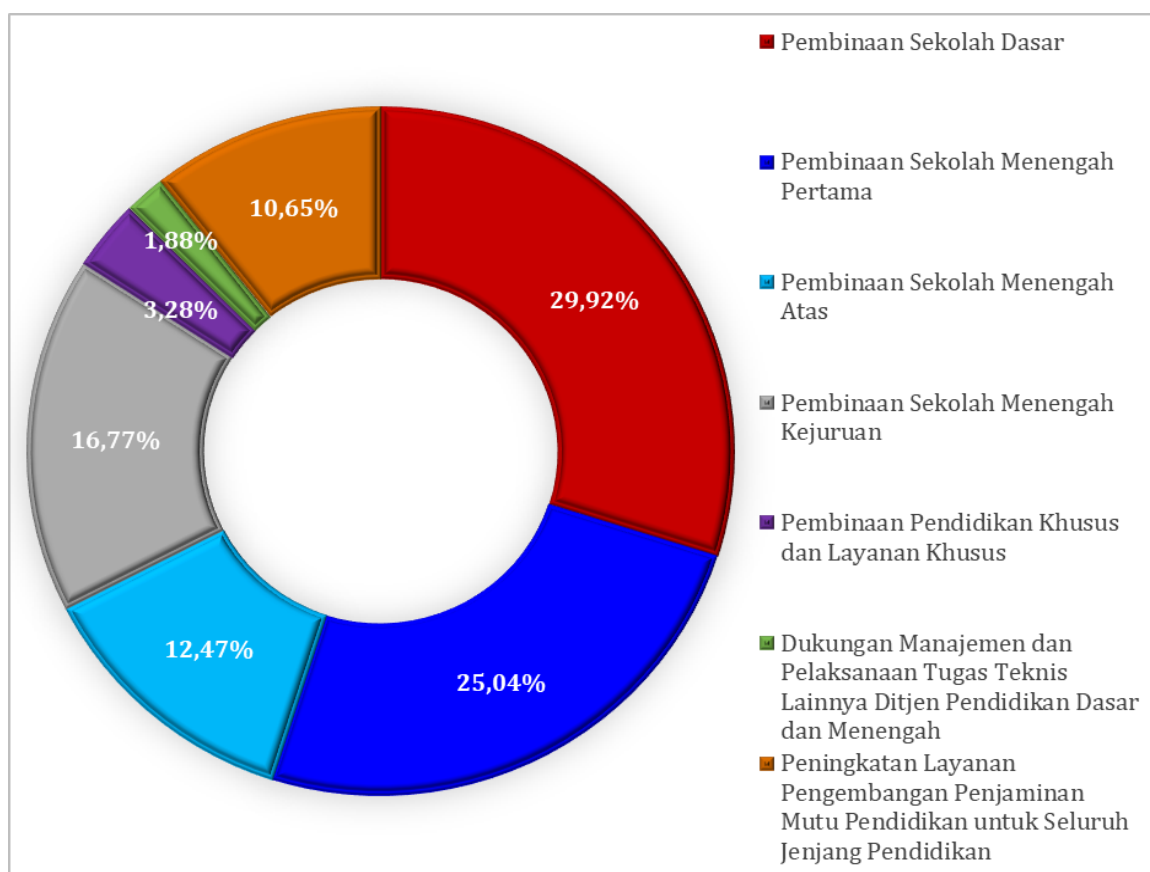
C. Pencapaian Kinerja Keuangan

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam DIPA Tahun 2017 sebesar Rp. 22.478.361.054.000. Pagu tersebut dilaksanakan untuk membiayai pencapaian 8 sasaran program dengan 29 indikator kinerja yang terdistribusi ke dalam 7 satuan kerja.

Grafik dibawah ini menyajikan presentase alokasi anggaran untuk masing-masing satker yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.



Bagan 44: Grafik persentase alokasi anggaran per Satker Tahun 2017



Dari grafik diatas menunjukkan bagwa anggaran terbesar dialokasikan untuk membiayai pembinaan sekolah dasar sebesar 29,92% dan pembinaan sekolah menengah pertama sebesar 25,04%. Untuk pembinaan sekolah menengah kejuruan mendapatkan alokasi sebesar 16,77%; pembinaan sekolah menengah atas mendapatkan alokasi anggaran sebesar 12,47%; pembinaan Pendidikan khusus dan layanan khusus mendapatkan alokasi sebesar 3,28%; dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen pendidikan dasar dan menengah mendapatkan alokasi sebesar 1,88%; dan peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan mendapatkan alokasi sebesar 10,65%.



Berikut tabel sandingan realisasi anggaran tahun 2016 dan 2017 pada tujuh satuan kerja di lingkungan Ditjen Dikdasmen sebagai berikut :

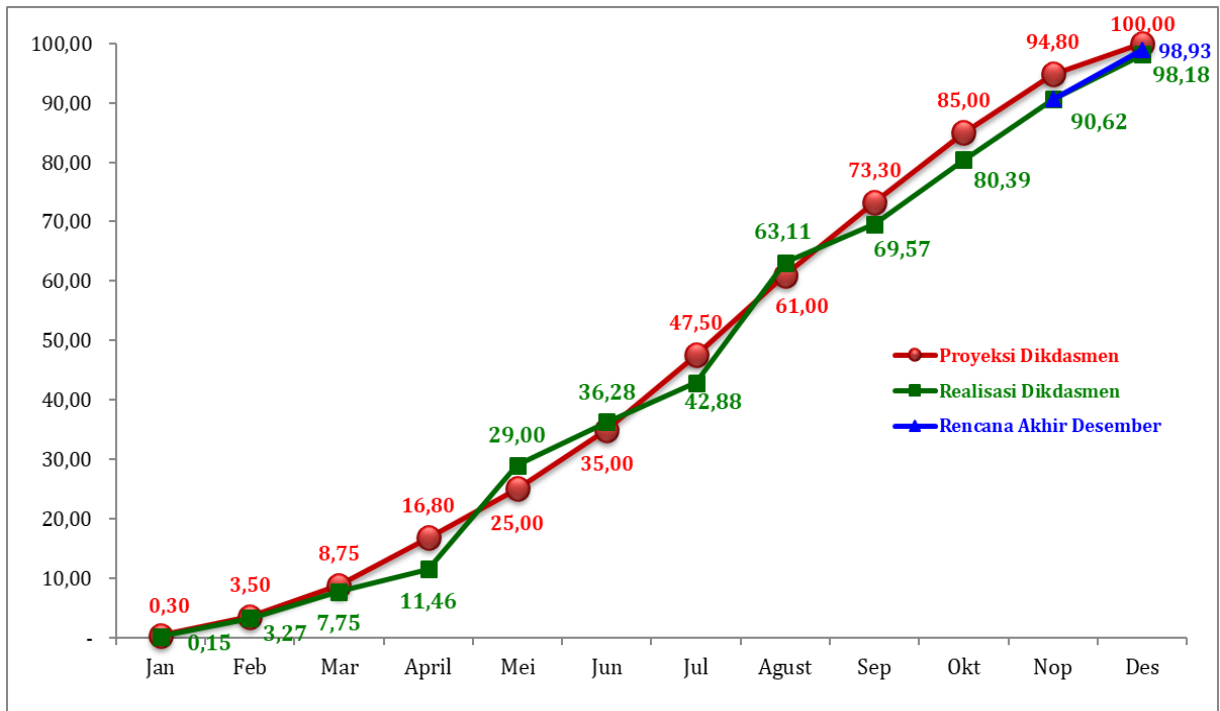
KODE	SATKER	REALISASI TAHUN 2016	2017			%
			PAGU AWAL	APBNP	REALISASI	
23	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	21.876.724.060.000	22.502.836.627.000	21.938.319.454.000	21.539.460.802.530	98,18
2003	Direktorat Pembinaan SD	5.637.400.705.000	6.732.407.618.000	6.563.183.080.000	6.415.101.312.491	97,74
2000	Direktorat Pembinaan SMP	5.100.525.614.000	5.435.681.165.000	5.492.883.324.000	5.473.188.898.435	99,64
5627	Direktorat Pembinaan SMA	3.580.931.037.000	2.823.691.972.000	2.735.025.024.000	2.695.902.073.445	98,57
5628	Direktorat Pembinaan SMK	4.483.301.250.000	3.714.359.670.000	3.679.132.854.000	3.549.552.791.539	99,44
5626	Direktorat Pembinaan PKLK	620.580.542.000	801.721.308.000	719.380.581.000	703.045.160.736	97,73
2005	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	267.090.203.000	441.313.807.000	413.213.807.000	382.640.069.799	92,60
5630	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)	1.752.632.217.000	2.553.661.087.000	2.335.500.784.000	2.215.068.478.753	94,84

Total pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 22.502.836.627.000, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementrian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017, dilakukan perubahan anggaran menjadi Rp. 21.938.319.454.000 telah berhasil terserap sebesar Rp. 21.539.460.802.530 sehingga persentase daya serap Ditjen Dikdasmen tahun 2017 sebesar 98,18%.

Berikut grafik daya serap anggaran tahun 2017 yang dilaksanakan oleh 7 satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

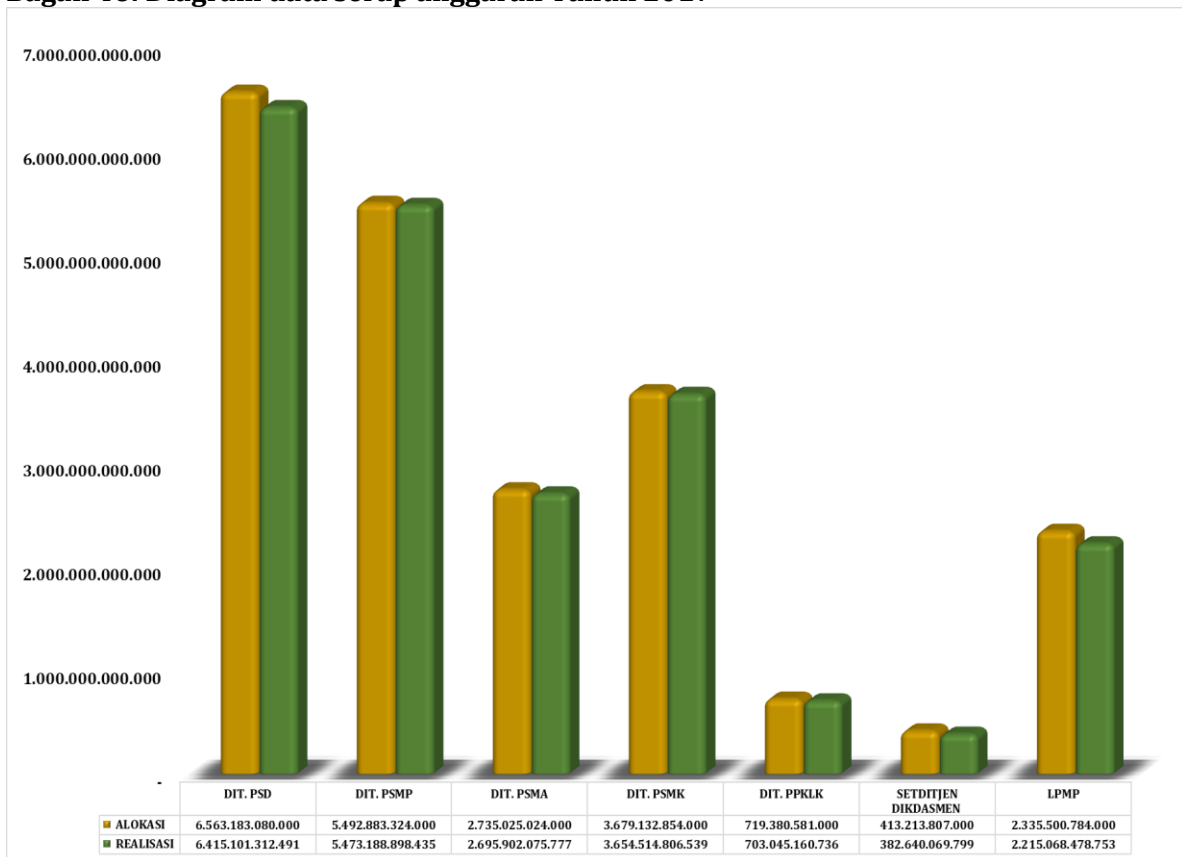


Bagan 45: Grafik daya serap anggaran Tahun 2017



Berikut diagram daya serap anggaran tahun 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Bagan 46: Diagram data serap anggaran Tahun 2017



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk sasaran strategis meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah yang meliputi APK SD/SDLB, APM SD/SDLB, APK SMP/SMPLB, APM SMP/SMPLB, APK SMA/SMK/SMLB, APM SMA/SMK/SMLB tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan intervensi yang dilakukan seperti pembangunan USB, RKB, Renovasi Sekolah, Rehabilitasi ruang kelas tidak mampu memenuhi kebutuhan.
2. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah secara umum sudah sesuai dengan program rencana kerja yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan oleh kinerja keuangan yang mencapai 98,18%. Namun demikian kinerja keuangan ini tidak secara langsung dapat mendukung pencapaian indikator kinerja program (IKP) sebagaimana tertuang di dalam RKP dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal. Beberapa IKP terkait dengan ketersediaan akses dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah tidak mencapai target 100%.
3. Penyusunan capaian kinerja organisasi masih terkendala oleh tersendatnya arus data dan informasi dari pengelola kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan penganggaran pada awal tahun anggaran yang berdampak pada pergeseran target sasaran tahun 2017. Perubahan anggaran ini terjadi pula pada program prioritas nasional yaitu pembinaan pendidikan karakter. Dengan demikian beberapa sasaran pendidikan karakter tidak tercapai.
4. Salah satu indikator peningkatan mutu layanan dan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah pemenuhan 8 aspek standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan pemetaan mutu pendidikan yang dilakukan pada tahun 2017, sebagian besar satuan pendidikan pada kategori 2 dan 3 dari skor tertinggi 5. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya mewujudkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah yang menjadi urusan wajib daerah.



B. Rekomendasi

1. Dalam perencanaan dan penganggaran diharapkan memperhitungkan target rencana strategis agar sasaran yang telah ditetapkan terpenuhi.
2. Untuk meningkatkan efektifitas kinerja lembaga sasaran dan program kegiatan/output kinerja disusun untuk memenuhi target kinerja program (IKP). Dengan demikian kinerja keuangan berbanding lurus dengan kinerja program.
3. Peningkatan kualitas kinerja dapat dicapai antara lain melalui sistem pengendalian program dan kegiatan secara periodik untuk mengukur ketepatan input proses dan sasaran yang ingin dicapai, pengendalian dapat efektif jika ada pedoman pemantauan dan evaluasi kinerja program dan sasaran sebagai acuan. Oleh karena itu setiap komponen pendukung kinerja berpegang pada sistem dan mekanisme pelaporan yang ada.
4. Sosialisasi dan publikasi terhadap hasil pengukuran kinerja pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah sebaiknya dapat dilakukan oleh Ditjen Dikdasmen untuk mendorong daerah memenuhi urusan wajibnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pengelolaan pendidikan yang efektif.



LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja 2017



Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

TUGAS

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan dasar dan menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumber daya, pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan kerja sama penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing, penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus dan daerah tertinggal (pendidikan layanan khusus), dan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah;
3. Fasilitasi pembangunan *teaching factory dan technopark* di lingkungan Sekolah Menengah kejuruan;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dasar dan menengah;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan dasar dan menengah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar dan menengah
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



TARGET CAPAIAN

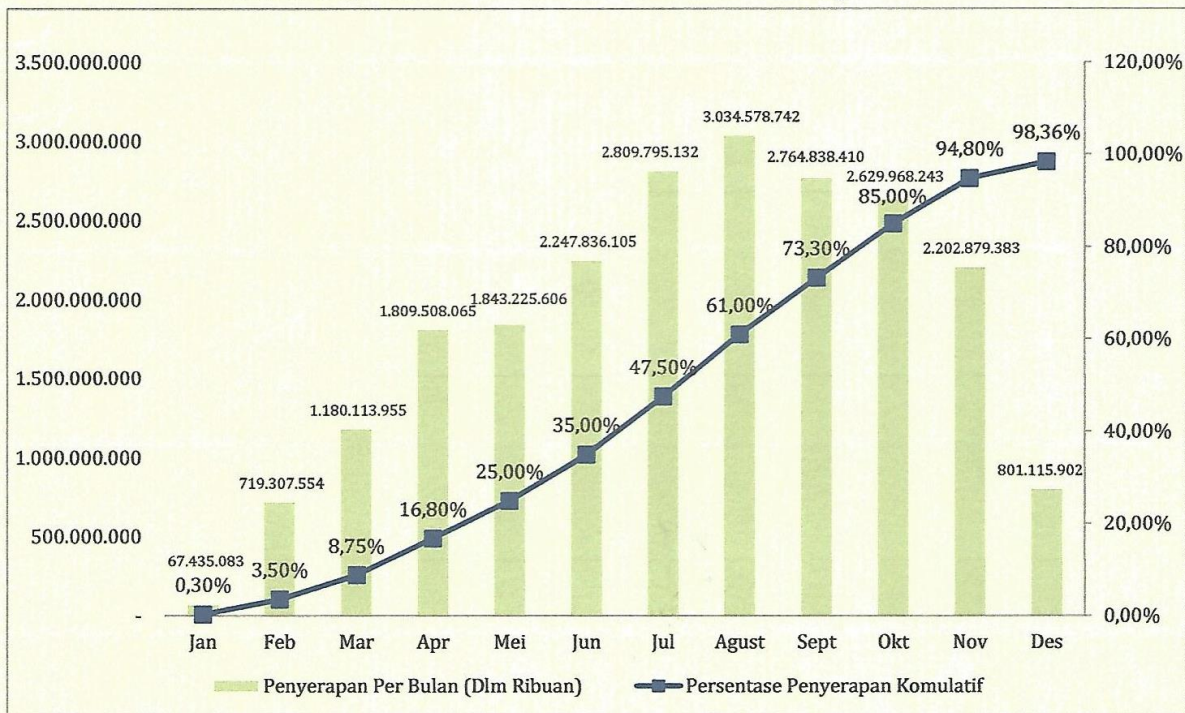
Program Pendidikan Dasar dan Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	Pemenuhan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar Yang Berkualitas	1. APM SD/SDLB	82,88%	12.823.721.945.000,- 6.557.340.000.000,-
		2. APK SD/SDLB/Paket A	98,02%	
		3. Angka putus sekolah SD	1,00%	
		4. APM SMP/SMPLB	73,07%	
		5. APK SMP/SMPLB/PAKET B	82,40%	
		6. Angka putus sekolah SMP	1,08%	
		7. Angka melanjutkan SD/MI ke SMP	84,95%	
		8. Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar penerima bantuan melalui KIP	15.380.582	
		9. Rasio APM perempuan:laki-laki di SD	100%	
		10. Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP	100%	
2	Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB/Paket C	1. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C	82,15%	2.261.050.000.000,-
		2. Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	84,00%	
		3. Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA/SMK	100%	
3	Persentase angka putus sekolah SMA/SMK/SMLB/Paket C	1. Jumlah siswa jenjang pendidikan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar	3.856.899	
		2. Angka putus sekolah SMA/SMK	1,00%	
4	Sekolah menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 sekolah menengah	88,30%	
5	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1. Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B	15,300	
		2. Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter)	Baik	
		3. Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah	152	
		4. Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	24,00%	
		5. Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	37,00%	
		6. Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	61,35%	
		7. Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	75,13%	
		8. SM menerapkan program penyalarsan dengan dunia kerja	45,00%	
6	Jumlah sekolah menengah rujukan/model di setiap kabupaten/kota	1. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah Rujukan/Model	70,50%	271.628.087.000,-
		2. Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B	75,00%	
7	Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP	52,00%	
8	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik	1. Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru	89,00%	
		2. Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen	77,00	



Jumlah alokasi anggaran program pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp.22.478.361.054.000,- (Dua puluh dua triliun empat ratus tujuh delapan puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah)

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2017
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Penyerapan Kumulatif (Dlm Ribuan)	67.435.083	786.742.637	1.966.856.592	3.776.364.657	5.619.590.264	7.867.426.369	10.677.221.501	13.711.800.243	16.476.638.653	19.106.606.896	21.309.486.279	22.110.602.181
Penyerapan Per Bulan (Dlm Ribuan)	67.435.083	719.307.554	1.180.113.955	1.809.508.065	1.843.225.606	2.247.836.105	2.809.795.132	3.034.578.742	2.764.838.410	2.629.968.243	2.202.879.383	801.115.902
Persentase	0,30%	3,50%	8,75%	16,80%	25,00%	35,00%	47,50%	61,00%	73,30%	85,00%	94,80%	98,36%

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P

Jakarta, 23 Januari 2017
Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D.



Realisasi Anggaran per Satker

1. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

Nama Kegiatan / Output	Volume Output				Anggaran			
	Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Sisa	
[2003] Pembinaan Sekolah Dasar				100,05	6.563.183.080.000	6.415.101.312.491	97,74	148.081.767.509
[2003.001] Siswa yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Siswa	10.360.614	10.362.746	100,02	4.264.018.668.000	4.245.407.324.196	99,56	18.611.343.804
[2003.002] Unit Sekolah Baru yang Dibangun	Unit	10	11	110,00	21.643.705.000	20.373.998.500	94,13	1.269.706.500
[2003.005] Ruang Kelas Baru yang Dibangun	Ruang	200	200	100,0	34.846.805.000	34.617.483.849	99,34	229.321.151
[2003.006] Ruang Belajar yang Direhabilitasi	Ruang	14.518	16.002	110,22	1.400.422.402.000	1.311.356.473.878	93,64	89.065.928.122
[2003.007] Sekolah yang Direnovasi	Sekolah	84	101	120,24	104.768.550.000	104.390.300.900	99,64	378.249.100
[2003.008] Ruang Perpustakaan yang Dibangun	Ruang	390	424	108,72	65.699.270.000	65.410.369.428	99,56	288.900.572
[2003.013] Sekolah yang Dibina Menjadi Sekolah Rujukan	Sekolah	514	490	95,33	14.674.784.000	13.547.729.758	92,32	1.127.054.242
[2003.014] Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Siswa	32.896	38.242	116,25	12.744.257.000	11.146.766.400	87,47	1.597.490.600
[2003.015] Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Prestasi	Siswa	6.367	1.737	27,28	7.688.520.000	5.628.458.500	73,21	2.060.061.500
[2003.016] Siswa yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Siswa	1.546	1.546	100,00	43.408.222.000	36.805.649.592	84,79	6.602.572.408
[2003.017] Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler	Sekolah	1.542	1.542	100,00	14.440.656.000	13.215.786.249	91,52	1.224.869.751
[2003.018] Sekolah yang Mendapatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Sekolah	514	543	105,64	13.216.260.000	11.708.136.400	88,59	1.508.123.600
[2003.019] Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum 2013	Sekolah	51.000	51.527	101,03	20.904.276.000	17.810.446.375	85,20	3.093.829.625
[2003.020] Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan	Paket	3.446	4.191	121,62	237.013.325.000	236.029.307.813	99,58	984.017.187
[2003.022] Sekolah yang Melaksanakan Program UKS	Sekolah	315	315	100,00	24.207.275.000	23.383.721.800	96,60	823.553.200



Nama Kegiatan / Output	Volume Output				Anggaran			
	Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi		Sisa
[2003.030] Siswa yang Mendapatkan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS)	Siswa	100.000	100.000	100,00	199.071.478.000	195.851.595.726	98,38	3.219.882.274
[2003.950] Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	514	514	100,00	38.325.752.000	30.909.406.914	80,65	7.416.345.086
[2003.951] Layanan Internal (Overhead)	Layanan	5	5	100,00	14.923.350.000	13.172.490.950	88,27	1.750.859.050
[2003.994] Layanan Perkantoran	Bulan	12	12	100,00	31.165.525.000	24.335.865.263	78,09	6.829.659.737

2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Nama Kegiatan / Output	Volume Output				Anggaran			
	Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi		Sisa
[2000] Pembinaan Sekolah Menengah Pertama				101,82	5.492.883.324.000	5.473.188.898.435	99,64	19.694.425.565
[2000.001] Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Siswa	4.369.968	4.451.158	102	2.718.698.178.000	2.718.677.786.500	100	20.391.500
[2000.002] Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Unit	50	50	100	125.774.118.000	125.391.505.796	99,70	382.612.204
[2000.005] Ruang Kelas Baru Yang Dibangun	Ruang	300	300	100	52.159.020.000	52.138.716.550	99,96	20.303.450
[2000.006] Ruang Belajar Yang Direhabilitasi	Ruang	16.315	17.129	105	1.144.071.126.000	1.144.029.373.550	100	41.752.450
[2000.007] Sekolah Yang Direnovasi	Sekolah	100	101	101	147.564.620.000	147.419.043.938	98,86	1.676.237.194
[2000.008] Ruang Perpustakaan Yang Dibangun	Ruang	350	350	100	101.224.749.000	101.138.981.950	99,92	85.767.050
[2000.009] Ruang Laboratorium Yang Dibangun	Ruang	440	440	100	142.697.398.000	142.636.714.400	99,96	60.683.600
[2000.011] Ruang Penunjang Lainnya Yang Dibangun	Ruang	100	100	100	26.702.379.000	26.640.589.000	99,77	61.790.000
[2000.012] Ruang Penunjang Lainnya Yang Direhabilitasi	Ruang	1.415	1.415	100	148.986.519.000	148.972.023.500	99,99	14.495.500
[2000.013] Sekolah Yang Dibina Menjadi Sekolah Rujukan	Sekolah	514	514	100	69.628.000.000	69.620.017.490	99,94	44.070.104
[2000.014] Siswa Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Siswa	3.566	3.566	100	6.175.400.000	6.147.144.875	99,54	28.255.125



Nama Kegiatan / Output	Volume Output				Anggaran			
	Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Sisa	
[2000.015] Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Siswa	2.800	2.652	94,71	8.810.900.000	8.366.895.300	94,96	444.004.700
[2000.016] Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Siswa	3.737	2.098	56,14	47.532.542.000	47.530.500.700	99,99	3.666.050
[2000.017] Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler	Sekolah	100	99	99	6.895.850.000	6.845.328.250	99,27	50.521.750
[2000.018] Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Sekolah	771	771	100	28.214.903.000	28.187.012.334	99,90	27.890.666
[2000.019] Sekolah Yang Melaksanakan Kurikulum Yang Berlaku	Sekolah	13.911	13.900	99,92	12.503.323.000	12.495.663.116	99,94	7.659.884
[2000.020] Sekolah Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan	Paket	5.877	6.124	104,20	540.845.108.000	524.238.401.060	96,93	16.606.706.940
[2000.021] Sekolah Berbasis Pesantren/Komunitas	Sekolah	375	262	69,87	13.980.380.000	13.923.093.760	99,59	57.286.240
[2000.030] SD-SMP Satu Atap yang dibangun	Unit	50	50	100	53.355.060.000	53.349.819.028	99,99	5.240.972
[2000.031] SD-SMP Satu Atap Yang Mendapatkan Bantuan Pembinaan	Sekolah	500	500	100	34.263.684.000	34.260.234.310	99,99	3.449.690
[2000.950] Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	7	7	100	39.413.821.000	39.154.087.609	99,34	259.733.391
[2000.951] Layanan Internal (Overhead)	Layanan	2	2	100	3.225.000.000	3.211.385.841	99,58	13.614.159
[2000.994] Layanan Perkantoran	Bulan	12	12	100	20.161.246.000	18.441.841.472	91,47	1.719.404.528

3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Nama Kegiatan / Output	Volume Output				Anggaran			
	Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Sisa	
[5627] Pembinaan Sekolah Menengah Atas				110,33	2.649.670.363.000	2.612.918.056.777	98,61	36.752.306.223
[5627.001] Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Siswa	1.375.458	1.520.422	110,54	1.257.844.629.000	1.256.737.951.116	99,91	1.106.677.884
[5627.002] Unit Sekolah Baru yang dibangun	Unit	70	70	100	176.217.330.000	175.035.915.450	99,33	1.181.414.550



Nama Kegiatan / Output	Volume Output				Anggaran			
	Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Sisa	
[5627.005] Ruang Kelas Baru yang dibangun	Ruang	1.000	1.024	102,4	202.951.066.000	202.733.820.100	99,89	217.245.900
[5627.006] Ruang Belajar yang direhabilitasi	Ruang	5.598	5.281	94,34	286.182.670.000	270.792.227.770	94,62	15.390.442.230
[5627.007] Sekolah yang direnovasi	Sekolah	110	103	93,64	53.393.291.000	52.760.006.200	98,81	633.284.800
[5627.008] Ruang Perpustakaan yang dibangun	Ruang	351	351	100	92.429.238.000	91.126.900.400	98,59	1.302.337.600
[5627.009] Ruang Laboratorium yang dibangun	Ruang	450	467	103,78	95.100.000.000	94.372.690.600	99,24	727.309.400
[5627.011] Ruang penunjang lainnya yang dibangun	Ruang	181	181	100	18.509.570.000	18.465.440.000	99,76	44.130.000
[5627.013] Sekolah yang dibina menjadi Sekolah Rujukan	Sekolah	614	613	99,84	87.641.885.000	87.117.114.400	99,40	524.770.600
[5627.014] Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Siswa	5.000	5.394	107,88	19.130.488.000	18.000.650.065	94,09	1.129.837.935
[5627.015] Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Siswa	3.346	2.399	71,70	8.251.440.000	8.222.728.565	99,65	28.711.435
[5627.016] Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	Siswa	3.346	3.346	100	112.528.832.000	111.740.460.690	99,30	788.371.310
[5627.018] Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Sekolah	3.557	3.557	100	16.754.140.000	15.424.022.370	92,06	1.330.117.630
[5627.019] Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013	Sekolah	8.012	9.398	117,30	24.692.700.000	23.582.723.819	95,50	1.109.976.181
[5627.020] Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan	Paket	1.979	2.012	101,67	101.272.620.000	100.879.356.600	99,61	393.263.400
[5627.022] Sekolah yang melaksanakan Program UKS	Sekolah	64	64	100	164.925.000	163.129.650	98,91	1.795.350
[5627.023] Sekolah Yang Mendapatkan Program Keterampilan/Kewirausahaan	Sekolah	204	204	100	22.480.040.000	22.179.139.100	98,66	300.900.900
[5627.950] Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	76	76	100	50.011.368.000	44.790.268.783	89,56	5.221.099.217
[5627.951] Layanan Internal (Overhead)	Layanan	3	3	100	3.684.960.000	3.100.017.182	84,13	584.942.818
[5627.994] Layanan Perkantoran	Bulan	12	12	100	20.429.171.000	15.693.493.917	76,82	4.735.677.083



4. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Nama Kegiatan / Output	Volume Output				Anggaran			
	Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Sisa	
[5628] Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan				100,53	3.569.464.283.000	3.549.552.791.539	99,44	19.911.491.461
[5628.001] Siswa yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Siswa	1.879.617	1.879.617	100	1.320.566.614.000	1.320.193.184.828	99,97	373.429.172
[5628.002] Unit Sekolah Baru yang dibangun	Unit	61	61	100	185.890.820.000	185.514.781.270	99,80	376.038.730
[5628.005] Ruang Kelas Baru yang dibangun	Ruang	1.029	1.000	97,2	206.298.638.000	206.275.799.275	99,99	22.838.725
[5628.006] Ruang Belajar yang direhabilitasi	Ruang	3.314	3.314	100	170.488.255.000	170.373.238.500	99,93	115.016.500
[5628.008] Ruang Perpustakaan yang dibangun	Ruang	200	208	104	53.417.002.000	53.386.289.500	99,94	30.712.500
[5628.010] Ruang Praktik Siswa/ Keterampilan yang dibangun	Ruang	1.299	1.251	96,3	333.231.340.000	332.702.502.000	99,84	528.838.000
[5628.013] Sekolah yang dibina menjadi Sekolah Rujukan	Sekolah	100	100	100	76.623.463.000	76.383.619.607	99,69	239.843.393
[5628.014] Siswa yang mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Siswa	1.704	1.200	70,42	5.950.622.000	5.082.604.470	85,41	868.017.530
[5628.015] Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Siswa	12.931	17.550	135,7	18.710.543.000	18.661.647.450	99,74	48.895.550
[5628.016] Siswa yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Siswa	3.630	3.630	100	77.866.258.000	76.117.421.474	97,75	1.748.836.526
[5628.018] Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Sekolah	100	233	233	34.185.206.000	26.041.380.553	76,18	8.143.825.447
[5628.019] Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum 2013	Sekolah	2.500	4.854	194,2	29.862.758.000	29.602.867.460	99,13	259.890.540
[5628.020] Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan	Paket	3.883	7.445	191,7	542.666.988.000	541.805.187.450	99,84	861.800.550
[5628.021] Sekolah Berbasis Pesantren/ Komunitas	Sekolah	175	175	100	109.024.731.000	109.015.931.000	99,99	8.800.000
[5628.030] SMK Kelautan yang Mendukung Kemaritiman	Sekolah	50	50	100	40.286.290.000	40.267.230.000	99,95	19.060.000
[5628.031] SMK Pariwisata yang Mendukung Industri Pariwisata	Sekolah	50	50	100	40.286.290.000	40.258.440.000	99,93	27.850.000
[5628.032] SMK Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan	Sekolah	100	100	100	80.510.100.000	80.492.810.000	99,98	17.290.000



Nama Kegiatan / Output	Volume Output				Anggaran			
	Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Sisa	
[5628.033] SMK yang Bekerjasama dengan Industri	Sekolah	1.540	1.540	100	74.651.737.000	73.661.360.426	98,67	990.376.574
[5628.034] SMK yang Melakukan Penyeragaman Kejuruan	Sekolah	1.280	1.280	100	23.153.302.000	21.659.890.526	93,55	1.493.411.474
[5628.035] SMK yang Melaksanakan Teaching Factory/ Technopark	Sekolah	220	220	100	67.311.441.000	66.636.144.983	99,00	675.296.017
[5628.950] Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	12	12	100	59.020.477.000	57.973.180.382	98,23	1.047.296.618
[5628.994] Layanan Perkantoran	Bulan	12	12	100	19.461.408.000	17.447.280.385	89,65	2.014.127.615

5. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Nama Kegiatan / Output	Volume Output				Anggaran			
	Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Sisa	
[5626] Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus				110,36	631.807.568.000	619.843.602.772	98,11	11.963.965.228
[5626.002] Unit Sekolah Baru yang Dibangun	Unit	11	8	72,73	36.787.858.000	36.684.196.200	99,72	103.661.800
[5626.004] Asrama Sekolah yang dibangun	Unit	3	3	100	1.995.000.000	1.982.800.000	99,39	12.200.000
[5626.005] Ruang Kelas Baru yang dibangun	Ruang	125	126	100,8	15.515.000.000	15.466.574.000	99,69	48.426.000
[5626.006] Ruang Belajar yang direhabilitasi	Ruang	504	504	100	26.456.236.000	26.456.229.000	100	7.000
[5626.007] Sekolah yang direnovasi	Sekolah	11	11	100	3.515.000.000	3.503.000.000	99,66	12.000.000
[5626.008] Ruang Perpustakaan yang dibangun	Ruang	20	20	100	5.415.000.000	5.403.000.000	99,78	12.000.000
[5626.013] Sekolah yang dibina menjadi Sekolah Rujukan	Sekolah	40	40	100	3.015.000.000	3.014.700.000	99,99	300.000
[5626.014] Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Siswa	210	198	94,29	1.066.130.000	1.001.141.200	93,90	64.988.800
[5626.016] Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	Siswa	2.058	2.161	105	17.750.385.000	17.270.610.970	97,30	479.774.030
[5626.017] Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler	Sekolah	80	158	197,5	1.436.400.000	1.419.226.200	98,80	17.173.800
[5626.019] Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013	Sekolah	2.018	2.190	108,52	48.091.617.000	43.795.610.710	91,07	4.296.006.290



Nama Kegiatan / Output	Volume Output				Anggaran			
	Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Sisa	
[5626.020] Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan	Sekolah	220	700	318,18	60.115.000.000	60.103.000.000	99,98	12.000.000
[5626.030] Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) yang mendapatkan bantuan pembinaan	Sekolah	14	13	92,86	25.655.159.000	24.791.452.000	96,63	863.707.000
[5626.031] Sekolah PKLK yang menerima bantuan operasional	Sekolah	2.363	2.150	102,38	43.285.000.000	43.267.500.000	99,96	17.500.000
[5626.032] Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial	Sekolah	137	138	100,73	16.752.224.000	16.663.327.790	99,47	88.896.210
[5626.033] Siswa membutuhkan khusus penerima bantuan	Siswa	135.699	151.245	111,46	240.664.200.000	240.520.654.600	99,94	143.545.400
[5626.034] Siswa Penerima Program Pendidikan Layanan Khusus	Siswa	2.100	2.150	102,38	13.912.940.000	13.861.055.675	99,63	51.884.325
[5626.035] Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	Sekolah	447	112	25,06	7.378.963.000	7.329.910.000	99,34	49.053.000
[5626.036] Sekolah Garis Depan yang mendapatkan bantuan pengembangan	Sekolah	2	1	50	1.739.630.000	1.511.103.000	86,86	228.527.000
[5626.037] Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif	Sekolah	810	210	25,93	7.782.971.000	7.728.345.100	99,30	54.625.900
[5626.950] Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	3	3	100	22.812.940.000	21.725.953.825	95,24	1.086.986.175
[5626.951] Layanan Internal (Overhead)	Layanan	5	5	100	2.651.219.000	2.194.889.325	82,79	456.329.675
[5626.994] Layanan Perkantoran	Bulan	12	12	100	28.013.696.000	24.149.323.177	86,21	3.864.372.823

6. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Nama Kegiatan / Output	Volume Output				Anggaran			
	Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Sisa	
[2005] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah				104,26	413.213.807.000	382.640.069.799	92,60	30.573.737.201
[2005.001] Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang Terbina	Lembaga	532	532	100	5.500.000.000	5.447.448.230	99,04	52.551.770
[2005.003] Sekolah yang menerapkan pendidikan karakter bangsa	Sekolah	395	436	110,4	12.900.000.000	12.481.286.500	96,75	418.713.500



Nama Kegiatan / Output	Volume Output				Anggaran			
	Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi		Sisa
[2005.950] Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	12	12	100	173.532.486.000	167.702.612.101	96,64	5.829.873.899
[2005.951] Layanan Internal (Overhead)	Layanan	12	12	100	6.281.321.000	5.581.567.935	88,86	699.753.065
[2005.994] Layanan Perkantoran	Bulan	12	12	100	215.000.000.000	191.427.155.033	89,04	23.572.844.967

7. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pendidikan (LPMP)

SATKER	ALOKASI	REALISASI	%
DKI JAKARTA	70.158.504.000	66.979.344.320	95,47
JAWA BARAT	235.258.062.000	229.688.968.009	97,63
JAWA TENGAH	177.052.350.000	174.917.216.587	98,79
D.I. YOGYAKARTA	41.343.467.000	39.443.974.989	95,41
JAWA TIMUR	200.426.946.000	192.542.478.510	96,07
ACEH	60.156.704.000	54.269.524.699	90,21
SUMATERA UTARA	134.506.170.000	125.240.928.491	93,11
SUMATERA BARAT	64.579.879.000	58.832.033.520	91,10
RIAU	54.018.559.000	52.499.080.525	97,19
JAMBI	43.179.356.000	38.682.047.406	89,58
SUMATERA SELATAN	89.544.103.000	81.326.248.502	90,82
LAMPUNG	70.986.041.000	68.524.958.878	96,53
KALIMANTAN BARAT	68.960.585.000	65.312.550.108	94,71
KALIMANTAN TENGAH	45.002.475.000	43.868.873.651	97,48
KALIMANTAN SELATAN	39.874.824.000	36.531.577.292	91,62
KALIMANTAN TIMUR	66.453.561.000	63.792.415.078	96,00
SULAWESI UTARA	44.981.837.000	43.915.091.049	97,63
SULAWESI TENGAH	53.803.673.000	51.968.901.095	96,59
SULAWESI SELATAN	90.321.399.000	85.124.854.255	94,25
SULAWESI TENGGARA	64.950.286.000	57.537.195.959	88,59
MALUKU	45.241.019.000	42.958.063.681	94,95



SATKER	ALOKASI	REALISASI	%
BALI	37.995.054.000	36.261.591.228	95,44
NUSA TENGGARA BARAT	58.256.381.000	45.501.489.035	78,11
NUSA TENGGARA TIMUR	79.494.025.000	75.268.737.661	94,68
PAPUA	74.962.110.000	70.783.123.362	94,43
BENGKULU	40.278.416.000	37.439.115.846	92,95
MALUKU UTARA	48.143.584.000	47.275.973.633	98,20
BANTEN	66.597.992.000	63.039.607.378	94,66
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	21.773.179.000	19.927.080.372	91,52
GORONTALO	24.876.141.000	24.412.318.500	98,14
KEPULAUAN RIAU	36.508.347.000	34.541.202.924	94,61
PAPUA BARAT	42.071.626.000	41.641.669.449	98,98
SULAWESI BARAT	43.744.129.000	41.314.152.359	94,45
TOTAL	2.335.500.784.000	2.211.362.388.351	94,68

8. Dekonsentrasi

SATKER	PKLK		SMA		SMK		TOTAL		%
	ALOKASI	REALISASI	ALOKASI	REALISASI	ALOKASI	REALISASI	ALOKASI	REALISASI	
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA	1.062.486.000	1.028.400.700	2.871.876.000	2.739.998.102	3.567.176.000	3.489.244.050	7.501.538.000	7.257.642.852	96,75
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT	8.153.556.000	8.124.421.000	7.303.183.000	7.234.897.000	10.460.376.000	10.127.973.800	25.917.115.000	25.487.291.800	98,34
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH	7.391.386.000	7.125.021.600	4.314.813.000	4.139.042.500	7.392.287.000	7.031.857.980	19.098.486.000	18.295.922.080	95,80
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3.582.188.000	3.555.998.800	1.489.138.000	1.469.264.100	2.314.785.000	2.197.544.515	7.386.111.000	7.222.807.415	97,79
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAWA TIMUR	12.523.146.000	11.987.276.070	7.141.617.000	7.033.767.950	7.450.690.000	7.444.488.350	27.115.453.000	26.465.532.370	97,60
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	2.866.834.000	2.814.174.500	2.766.566.000	2.676.691.100	2.585.180.000	2.478.217.050	8.218.580.000	7.969.082.650	96,96
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	1.581.061.000	1.355.159.600	4.766.981.000	4.582.671.400	4.520.575.000	3.943.249.000	10.868.617.000	9.881.080.000	90,91
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	5.008.612.000	4.251.231.000	2.078.089.000	2.076.670.700	2.430.279.000	2.347.866.600	9.516.980.000	8.675.768.300	91,16
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU	1.085.789.000	984.756.790	2.115.647.000	2.104.107.800	2.561.323.000	2.174.430.500	5.762.759.000	5.263.295.090	91,33
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI	879.134.000	806.120.000	1.564.037.000	1.199.343.300	2.149.957.000	1.891.404.000	4.593.128.000	3.896.867.300	84,84
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.064.854.000	894.877.000	2.877.496.000	2.853.219.300	2.631.126.000	2.521.238.150	6.573.476.000	6.269.334.450	95,37
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI LAMPUNG	1.037.206.000	1.029.014.900	2.613.424.000	2.598.353.800	2.864.774.000	2.838.124.268	6.515.404.000	6.465.492.968	99,23
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1.015.022.000	894.235.150	2.266.475.000	2.265.899.700	2.360.429.000	2.187.084.600	5.641.926.000	5.347.219.450	94,78



SATKER	PKLK		SMA		SMK		TOTAL		%
	ALOKASI	REALISASI	ALOKASI	REALISASI	ALOKASI	REALISASI	ALOKASI	REALISASI	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.076.220.000	1.073.994.000	1.657.955.000	1.657.308.500	2.086.765.000	2.085.873.500	4.820.940.000	4.817.176.000	99,92
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	967.237.000	871.254.956	1.529.142.000	1.403.485.600	2.158.646.000	1.897.540.050	4.655.025.000	4.172.280.606	89,63
DINAS DIKNAS PROP.KAL-TIM	1.041.333.000	1.041.066.000	1.918.427.000	1.918.425.800	2.663.385.000	2.242.486.196	5.623.145.000	5.201.977.996	92,51
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	4.137.506.000	3.532.215.600	1.702.106.000	1.700.928.000	2.601.839.000	2.583.070.000	8.441.451.000	7.816.213.600	92,59
DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.091.217.000	1.075.867.450	1.736.745.000	1.555.569.400	2.681.607.000	2.667.505.617	5.509.569.000	5.298.942.467	96,18
DINAS PENDIDIKAN PROV SULAWESI SELATAN	1.405.882.000	1.344.020.000	3.430.552.000	3.329.310.500	3.613.598.000	3.443.586.000	8.450.032.000	8.116.916.500	96,06
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.149.485.000	1.134.185.000	1.803.183.000	1.681.403.000	2.471.469.000	2.460.069.000	5.424.137.000	5.275.657.000	97,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU	1.282.103.000	1.282.062.000	2.742.898.000	2.739.982.000	3.118.724.000	3.111.354.000	7.143.725.000	7.133.398.000	99,86
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI	5.454.300.000	5.015.175.000	1.516.105.000	1.491.485.800	3.223.749.000	3.073.976.950	10.194.154.000	9.580.637.750	93,98
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.141.689.000	1.106.872.420	1.975.991.000	1.968.615.000	2.834.907.000	2.751.057.600	5.952.587.000	5.826.545.020	97,88
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	4.841.795.000	4.706.373.500	3.527.155.000	3.291.358.200	3.629.759.000	3.582.633.464	11.998.709.000	11.580.365.164	96,51
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA	1.437.534.000	1.437.534.000	3.052.489.000	3.049.054.000	3.252.324.000	3.241.641.000	7.742.347.000	7.728.229.000	99,82
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU	1.042.245.000	1.037.743.000	1.300.229.000	1.295.618.726	2.113.002.000	1.798.430.200	4.455.476.000	4.131.791.926	92,74
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROPINSI MALUKU UTARA	1.123.291.000	1.123.291.000	1.918.652.000	1.918.652.000	2.678.823.000	2.646.064.000	5.720.766.000	5.688.007.000	99,43
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN	6.812.444.000	6.603.814.700	2.698.410.000	2.575.893.945	3.563.431.000	3.299.806.250	13.074.285.000	12.479.514.895	95,45
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	873.977.000	863.708.200	949.348.000	948.943.700	2.048.524.000	2.029.254.165	3.871.849.000	3.841.906.065	99,23
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLARHAGA PROVINSI GORONTALO	1.041.808.000	1.041.807.363	1.301.074.000	1.300.415.000	2.519.108.000	2.518.669.145	4.861.990.000	4.860.891.508	99,98
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	995.369.000	758.484.635	1.382.529.000	1.382.529.000	1.869.540.000	1.786.146.500	4.247.438.000	3.927.160.135	92,46
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA BARAT	1.355.720.000	1.322.205.000	2.481.586.000	2.472.144.000	3.124.516.000	2.715.791.000	6.961.822.000	6.510.140.000	93,51
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT	1.010.743.000	1.010.683.000	1.295.996.000	1.295.339.945	2.087.072.000	2.086.091.100	4.393.811.000	4.392.114.045	99,96
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.039.841.000	850.438.030	1.264.747.000	1.033.627.800	2.038.826.000	2.036.116.900	4.343.414.000	3.920.182.730	90,26
TOTAL	87.573.013.000	83.083.481.964	85.354.661.000	82.984.016.668	109.668.571.000	104.729.885.500	282.596.245.000	270.797.384.132	95,82



A. Definisi Operasional IKP

Untuk mengukur ketercapaian Indikator Kinerja Program maka dibuatlah Definisi Operasional IKP Ditjen Dikdasmen sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas.

Pemenuhan pelayanan pendidikan dasar dapat dicapai jika indikator terkait dengan penambahan akses untuk pendidikan yang bermutu dapat terpenuhi. Indikator tersebut berupa peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB dan APM SMP/SMPLB maupun APK SMP/SMPLB. Untuk mendapatkan pencapaian yang optimal dilakukan pula upaya sehingga dapat menjamin keberlangsungan peserta didik agar tidak *drop out (DO)*. Pencapaian kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana berikut ini:

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 1: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB 82,00%

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB adalah persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah pada satuan pendidikan SD/SDLB terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun.

b. Indikator Kinerja Program (IKP) 2: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB 97,65%

APK SD/SDLB adalah persentase perbandingan jumlah peserta didik segala umur pada jenjang SD/SDLB terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

c. Indikator Kinerja Program (IKP) 3: Angka Putus Sekolah (APtS) SD/SDLB 1,04%

Angka putus sekolah (APtS) SD/SDLB adalah persentase jumlah anak yang tidak melanjutkan sekolah sebelum lulus SD/SDLB terhadap jumlah siswa pada awal tahun pelajaran dibandingkan dengan jumlah siswa pada akhir tahun ajaran.

d. Indikator Kinerja Program (IKP) 4: Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB 72,69%

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB adalah persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada



satuan pendidikan SMP/SMPLB terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun.

e. Indikator Kinerja Program (IKP) 5: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB 81,89%

APK SMP/SMPLB adalah persentase perbandingan jumlah peserta didik segala umur pada jenjang SMP/SMPLB terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

f. Indikator Kinerja Program (IKP) 6: Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB (1,11%)

Angka putus sekolah (APTs) SMP/SMPLB adalah persentase jumlah anak yang tidak melanjutkan sekolah sebelum lulus SMP/SMPLB terhadap jumlah siswa pada awal tahun pelajaran dibandingkan dengan jumlah siswa pada akhir tahun ajaran.

g. Indikator Kinerja Program (IKP) 7: Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/SMPLB 83,64%

Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/SMPLB adalah persentase jumlah lulusan SD/MI yang melanjutkan pendidikan ke SMP/SMPLB.

h. Indikator Kinerja Program (IKP) 8: Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Penerima Bantuan Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) 15.380.582 Siswa.

Jumlah peserta didik SD/SDLB dan peserta didik SMP/SMPLB yang menjadi penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menerima manfaat dari Program Indonesia Pintar (PIP).

i. Indikator Kinerja Program (IKP) 9: Rasio APM perempuan: APM laki-laki di SD (100%)

Perbandingan APM peserta didik SD perempuan terhadap APM peserta didik SD laki-laki merupakan indikator yang menunjukkan persentase peserta didik perempuan SD/SDLB usia 7-12 tahun dibandingkan dengan persentase peserta didik laki-laki pada usia yang sama.

j. Indikator Kinerja Program (IKP) 10: Rasio APM perempuan: APM laki-laki di SMP (100%)

Perbandingan APM peserta didik SMP/SMPLB perempuan terhadap APM peserta didik SMP/SMPLB laki-laki merupakan indikator yang menunjukkan



persentase peserta didik perempuan SMP/SMPLB usia 7-12 tahun dibandingkan dengan persentase peserta didik laki-laki pada usia yang sama.

2. Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 11: APK SMA/SMK/SMLB (79,31%)

APK SMA/SMK/SMLB adalah persentase perbandingan jumlah peserta didik segala umur pada jenjang SMA/SMK/SMLB terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

b. Indikator Kinerja Program (IKP) 12: Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK (82%)

Angka melanjutkan SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMK adalah persentase jumlah lulusan SMP/SMPLB /MTs yang melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK/SMPLB.

c. Indikator Kinerja Program (IKP) 13: Rasio APK perempuan : APK laki-laki di SMA/ SMK (100%)

Perbandingan APK peserta didik SMA/SMK/SMLB perempuan terhadap APK peserta didik SMA/SMK/SMLB laki-laki merupakan indikator yang menunjukkan persentase peserta didik perempuan SMP/SMPLB usia 16-18 tahun dibandingkan dengan persentase peserta didik laki-laki pada usia yang sama.

3. Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SMLB

Angka putus sekolah (APTs) SMA/SMK/SMLB adalah persentase jumlah anak yang tidak melanjutkan sekolah sebelum lulus SMA/SMK/SMLB terhadap jumlah siswa pada awal tahun pelajaran dibandingkan dengan jumlah siswa pada akhir tahun ajaran.

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 14: Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Menengah Penerima Bantuan Melalui KIP

Jumlah peserta didik jenjang pendidikan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan indikator yang menunjukkan berapa banyak anak-anak SMA/SMK yang menerima manfaat dari Program Indonesia Pintar (PIP).



b. Indikator Kinerja Program (IKP) 15: Angka Putus Sekolah SMA/SMK

Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/SMPLB adalah proporsi anak kelompok usia 16-18 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan pendidikan satuan pendidikan SMA/SMK/SMLB.

c. Indikator Kinerja Program (IKP) 16: Sekolah Menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019

Persentase Kecamatan yang memiliki sekolah menengah pada tahun 2019 merupakan indikator yang menunjukkan bahwa pada akhir Renstra Ditjen Dikdasmen 2015-2019 yaitu tahun 2019 di setiap kecamatan sudah berdiri minimal 1 unit SMA atau SMK.

4. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 17: Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B.

Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B merupakan indikator yang menunjukkan berapa banyak SD/SDLB yang belum berakreditasi minimal B dan SMP/SMPLB yang belum berakreditasi minimal B yang dapat dipersiapkan memiliki akreditasi minimal B.

b. Indikator Kinerja Program (IKP) 18: Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter).

Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter) merupakan hasil penilaian terhadap perilaku (karakter) siswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler secara kualitatif yang dikuantifikasi menjadi nilai angka atau huruf di dalam buku laporan (rapor) siswa atau catatan guru.

c. Indikator Kinerja Program (IKP) 19: Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah merupakan indikator yang menunjukkan berapa banyak jenis medali yang diperoleh melalui kompetisi internasional. Berdasarkan jenis medali yang diperoleh tersebut dilakukan pembobotan



menjadi nilai tertimbang. Medali Emas bobotnya 3, Medali Perak bobotnya 2, dan Medali Perunggu bobotnya 1

d. Indikator Kinerja Program (IKP) 20: Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP.

Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP merupakan indikator yang menunjukkan persentase SD yang sudah memiliki sarana prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

e. Indikator Kinerja Program (IKP) 21: Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP.

Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP merupakan indikator yang menunjukkan besarnya persentase SMP yang sudah memiliki sarana prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan indikator yang menunjukkan besarnya persentase SD yang telah memenuhi SPM yang terlihat dari terpenuhinya semua indikator SPM jenjang satuan pendidikan SD.

f. Indikator Kinerja Program (IKP) 22: Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan indikator yang menunjukkan besarnya persentase SD yang telah memenuhi SPM yang terlihat dari terpenuhinya indikator-indikator SPM untuk jenjang satuan pendidikan SD.

g. Indikator Kinerja Program (IKP) 23: Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan indikator yang menunjukkan besarnya persentase SMP yang telah memenuhi SPM yang terlihat dari terpenuhinya indikator-indikator SPM untuk jenjang satuan pendidikan SMP.

h. Indikator Kinerja Program (IKP) 24: SM menerapkan program penyesuaian dengan dunia kerja

SM menerapkan program penyesuaian dengan dunia kerja merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang telah melakukan penyesuaian program dengan dunia kerja/industri



5. Jumlah Sekolah Rujukan/Model di setiap Kabupaten/Kota

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 25: Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/model

Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/model merupakan indikator yang menunjukkan besarnya persentase Kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang telah memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/model pada tahun 2019.

b. Indikator Kinerja Program (IKP) 26: Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B

Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B merupakan indikator yang menunjukkan besarnya persentase SMA/SMK yang telah memiliki tingkat akreditasi minimal B

6. Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 standar nasional pendidikan (SNP)

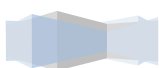
a. Indikator Kinerja Program (IKP) 27: Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya

Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya merupakan indikator yang menunjukkan besarnya persentase setiap satuan pendidikan yang meningkat capaiannya dalam penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang kemudian dikuantifikasi menjadi Index Efektivitas sesuai dengan jenis proses yang dijalankan dalam penerapan SNP tersebut.

7. Tata Kelola Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Baik

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 28 : Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan

Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan merupakan indikator yang mengharuskan data pendidikan dikelola secara benar, terus menerus, terkini (up date), yang meliputi kebenaran sumber data, kecermatan menginput, menyajikan dan penggunaan data.



b. Indikator Kinerja Program (IKP) 29 : Nilai minimal SAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (Sangat Baik)

Nilai minimal SAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (Sangat Baik) merupakan indikator yang mengharuskan SAKIP Direktorat Jenderal mendapatkan nilai minimal sebesar 80 (sangat Baik). Nilai ini akan tercapai bila SAKIP diterapkan secara benar dan konsisten.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2018**